



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa *smart city* merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral, sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat yang perlu dituangkan dalam *Master Plan Smart City*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang *Masterplan Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, menetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, atau penyimpanan.
7. *Masterplan Smart City* adalah Dokumen Rencana Induk *Smart City* di Kota Madiun yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan *Smart City* pada Pemerintah Kota Madiun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Penyusunan *Masterplan Smart City* dimaksudkan untuk menyusun rencana strategis yang digunakan sebagai arahan kebijakan, strategi dan pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan *Smart City* sehingga lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas, fungsi Pemerintah Daerah ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan *Masterplan Smart City* ini antara lain untuk:

- a. mewujudkan perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan *Smart City* yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengkaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi data, sistem informasi dan lain-lain;

- b. meningkatkan kualitas layanan, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengadilannya *Smart City* serta terselenggaranya pemakaian sumber daya secara optimal, efektif dan efisien.

Pasal 4

Manfaat penyusunan *Masterplan Smart City* adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya pemanfaatan *Smart City* yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi secara dinamis dan realistis;
- b. terwujudnya pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* yang lebih sistematis, terarah, berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas fungsi Pemerintah Daerah dalam peningkatan efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pendefinisian arahan strategis;
- b. perencanaan infrastruktur;
- c. rencana transisi;
- d. kerangka kebijakan pemanfaatan TIK di Daerah sesuai dengan *Masterplan Smart City*.

Pasal 6

(1) *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Visi *Smart City* Kota Madiun;
- Bab III : Strategi Pembangunan *Smart City*;
- Bab IV : Rencana Aksi *Smart City* Kota Madiun;
- Bab V : Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Kota Madiun;
- Bab VI : Penutup.

- (2) *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGEMBANGAN *SMART CITY*

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan *Smart City* Pemerintah Daerah adalah semua PD yang memiliki kemampuan dalam perencanaan *Smart City*.
- (2) *Smart City* Pemerintah Daerah adalah semua PD yang memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan *Smart City* oleh PD dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab melaksanakan pengembangan *Smart City* dan dapat membentuk Tim Pengembangan *Smart City* yang terdiri atas:
 - a. Tim Dewan *Smart City*; dan
 - b. Tim Pelaksana *Smart City*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart City* Kota Madiun bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada PD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 20 Juli 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 32/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya masyarakat urban, tantangan dan masalah baru dalam perencanaan urban (*urban planning*) memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan lintas sektor diantaranya ekonomi, sosial, dan pemerintah. Namun dalam praktiknya, penerapan *Smart City* di Pemerintah Daerah membutuhkan perencanaan yang matang karena konsep tersebut menekankan pada pentingnya inovasi untuk permasalahan khas tiap kota/kabupaten dengan memanfaatkan teknologi terkini (seperti sensor, *data analytic*).

Dalam rangka mengembangkan *Smart City* di Indonesia, pada tahun 2017 Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain menginisiasi Gerakan menuju 100 *Smart City* atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pemerintah Daerah menyambut baik program tersebut dan melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* pada tahun 2018. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *Smart Nation* yang dirangkai dari *Smart Cities* maka Pemerintah Daerah melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan Kota Madiun *Smart City*. Dimensi *Smart City* yang menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*Smart Governance*), permukiman penduduk (*Smart Living*), lingkungan masyarakat (*Smart Society*), dan pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*).

Serangkaian bimbingan teknis untuk perencanaan kota cerdas telah diikuti oleh segenap perwakilan instansi daerah Kota Madiun di tahun 2019. Konsep *Smart City* yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal. Ide-ide, inovasi, kreativitas untuk menjadikan Daerah menjadi lebih baik berupaya diwujudkan dan dilaksanakan. Dengan mengedepankan ciri khas Daerah sebagai **Kota Pecel** dan **Kota Pendekar** Pemerintah Daerah berencana untuk mengembangkan inovasi, ide, dan kreativitas Pecel serta pencak silat sebagai ciri khas utama Daerah, melalui hadirnya **Peceland**.

Pengembangan inovasi, ide dan kreativitas Peceland kemudian akan dituangkan dalam masterplan *Smart City* sebagai pedoman dalam pengembangan menuju Kota Madiun *Smart City*. Masterplan ini diharapkan akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis kota cerdas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang akan direview secara periodik setiap tahun sesuai dinamika kebutuhan, peraturan dan kebijakan pemerintah terkini.

1.2 Tujuan Masterplan *Smart City*

Tujuan dari penyusunan masterplan *Smart City* Kota Madiun adalah sebagai dasar, acuan, perencanaan pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Madiun. Penyusunan masterplan dilakukan secara sistematis, logis, kondisional dan realistis sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Kota Madiun sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Untuk lebih detail tujuan penyusunan masterplan *Smart City* Kota Madiun akan diuraikan dibawah ini.

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan dan pengembangan *Smart City* Kota Madiun;
- b. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep *Smart City*;
- c. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen masterplan *Smart City* Kota Madiun;
- d. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan masterplan *Smart City* Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

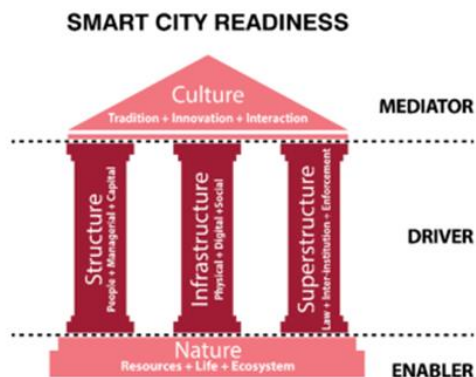
1.4 Kerangka Pikir *Smart City*

Smart City merupakan topik yang kepentingannya semakin dikenal di berbagai disiplin akademis dan perencanaan Kota. Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan menjadi acuan bagi Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* ini.

Istilah *smart* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “intelligent”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Smart City mendasari strategi kota dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di beberapa bidang seperti ekonomi, lingkungan, mobilitas dan pemerintahan untuk mengubah infrastruktur kota dan layanan. *Smart City* mengilhami visi ruang di mana komponen utama infrastruktur dan layanan lingkungan, tanggap darurat, lalu lintas dan manajemen energi yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga fitur dan aplikasi dapat dengan mudah dikombinasikan dengan kemampuan yang ada.

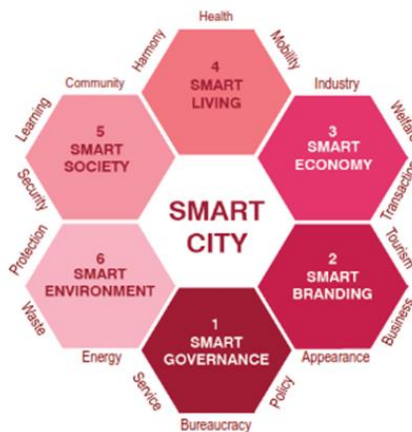
Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Elemen Smart City Readiness (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

- a. Struktur: pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- b. Infrastruktur: pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- c. Suprastruktur: penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Dari kerangka berikir *Smart City* Readiness, kerangka berpikir selanjutnya adalah dimensi – dimensi yang terdapat dalam *Smart City* itu sendiri yang dijelaskan pada Gambar 2.2.

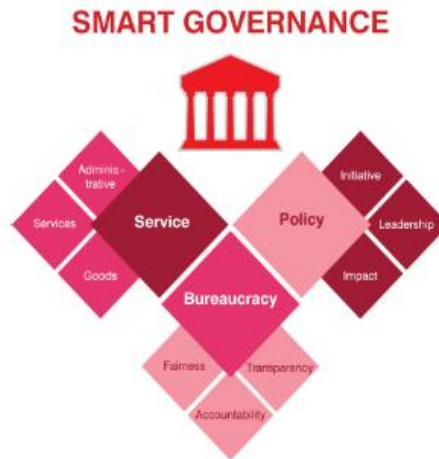


Gambar 2.2 Dimensi Smart City (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

1.4.1 Kerangka Pikir *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Smart Governance harus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*) seperti terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Smart Governance (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Inisiatif pembangunan *Smart Governance* diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

1) Pelayanan Publik (*Public Service*)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan dan monitoring sarana prasarana penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan dan monitoring sarana prasarana penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya transportasi, hiburan, informasi, listrik, internet, dan lain-lain
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

2) Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)*".

3) Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- Peningkatan partisipasi warga dalam perumusan kebijakan publik.

Adapun layanan publik dari pemerintah haruslah memenuhi unsur-unsur kualitas. Unsur – unsur kualitas yang bisa menjadi alat ukur bagi layanan publik antara lain:

- a) Convenience** (kenyamanan) yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan kemudahan akses dan availabilitas untuk digunakan oleh penduduk.
- b) Security** (keamanan) yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan rasa aman dan kepercayaan penduduk saat menggunakan layanan dari pemerintah.
- c) Reliability** (kehandalan) yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu.
- d) Personal** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan kecocokan informasi yang diberikan dan juga kesesuaian layanan dengan kebutuhan.
- e) Problem-solving** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan kemampuan adaptasi layanan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul.
- f) Fairness** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan unsur keadilan dan kesamarataan layanan untuk semua lapisan masyarakat.
- g) Fiscal** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran dimana asalnya adalah dari masyarakat.
- h) Citizen Influenced** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan dari pemerintah daerah.

Selain berusaha untuk memberikan nilai tinggi pada masing-masing faktor di atas, layanan government juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan paradigma sistem informasi. Di sektor pemerintahan, perubahan tersebut tertuang dalam konsep eGov 2.0 dan eGov 3.0 (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Perubahan konsep e-Gov 1.0 hingga eGov 3.0 mengarah ke Smart Governance

Konsep Elemen	eGov 1.0	eGov. 2.0	eGov 3.0
Tujuan Utama	Layanan yang lebih baik	Keterbukaan dan kolaborasi	Penyelesaian masalah sosial, kesejahteraan masyarakat, optimisasi sumber daya
Metode	Pemerintah yang saling terhubung	Pemerintah yang terbuka dan kolaboratif	Pemerintah yang Pintar (Smart Governance)
Level	Nasional	Lokal dan Nasional	Lokal hingga Internasional
Tool	Portal	Social Media	Smart Services/Devices /Apps
Risiko	Mental melayani public	Mental melayani public	Mental melayani public
Sumber daya TIK	Infrastruktur dan Organisasi	SDM dan Data	Machine Intelligence dan IoT
Disiplin ilmu terkait selain TIK	Manajemen	Sosiologi	Segala disiplin ilmu

Tujuan utama eGov 2.0 adalah keterbukaan layanan dan peningkatan integrasi atau kolaborasi sistem-sistem yang ada, memanfaatkan social media dalam menunjang pelayanan public nya. Sedangkan untuk eGov 3.0 memberikan layanan yang sifatnya lebih personalize, disesuaikan dengan kebutuhan per individu penduduk. Karena per individu, maka gadget yang dimiliki oleh masing – masing individu akan lebih dimanfaatkan. Oleh karena itu perlu diadakan pengumpulan data yang dapat membantu memperbaiki kebijakan publik dengan menggunakan teknologi seperti machine learning dan IoT. Partisipasi masyarakat yang sudah mulai dibuka pada eGov 2.0 harus lebih ditingkatkan lagi pada eGov 3.0 karena komunikasi dan aplikasi lebih dekat dengan setiap individu. Saluran komunikasi tiap indivisu ke pemerintah terbuka dan aplikasi atau layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah bersifat *customized* tergantung karakteristik individu tersebut. Layanan-layanan yang sifatnya sosial yang membantu kehidupan masyarakat akan lebih meningkat. *Smart Governance* sebagai salah satu dimensi *Smart City* akan sangat berperan di eGov 3.0 ini sehingga dapat membentuk pemerintahan yang berbasis layanan kepada masyarakat.

1.4.2 Kerangka Pikir *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep *branding* di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.4 *Smart Branding* (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Inisiatif pembangunan *Smart Branding* dilakukan pada beberapa indikator seperti terlihat pada Gambar 2.4 yang akan dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut.

1) **Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)**

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*).

- Menggali diferensiasi yang khas dari Kota Madiun agar terlihat berbeda dengan kota-kota lainnya.
- Membangun dan mengembangkan identitas visual kota yang dapat menjadi kunci bagi orang banyak agar mudah mengenali berbagai macam potensi yang ada di Kota Madiun.
- Mengembangkan dan memperkenalkan beragam kesenian khas asli Kota Madiun kepada masyarakat luas. Hal tersebut termasuk kuliner khas berupa pecel, tarian daerah seperti Solah Madiunan, Kebudayaan lainnya seperti Silat, dan lain-lain.
- Mengedukasi masyarakat kota dan berkolaborasi untuk membuat berbagai event untuk mempromosikan destination tourism yang ada di Kota Madiun.
- Menyusun strategi brand aktivasi dari Kota Madiun dan mengkomunikasikannya kepada khalayak ramai.
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/*bedding & breakfast* (B&B), restoran, dan lain-lain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.

2) Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)

- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya *marketplace* daerah.
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah. misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.

3) Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

1.4.3 Kerangka Pikir *Smart Economy*

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.



Gambar 2.5 *Smart Economy* (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Sasaran dari dimensi *Smart Economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan seperti terlihat pada Gambar 2.5. Inisiatif pembangunan *Smart Economy* diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

1) Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)

Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lainlain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

2) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

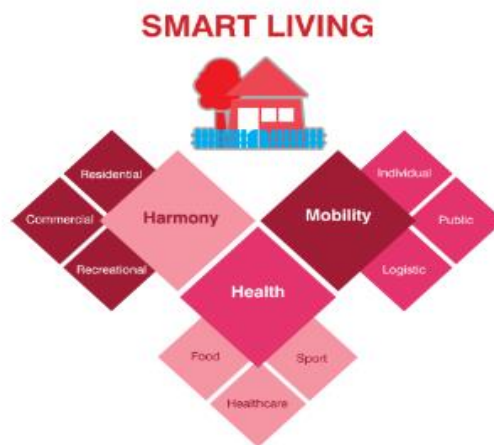
- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*).
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*).
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

3) Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*.
- Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *ecommerce* dan *marketplace*.

1.4.4 Kerangka Pikir *Smart Living*

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City* (lihat Gambar 2.6).



Gambar 2.6 *Smart Living* (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Sasaran dari *Smart Living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Inisiatif pembangunan *Smart Living* dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

1) Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

2) Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

3) Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

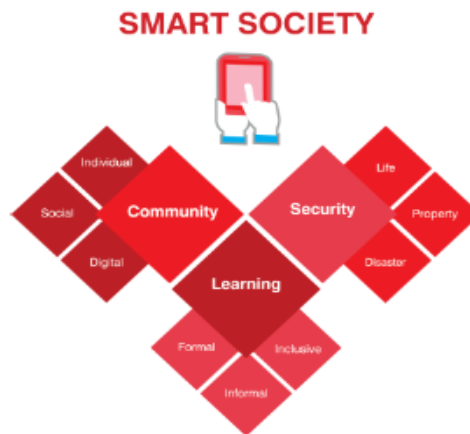
1.4.5 Kerangka Pikir *Smart Society*

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *Smart Society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*) – seperti terlihat pada Gambar 2.7. Inisiatif pembangunan *Smart Society* dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

1) Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (*digital*) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan *Smart City* misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang i dan lain-lain.



Gambar 2.7 Smart Society (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

2) Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *Smart School*, *Smart Campus*, *Smart Pesantren*, *Smart Training Program* dan lain-lain.

3) Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT).

1.4.6 Kerangka Pikir *Smart Environment*

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.



Gambar 2.8 Smart Environment (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

BAB II

VISI *SMART CITY* KOTA MADIUN

Dalam mengembangkan visi dan misi *Smart City* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- 2) Visi dan Misi Pembangunan Nasional;
- 3) Harapan warga masyarakat;
- 4) Analisis Faktor eksternal di masa depan

Sedangkan untuk penyusunan visi *Smart City* terdapat kriteria dalam perumusannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
- 2) Menjawab permasalahan pembangunan *Smart City* Kota Madiun dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
- 4) Disertai penjelasan mengapa visi *Smart City* tersebut dibutuhkan di Kota Madiun, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di Kota Madiun; dan
- 5) Sejalan dengan visi dan arah pembangunan Kota Madiun dan nasional.

2.1 Visi *Smart City* Kota Madiun

Visi Kota Madiun seperti terlihat sebagai berikut:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa
Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Berdasarkan visi Kota Madiun didapatkan kata kunci untuk merumuskan visi *Smart City* seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Elemen Visi Smart City

Elemen Visi Kota Madiun	Elemen Visi <i>Smart City</i>	Dimensi <i>Smart City</i>
“Bersih”	“Layanan Berbasis Teknologi”	<i>Smart Governance</i>
“Berwibawa”	“Kharismatik dan Produktif”	<i>Smart Branding,</i> <i>Smart Economy,</i> <i>Smart Environment</i>
“Sejahtera”	“Kehidupan Masyarakat Berkualitas Menuju Kota Kelas Dunia”	<i>Smart Society,</i> <i>Smart Living</i>

Sehingga rumusan Visi Smart City Kota Madiun adalah:

“Menciptakan Madiun Kota Pintar yang Produktif Didukung Layanan Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas Menuju Kota Kelas Dunia”

2.2 Misi Smart City Kota Madiun

Misi Kota Madiun:

Misi ke-1: Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi ke-2: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ke-3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun

Misi ke-4: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Berdasarkan misi tersebut, disusunlah misi *Smart City* Kota Madiun dengan mempertimbangkan dimensi berikut.

1. **Smart Governance**

Misi ke-1: Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel

2. **Smart Branding**

Misi ke- 2: Penguatan identitas daerah

3. **Smart Economy**

Misi ke- 3: Ekosistem industri yang berdaya saing

4. **Smart Living**

Misi ke- 4: Harmonisasi tata kota yang nyaman

5. **Smart Society**

Misi ke- 5: Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas

6. **Smart Environment**

Misi ke- 6: Sistem ekonomi berputar (*Circular Economy*)

2.3 Tujuan dan Sasaran Smart City Kota Madiun

Dari kerangka pikir *Smart City* di bab sebelumnya, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan *Smart City* di Kota Madiun sebagai upaya mewujudkan Kota Madiun yang bersih, berwibawa, dan sejahtera sesuai dengan potensi yang telah dipetakan dalam “Buku 1 Analisis Strategis *Smart City* Kota Madiun” ke dalam 6 (enam) dimensi, yaitu:

- a. *Smart Governance*
- b. *Smart Branding*
- c. *Smart Economy*
- d. *Smart Living*
- e. *Smart Society*
- f. *Smart Environment*

a. **Smart Governance**

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Adapun tujuan dan sasaran *Smart Governance* seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran *Smart Governance*

<p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan dukungan TIK.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. G1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat2. G2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat3. G3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok
<p>b. Manajemen Birokrasi (<i>Bureaucracy Management</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. G4. Menciptakan Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency) dengan dukungan TIK.
<p>c. Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. G5. Mengambil kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat2. G6. Mengembangkan Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

b. Smart Branding

Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Tidak hanya memanfaatkan potensi lokal, tetapi juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan di Kota Madiun. Adapun tujuan dan sasaran *Smart Branding* seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran *Smart Branding*

Tujuan: Peningkatan daya saing daerah dengan pengembangan budaya kearifan local untuk penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup local, nasional maupun internasional
Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:
a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)
1. B1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (destination). 2. B2. Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan 3. B3. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung
b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)
1. B4. Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif
c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)
1. B5. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

c. *Smart Economy*

Smart Economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Tujuan dan sasaran *Smart Economy* terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran *Smart Economy*

<p>Tujuan: Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan <i>financial literacy</i> masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan <i>less-cash society</i>, keterbukaan informasi pasar dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (<i>Industry</i>)</p>
<p>1. E1. Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai.</p>
<p>b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat (<i>Welfare</i>)</p>
<p>1. E2. Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (income)</p>
<p>c. Membangun ekosistem transaksi keuangan (<i>Transaction</i>)</p>
<p>1. E3. Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash dengan didukung oleh usaha-usaha yang melek keuangan (financial literate) dalam suatu ekosistem keuangan yang terpadu</p>

d. *Smart Living*

Smart Living bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*. Tujuan dan sasaran *Smart Living* seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Smart Living

<p>Tujuan: Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, aman, nyaman, dan efisien.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)</p>
<p>1. L1. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (recreational).</p>
<p>b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)</p>
<p>1. L2. Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (healthcare), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (sport)</p>
<p>c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)</p>
<p>1. L3. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.</p>

e. Smart Society

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Tujuan dan sasaran Smart Society seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Smart Society

<p>Tujuan: Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (<i>Community</i>)</p>
<ol style="list-style-type: none">1. S1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah2. S2. Mengembangkan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif
<p>b. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien (<i>Learning</i>) dan Komprehensif</p>
<ol style="list-style-type: none">1. S3. Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang difable.2. S4. Membangun platform edukasi bagi masyarakat
<p>c. Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat (<i>Security</i>)</p>
<ol style="list-style-type: none">1. S5. Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintahmaupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT).

f. Smart Environment

Pengelolaan lingkungan yang cerdas memberikan perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Tabel 2.7 menunjukkan tujuan dan sasaran dimensi ini.

Tabel 2.7 Tujuan dan Sasaran Smart Environment

<p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, terpadu, dan mandiri (<i>Madiun Health and Comfort City</i>)</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none">1. EN1. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara sertamengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT)2. EN2. Membangun ruang terbuka hijau3. EN3. Mengembangkan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi4. EN4. Mengendalikan polusi udara
<p>b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah (Waste)</p> <ol style="list-style-type: none">1. EN5. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (<i>household</i>)2. EN6. Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (<i>industrial</i>)3. EN7. Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>)4. EN8. Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

**c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab
(Energy)**

1. **EN9.** Memanfaatkan energi yang efisien dan bertanggungjawab
2. **EN10.** Mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Dalam melakukan strategi pembangunan *Smart City*, beberapa ahli mengutarakan bahwa menciptakan kota yang cerdas merupakan suatu hal yang kompleks, membutuhkan proses jangka panjang, dan keberhasilannya tergantung pada komitmen berkelanjutan untuk aksi yang jelas, antara lain:

- a. Kepemimpinan terpadu.
- b. Visi inspiratif yang jelas.
- c. Satu arah strategi dan tujuan yang jelas.
- d. Penciptaan model tata kelola yang sesuai dan dapat diterima.
- e. Perkembangan kasus bisnis dan penilaian ekonomi untuk menilai dampak dari pembangunan.
- f. Sebuah pemahaman yang jelas tentang pembangunan perkotaan, transportasi dan infrastruktur strategi dan model regenerasi.
- g. Sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan seluruh fungsi kota dan departemen untuk menciptakan sinergi dan wawasan baru.
- h. Apresiasi saat ini dan muncul praktek terbaik dalam penggunaan sistem cerdas dalam layanan, infrastruktur, dan bangunan.
- i. Apresiasi konteks dan pemahaman tentang kepentingan stakeholders, budaya dan adat istiadat setempat dapat memiliki pengaruh besar pada apa yang dapat diterima.
- j. Pemahaman tentang kepemilikan, keselamatan, keamanan dan penggunaan data serta model pendanaan untuk infrastruktur baru.

Sedangkan strategi untuk kota cerdas juga harus mencakup:

- a. komunikasi yang jelas
- b. sebuah visi pemersatu melalui siklus hidup.
- c. integrasi dengan kebijakan dan struktur tata kelola.
- c. pemahaman holistik yang jelas tentang bagaimana data ditransfer dan ditangkap antara teknologi dan sistem dan bagaimana ia digunakan oleh pengambil keputusan.

Strategi ini didapatkan dari kondisi eksisting Kota Madiun yang dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat*). Dari hasil SWOT, akan didapatkan strategi pembangunan smart city Kota Madiun. Secara umum, strategi pembangunan Smart City Kota Madiun menetapkan dimensi **Smart Branding** atau pemasaran cerdas Kota Madiun sebagai “lokomotif” pendorong pembangunan dimensi-dimensi Smart City lainnya sekaligus sebagai *Quick Win* Smart City Kota Madiun.

Pembangunan branding Kota Madiun ini akan bertumpu pada tiga identitas Kota Madiun, yakni: kuliner **Pecel**, budaya dan olah raga **Pencak Silat**, serta pusat industri dan pendidikan **kereta api** nasional.

Secara lebih detail, SWOT dan strategi pembangunan *Smart City* berdasarkan dimensinya akan diuraikan sebagai berikut.

3.1 Smart Governance

Tujuan Smart Governance adalah *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan dukungan TIK.*

3.1.1 Analisis Strategi Smart Governance

Penyusunan strategi pada dimensi *Smart Governance* akan diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Matrik SWOT Smart Governance

TOWS MATRIX - SMART GOVERNANCE KOTA MADIUN 2019	Strength			Weakness		
	Public Service	Birokrasi	Kebijakan	Public Service	Birokrasi	Kebijakan
SP.1 Area pelayanan (demografi Kota Madiun) tidak terlalu luas	SB.1 Kemudahan pengurusan	SK.1 Transparansi standar pelayanan kepada masyarakat	WP.1 Masih belum ada pelayanan yang terintegrasi, masih terpisah-pisah (1)	WB.1 Masih ada pelayanan yang belum sesuai standar pelayanan	WK.1 Sering terjadi benturan kebijakan daerah dan pusat	
SP.2 Transportasi mudah terjangkau	SB.2 Sudah banyak inovasi untuk pemangkasan birokrasi	SK.2 Komitmen pimpinan	WP.2 Beberapa layanan masih lama (1)	WB.2 Masih ada pelayanan yang manual		
SP.3 Jumlah penduduk sedikit	SB.3 Anggaran mencukupi	SK.3 Ketersediaan regulasi	WP.3 Transparansi pelayanan ada yang masih kurang jelas (1)	WB.3 Jumlah SDM terbatas (5 dan 6)		
SP.4 Infrastruktur bagus			WP.4 Masih ada layanan yang berbayar (1 dan 2)	WB.4 Masih ada ego sektoral (5)		
SP.5 Pelayanan cepat			WP.5 Manajemen antrian belum semuanya terukur (1)	WB.5 Masih ada budaya birokrasi yang belum mengarah ke pelayanan prima		
SP.6 Pelayanan tuntas (pendaftaran sampai resep obat keluar dalam sehari)			WP.6 Masih ada layanan yang belum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (1)			
SP.7 Di beberapa pelayanan SDM cukup mumpuni						

Opportunity	Public Service	OP.1 Dimungkinkan untuk terbitnya Satu Kartu untuk semua pelayanan	Menciptakan Layanan Publik yang Efektif dan Efisien [SP.5, SP.6, SP.7 - OP1]					
	Birokrasi	OB.1 Birokrasi sudah mulai mewadahi kemajuan teknologi		Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Publik [SB.1, SB.2; SK.1 - OB.1]	Meningkatkan Ketersediaan Informasi Penyediaan Kebutuhan Bahan dan Jasa Pokok [WP.1 - OB.1]	Menguatkan Tata Kelola Birokrasi [WB.1, WB.2, WB.3, WB.5 - OB.1]	Meningkatkan Efisiensi Kebijakan Publik [WK.1 - OB.1]	
	Kebijakan	OK.1 Komitmen pimpinan saat ini sudah cukup tinggi OK.2 Koordinasi antar OPD sudah mulai berjalan						
Threats	Public Service	TP.1 Adanya calo pelayanan (1) TP.2 Oknum petugas pelayanan yang masih profit oriented (3) TP.3 Masih ada perbedaan perlakuan bagi kalangan/kelompok social tertentu (3)						

	Birokrasi	TB.1 Kurang tegasnya penegakan sanksi bagi SDM pelayanan yang melakukan pelanggaran (8)		Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia [SB.3; SK.2, SK.3 - TB.1]			
	Kebijakan	TK.1 Masih adanya budaya sungkan dalam penegasan aturan pelayanan					

3.1.2 Strategi *Smart Governance*

Strategi yang disusun pada dimensi *Smart Governance* seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Strategi *Smart Governance*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)				
PS01	G1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	G1S1. Menciptakan Layanan Publik yang Efektif dan Efisien G1S2. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Publik	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel
PS02	G2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat	Indeks Harga Konsumen (IHK)	G23S1. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Penyediaan Kebutuhan Bahan dan Jasa Pokok	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
PS03	G3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok			
Manajemen Birokrasi Yang Efisien (<i>Bureaucracy</i>)				
BR01	G4. Menciptakan Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency) dengan dukungan TIK..	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	G4S1. Memperkuat Tata Kelola Birokrasi G4S2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel
Efisiensi Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)				
PP01	G5. Mengambil kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat	Tingkat Keterbukaan Kebijakan Publik	G5S1. Meningkatkan Efisiensi Kebijakan Publik	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel
PP02	G6. Mengembangkan Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.			

3.2 Smart Branding

Tujuan yang disusun pada Smart Branding adalah Membangun image positif kota Madiun sebagai destination tourism kepada khalayak ramai.

3.2.1 Analisis Strategi Smart Branding

Smart Branding adalah upaya membangun reputasi yang baik dari sebuah kota. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi di lapangan, Kota Madiun memiliki kekhasan budaya yang dapat menjadi ruh dari *Smart Branding* Kota Madiun. Kuliner pecel yang khas, seni tari, pencak silat, gedung-gedung kuno, industri Kereta Api (KA) hingga sejarah kotanya. Dari riset-riset tersebut ditemukanlah alternative-alternatif tagline untuk mengkomunikasikan karakteristik dan potensi kota madiun sebagai sebuah brand:

Madiun Kampiun

Kata kampiun sendiri merupakan serapan dari Bahasa asing yakni *Champion*. Yang memiliki arti juara. Kampiun adalah juara. Tagline ini lebih bersifat lokal dannasional. Dengan tagline Madiun Kampiun, diharapkan persepsi positif dibenak masyarakat akan beragam potensi yang dimiliki kota Madiun mudah diingat dan menarik khalayak untuk berkunjung ke kota Madiun. Bahwa kota Madiun memang Kampiun, Kampiun Kulinernya. Kampiun Budayanya, Kampiun Tariannya, Kampiun Sejarahnya, Kampiun Taman kotanya, Kampiun gedung-gedungnya. Kampiun Pecelannya, kampiun pendekarnya, kampiun lingkungannya, kampiun warga kotanya, kampiun kotanya.

Tagline ini berbahasa Indonesia sangat mudah untuk diingat tapi mampu mewakili karakteristik dan identitas kota bila dilakukan aktivasi brandnya.

Penyusunan strategi pada dimensi *Smart Branding* akan diuraikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Matrik SWOT Smart Branding

TOWS MATRIX - SMART BRANDING KOTA MADIUN 2019	Strength						Weakness					
	TOURISM (Membangun Ekosistem Pariwisata & APPEARANCE (penataan wajah Kota)	Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan edukasi keluarga	Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumong so begai daya tarik wisata kuliner	Rebranding Hotel di Kota Madiun	Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion	TOURISM (Membangun Ekosistem Pariwisata & APPEARANCE (penataan wajah Kota)	Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	Cagar Buda ya sebag ai waha na rekre asi dan eduk asi kelua rga	Rebrandin g Sambel Pecel, Bluder dan Madumong so begai daya tarik wisata kuliner	Rebrandin g Hotel di Kota Madiun	Batik Khas Madi un sebag ai bagia n wisat a buday a dan fashi on
ST.1 terdapat TOL Trans Jawa	SR.1 terdapat TOL Trans	SC.1 cagar budaya	SK.1 32 Hotel di Madiun	SH.1 TOL trans	SB.1 TOL trans Jawa	WT.1 belum ada	WR.1 Minimnya rasa	WC.1 Rusa k	WK.1 belum ada pusat jajanan	WH.1 Menjamu rnya rumah	WB.1 belu m ada	
ST.2 Stasiun Besarnya	SR.2 Stasiun	SC.2 Bus Pariwisata	SK.2 Menjamu rnya	SH.2 Stasiun besar	SB.2 Stasiun besar	WT.2 bersama	WR.2 memiliki	WC.2 Kurangny usia	WK.2 oleh-oleh pengemas	WH.2 kos Menurun nya	WB.2 sentra indu stri	
ST.3. Padepoka n Pencak	SR.3 Besarnya	SC.3 Komunitas pemerhati budaya	SK.3 e- Commers	SH.3 32 Hotel di Madiun	SB.4 10 motif Batik	WT.3 Batik menampa kkan	WR.3 kesadaran menjaga	WC.3 an belum marketabl e	WK.3 angka hunian	WH.3 angka hunian	WB.3 angka hunian	

	rekreasi dan edukasi keluarga	a OC.2 Dibukan ya akses ke seluruh cagar budaya OC.3 Pendana an Rehabilit asi Cagar budaya			Lokal [SC.1, SC.2, SC.3 - OC.2, OC.3]									
	Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumungso sebagai daya tarik wisata kuliner	OK.1 Festival Pecel Pincuk OK.2 Penyajian menu di hotel dan restoran	Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Khas Madiun [ST.1, ST.2 - OK.1]											
	Rebranding Hotel	OH.1 Festival										Meningkatkan Kemudahan Akses		

3.2.2 Strategi *Smart Branding*

Strategi yang disusun pada dimensi *Smart Branding* seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Strategi *Smart Branding*

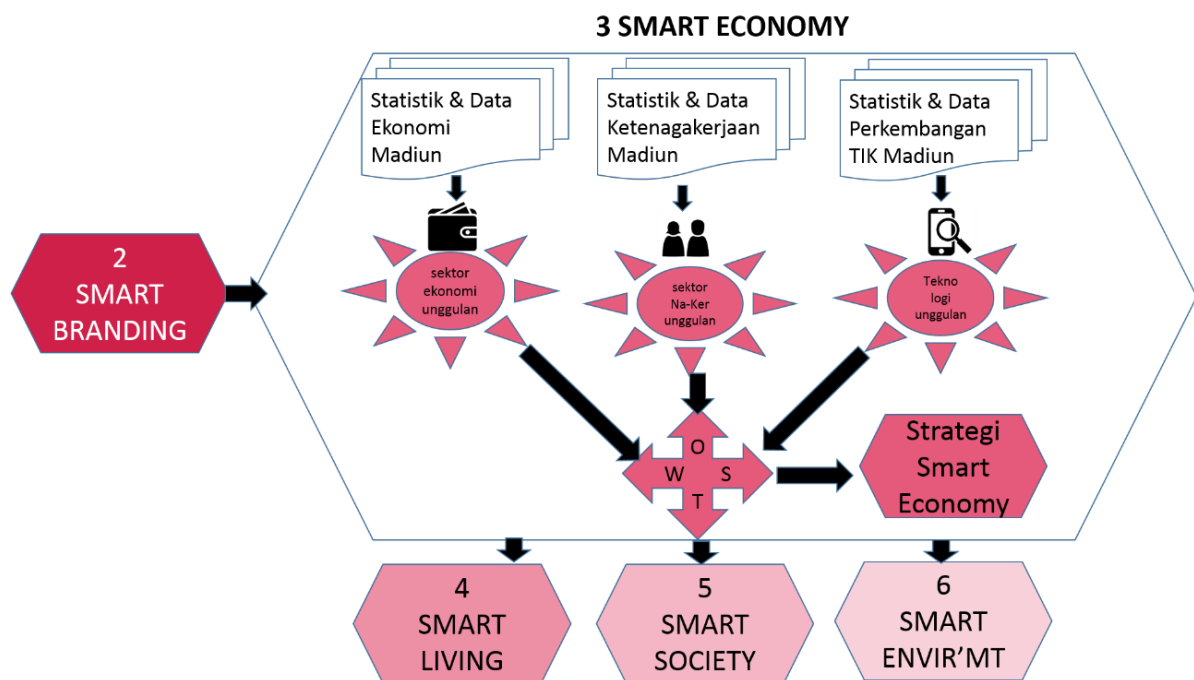
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)				
TB01	B1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (<i>destination</i>).	% peningkatan kunjungan wisatawan	B1S1. Meningkatkan Citra Kota Pendekar B1S2. Mempertahankan Kearifan Budaya Lokal B1S3. Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Khas Kota Madiun	Misi 2 Penguatan identitas daerah
TB02	B2. Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan	Indeks Kepuasan Pengunjung (IKP)	B2S1. Meningkatkan Kemudahan Akses Potensi Wisata	Misi 2 Penguatan identitas daerah
TB03	B3. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung		B34S1. Meningkatkan Ekosistem Budaya Pariwisata	Misi 2 Penguatan identitas daerah
TB04	B4. Membuat komunikasi yang tepat melalui kegiatan IMC untuk menkomunikasikan <i>destination tourism</i> yang ada di kota Madiun dengan berbagai media yang dibutuhkan			
Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)				

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
BB01	B5. Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif	% Pertumbuhan Sektor Perdagangan	B5S1. Mengembangkan Industri Kreatif	Misi 2 Penguatan identitas daerah
Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)				
CBO1	B6. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.	%RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota)	B6S1. Mempercantik Wajah Kota	Misi 2 Penguatan identitas daerah

3.3 Smart Economy

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang cerdas. *Smart Economy* bertujuan: Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less- cash society*, keterbukaan informasi pasar dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.

Tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui tiga pilar *Smart Economy*, yaitu ekosistem **industri**, peningkatan **kesejahteraan** masyarakat, dan ekosistem **transaksi** keuangan. Dalam melakukan penyusunan strategi *smart economy* digunakan metodologi seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Metodologi penyusunan Strategi Smart Economy

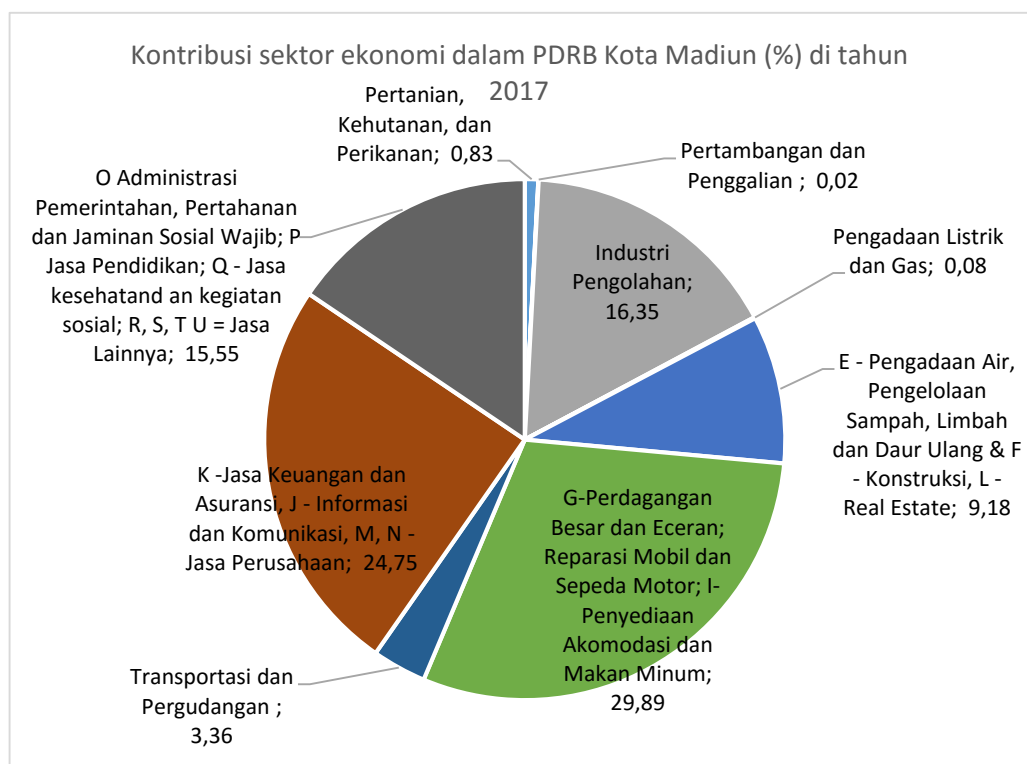
Kondisi eksisting di tiap sub dimensi *Smart Economy* akan dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut. Sub dimensi yang dimaksud meliputi industri, kesejahteraan, dan transaksi.

Sub Dimensi Industri (*Industry*)

Pembangunan industri dalam *Smart Economy* bertujuan untuk membangun industri ekonomi yang berdaya saing, yaitu sektor ekonomi yang menunjukkan unggulan daerah yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai. Menurut Biro Pusat Statistik Kota Madiun mencatat bahwa terdapat 22 sektor ekonomi pembentuk PDRB, namun hanya terdapat 9 (Sembilan) sektor lapangan pekerjaan.

Untuk itu, ke-22 sektor ekonomi yang ada di kelompokkan ke dalam sektor kerja, sehingga bisa dapat dibandingkan nantinya untuk mencari sektor ekonomi unggulan.

Gambar 3.2 menunjukkan kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB Kota Madiun dalam %, tahun 2017.



Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Ekonomi dalam PDRB Kota Madiun, %, tahun 2017 (Sumber: BPS Kota Madiun,2019)

Dari gambar diagram diatas terlihat bahwa Kota Madiun memiliki 5 (lima) sektor utama pendukung ekonomi yaitu:

- Sektor Perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi sepeda motor dan mobil, penyediaan akomodasi dan makan minum – dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 29,89%
- Sektor Jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi serta jasa perusahaan lainnya – dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 24,75%
- Sektor industri pengolahan – dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 16,35%
- Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan dan kesehatan serta sosial – dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 15,55%
- Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta konstruksi dan real estate – dengan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun sebesar 9,18%.

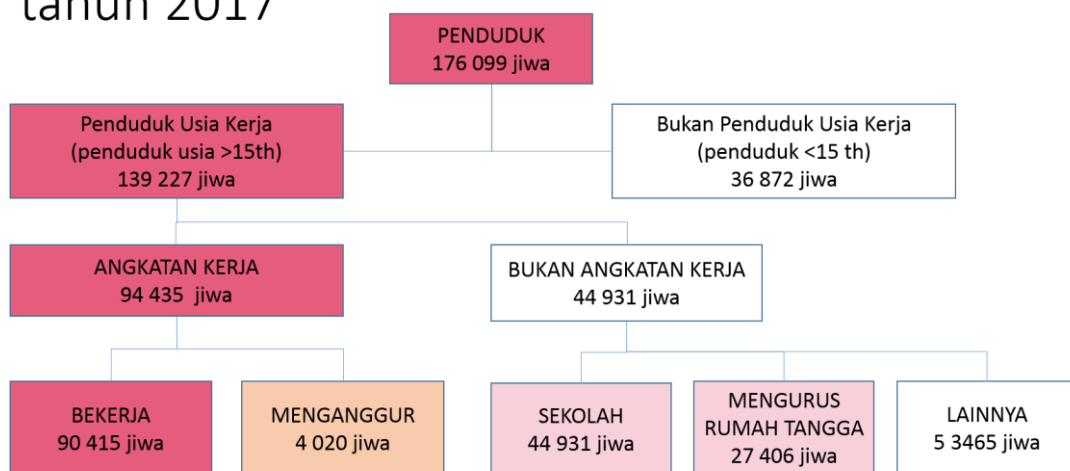
Dengan sasaran Kota Madiun yang mengedepankan aspek pariwisata sebagai pendorong ekonominya, keseimbangan pembangunan Kota Madiun tidak hanya mengandalkan satu sektor, tetapi didukung oleh sektor-sektor lainnya yang merupakan modal harus terus dijaga. Ekonomi yang memiliki pertumbuhan didukung oleh multi sektor, akan dapat lebih mempercepat pembangunannya.

Jika mengacu kepada struktur industri, maka Kota Madiun merupakan kota yang menjadi pemicu pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, karena sektor yang tumbuh adalah sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (industri jasa). Sektor primer belum berkontribusi banyak secara ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun (hanya 0,83%). Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wilayah perkotaan memiliki lahan yang terbatas untuk industri primer, seperti pertanian dan peternakan /perikanan/kehutanan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah pertumbuhan ekonomi yang juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Untuk itu, sub bab berikut akan membahas dimensi kesejahteraan dalam penyusunan strategi *Smart Economy* kota Madiun.

Sub Dimensi Kesejahteraan (Welfare)

Pembangunan *Smart Economy* yang mengusung aspek kesejahteraan ditujukan agar program-program ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata, yang tercermin dalam pendapatan rumah tangga.

Penduduk Kota Madiun berdasarkan kegiatan tahun 2017

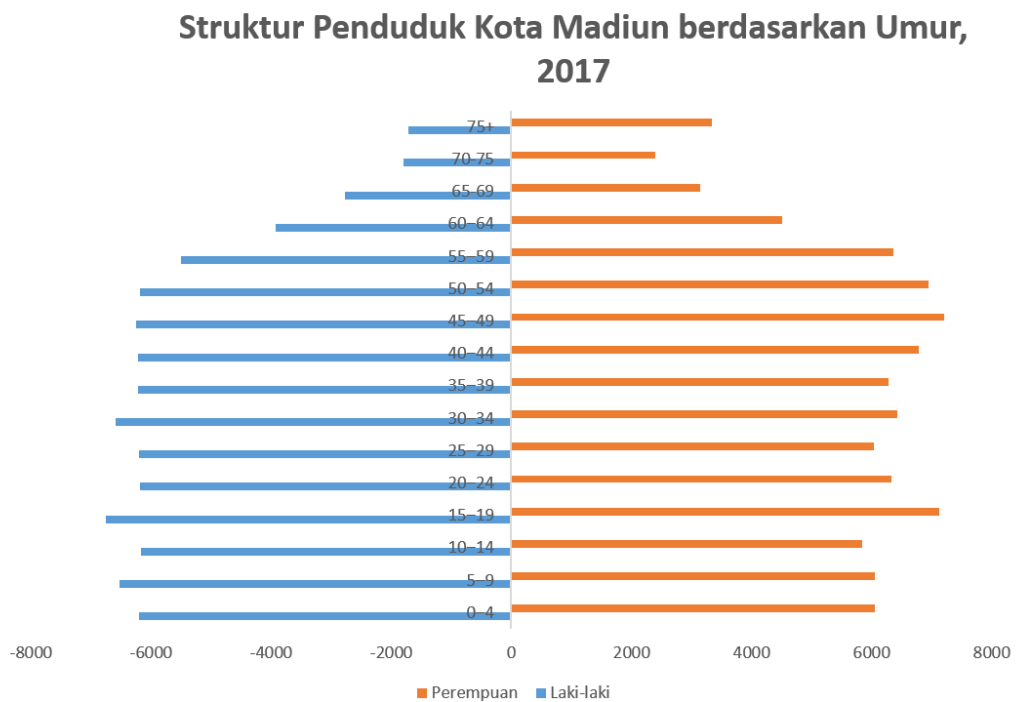


Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Gambar 0.3 Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kegiatan, 2017

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa belum semua penduduk Kota Madiun yang masuk dalam angkatan bekerja. Di tahun 2017, Kota Madiun menghadapi tantangan angka pengangguran sebesar 4 ribu jiwa, serta partisipasi penduduk perempuan dalam bekerja (38 857 jiwa), masih lebih rendah daripada laki-laki (51 558 jiwa). Dan jika dilihat dari struktur demografi penduduk (lihat

Gambar 3.4), Kota Madiun merupakan kota yang beruntung karena memiliki banyak tenaga kerja produktif, dan akan memiliki bonus demografi karena penduduk usia sekolah sebentar lagi akan memasuki usia produktif. Di satu sisi, bonus demografi ini merupakan peluang, namun disisi lain, menjadi tantangan bagi Kota Madiun untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Ancaman yang terjadi jika kota Madiun tidak dapat menciptakan bagi penduduknya adalah akan terjadi brain drain (keluarnya penduduk usia produktif, yang berpendidikan dan berkeahlian untuk bekerja diluar kota Madiun), yang menyebabkan Kota Madiun akan kehilangan tenaga kerja berkualitas yang dimilikinya.

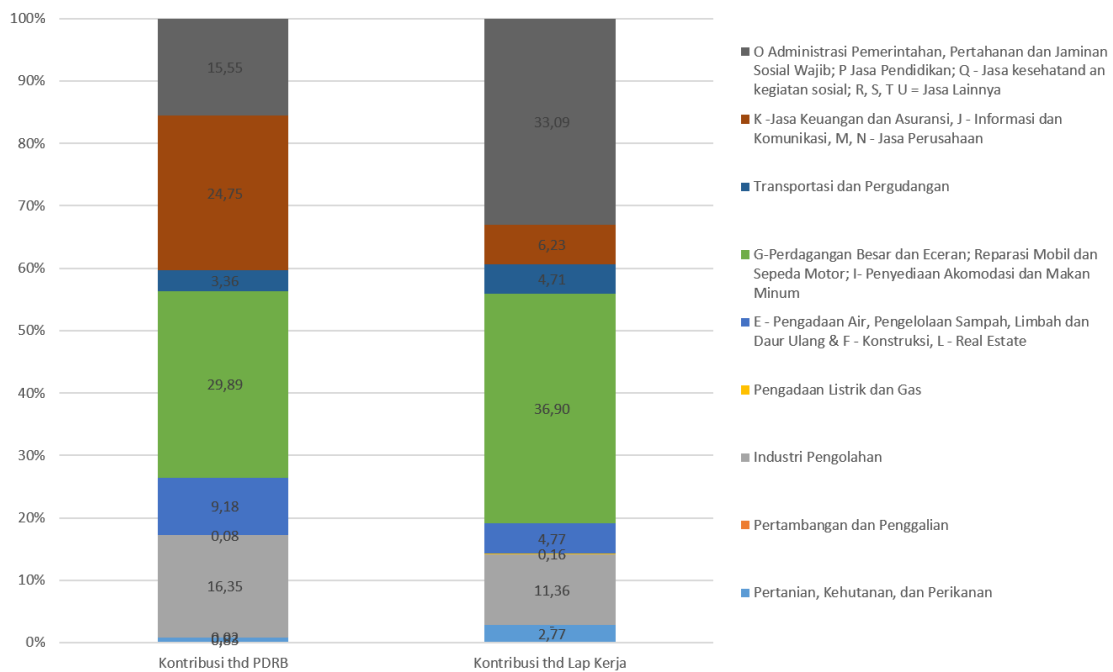


Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Gambar 3.4 Struktur Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Umur, 2017

Di Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun merupakan kota dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang tergolong rendah. UMK Kota Madiun di tahun 2019 adalah Rp. 1.801.406, yang sama nilainya dengan 6 (enam) kabupaten/kota lainnya, yaitu Kab. Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Blitar, Sumenep dan Kota Blitar. Nilai tersebut merupakan urutan kedua terendah, setelah 9 (Sembilan) kab/kota dengan UMK terendah sebesar Rp. 1.763.267, yaitu Kab Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan. Hal ini berarti, di satu sisi bagi investor, Kota Madiun merupakan kota yang menawarkan biaya yang murah untuk berusaha, namun bagi karyawan, Kota Madiun mungkin merupakan kota yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dunia modern. Tingkat upah minimum Kota Madiun di tahun 2019 adalah Rp. 3.871.052. Analisis berikut menyandingkan sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan di Kota Madiun, untuk melihat seberapa jauh sektor ekonomi saat ini dapat memberikan kesempatan pekerjaan bagi warga Kota Madiun.

Kontribusi Sektor terhadap Ekonomi & Lapangan Kerja di Madiun, tahun 2017



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Gambar 3.5 Kontribusi Sektor Terhadap Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan di Kota Madiun, 2017

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa sektor pencipta lapangan kerja terbanyak adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta penyediaan akomodasi dan makan minum (36,90%), diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan dan jasa sosial lainnya (33,09%), dan industri pengolahan (11,36%). Meskipun sektor administrasi pemerintahan menciptakan lapangan pekerjaan, namun sektor ini bukanlah termasuk dalam sektor riil. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa sektor sekunder yaitu industri pengolahan merupakan sektor pencipta lapangan kerja utama di Kota Madiun, diikuti oleh sektor tersier yaitu jasa perdagangan. Selanjutnya, perbandingan antara kontribusi sektor terhadap ekonomi dan tenaga kerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh produktivitas ekonomi sektor tersebut. Sektor industri pengolahan memiliki rasio 1,44 (16,35% kontribusi ekonomi berbanding 11,44% kontribusi tenaga kerja). Hal ini berarti, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang produktif, karena menghasilkan nilai tambah hampir 50% dari tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Sedangkan sektor industri perdagangan masih memiliki rasio 0,81 yang menunjukkan bahwa sektor ini masih berusaha meraih nilai ekonomi yang lebih baik untuk para pekerjanya.

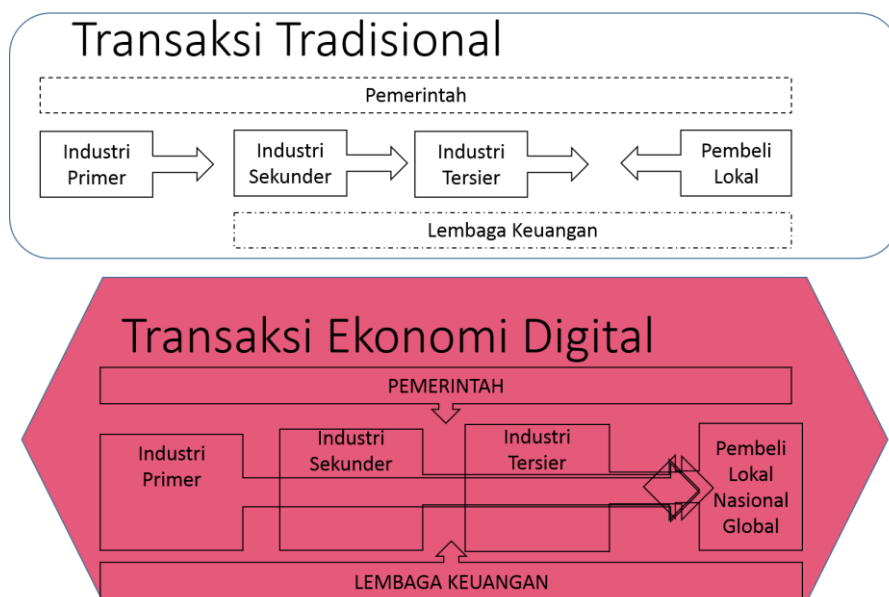
Dengan karakter wilayah Madiun yang berbasis pertanian, industri pengolahan hasil makanan merupakan unggulan Kota Madiun, seperti sambel pecel dan industri pendukung lainnya (krupuk puli), sedangkan di sektor perdagangan, secara geografis Madiun merupakan wilayah yang berada di jalur utama menuju Surabaya/Solo, dan jalur kereta api. Sejarah mencatat bahwa kota Madiun merupakan sentral dari Karisidenan Madiun, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo. Kota Madiun berperan sebagai lokomotif ke-6 daerah ini. Meskipun saat ini sudah tidak ada lagi karisidenan, namun hubungan ekonomi antar kota Madiun masih terus berjalan, karena daerah-daerah penyangga ini merupakan sentra industri primer (pertanian/perkebunan/perikanan) yang mendukung sektor industri pengolahan dan perdagangan di Kota Madiun.

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pengolahan pangan, merupakan sektor kunci yang sudah terbangun ekosistemnya, dan merupakan sektor unggulan Kota Madiun. **Sambel Pecel** merupakan produk unggulan dari sektor olahan pangan ini. Menimbang bahwa sambel pecel bisa dilakukan oleh berbagai jenis skala industri, mulai dari mikro hingga menengah, maka ideal jika menjadikan sambel Pecel sebagai icon produk utama Kota Madiun.

Pecel yang identik dengan makanan rakyat, perlu diperkenalkan lebih intensif kepada para anak muda, sebagai generasi penerus ekonomi Madiun dan daerah sekitarnya. Perlu suatu terobosan sehingga para generasi muda bangga akan produk lokal, dan tertarik untuk mengembangkannya. Mengambil contoh daerah-daerah lain di Jawa Timur seperti Malang, Batu, Banyuwangi, Surabaya, maka icon ekonomi pun perlu di bangun. **“PecelLand”** merupakan icon yang berasosiasi dengan modernisasi pecel, tanpa meninggalkan ke-tradisional-annya.

Sub Dimensi Transaksi (Transaction)

Kegiatan ekonomi dikatakan berhasil jika terjadi transaksi di dalamnya. Dimensi transaksi dalam *Smart Economy* ditujukan untuk membangun ekosistem transaksi keuangan yang cerdas, yaitu yang menjamin kemudahan bertransaksi, melalui transaksi digital yang less cash (mengurangi transaksi tunai), dengan didukung oleh usaha-usaha yang melek keuangan (*financial literate*) dalam suatu ekosistem keuangan yang terpadu. Transaksi digital dapat mempermudah usaha mikro - kecil - menengah dan besar dalam mengakses pasar yang lebih luas, mendekatkan hubungan antara pemasok dan pembeli dan menawarkan efisiensi dalam rantai nilai sehingga dapat berdaya saing. Peran lembaga keuangan dan pemerintah dapat lebih optimal, seperti terlihat di Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Transaksi Ekonomi Tradisional vs Transaksi Ekonomi Digital

Kegiatan ekonomi digital dapat terjadi jika:

- a) Pengusaha sudah melek teknologi digital
- b) Tersedia infrastruktur teknologi digital meliputi infrastruktur komunikasi maupun platform untuk melakukan transaksi digital

Terdapat 3 jenis digitalisasi ekonomi yaitu:

- a) **Digitalisasi pasar** – meraih pembeli dengan cara digital, seperti dengan berjualan online, melalui pasar digital yang ada, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, aplikasi Gojek, aplikasi Grab maupun pasar yang dikelola sendiri seperti website, instagram maupun facebook perusahaan.
- b) **Digitalisasi sistem pembayaran** – memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran non tunai, seperti menyediakan pembayaran melalui transfer bank baik rekening sendiri maupun rekening virtual, melalui uang digital (seperti Go-Pay, Ovo, Link Aja) atau pembayaran melalui kartu kredit dan kartu e-money lainnya.
- c) **Digitalisasi pengelolaan keuangan** – memudahkan pengusaha dalam mengelola usahanya melalui pencatatan keuangan, pelaporan dan analisa keuangan digital, seperti dengan menggunakan aplikasi Zahir Simply – sistem akuntansi keuangan yang berbasis cloud yang mudah dilakukan dan terjangkau bagi pengusaha.

Digitalisasi pengelolaan keuangan akan membantu lembaga di luar rantai nilai, seperti pemerintah dan lembaga keuangan, untuk dapat memberikan dukungan optimal terhadap para pelaku ekonomi, karena mereka akan dapat melihat laporan keuangan yang transparan, serta menilai kinerja perusahaan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti insentif pinjaman usaha, pengurangan pajak, dan sebagainya.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat dinamis, dipenuhi oleh anak – anak muda yang sangat terbuka untuk maju dan ketersediaan lembaga keuangan yang merespon kebutuhan pasar dan memperkenalkan teknologi digital dalam transaksi keuangan. Pada sektor perdagangan, sudah terlihat transaksi Go-Jek, Grab yang dijalankan dengan menggunakan pembayaran digital. Di satu sisi, digitalisasi ekonomi ini membuka peluang pasar dan pekerjaan, namun di sisi lain, digitalisasi ekonomi ini juga menyebabkan kesenjangan antara pelaku di pasar. Untuk tetap menjaga ekonomi yang sehat, perlu dibuat suatu strategi agar *Smart Economy* dapat memenuhi ketiga dimensinya seperti didiskusikan diatas.

3.3.1 Analisis Strategi *Smart Economy*

Telaah SWOT dilakukan sebagai upaya untuk memahami kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), kesempatan (Opportunities) dan tantangan (Threats) dari sektor ekonomi unggulan Madiun, yaitu sektor industri pengolahan khususnya di rantai nilai sambel pecel, dan industri perdagangan, yaitu restoran dan rumah makan, maupun toko oleh-oleh yang membantu akses pasar industri pengolahan.

Penyusunan strategi pada dimensi *Smart Economy* akan diuraikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Matrik SWOT Smart Economy

TOWS MATRIX - SMART ECONOMY KOTA MADIUN 2019	Strength			Weakness		
	Industri	Kesejahteraan Masyarakat	Transaksi Keuangan	Industri	Kesejahteraan Masyarakat	Transaksi Keuangan
	KI.1 Banyaknya IKM (1000an) --> industri sekunder KI.2 Banyak petani (peternakan, perikanan) --> industri primer KI.3 Adanya perda yang mengatur pasar modern KI.4 Ikon makanan khas Sambel Pecel	KK.1 Banyak pelatihan peningkatan ketrampilan usaha KK.2 Insentif pajak untuk wajib pajak baru (3 bulan bebas pajak) KK.3 Prioritas pencari kerja diutamakan	KT.1 Fasilitas rekomendasi pendanaan ke bank daerah	KM.1 Kemampuan pelaku industri sekunder terbatas KM.2 Ketersediaan lahan industri primer terbatas KM.3 Area pemasaran industri terbatas KM.4 Belum optimalnya tingkat daya saing produk (belum terstandarisasi) KM.5 Pelaku usaha belum terpusat (karena berawal dari	KS.1 Pola pikir bersaing pelaku usaha kurang (termasuk kesadaran pajak, legalitas, varian produk, kualitas/standarisasi, packaging)	KR.1 Belum siapnya daerah untuk menyediakan sistem yang mempermudah pembayaran pajak (misal: tersedia kode bayar untuk pembayaran pajak) KR.2 Ketergantungan pada petugas pungut pajak maupun retribusi masih tinggi KR.3 Budaya cashless masih rendah

				<p>industri rumah tangga) KM.6 Belum adanya sentralisasi pelaku industri informal (misal: pusat PKL) KM.7 Kesulitan membuat sentra karena pelaku usaha sejenis menyebar di beberapa lokasi KM.8 Belum tegasnya penegakan Perda bagi pelaku industri KM.9 Bahan baku berkualitas tidak tersedia (bergantung daerah lain) KM.10 Karakter produk belum kuat (Misal: Sambel Pecel)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Opportunity	Industri	PI.1 Pusat wilayah pengembangan Jawa Timur Bagian Barat PI.2 Sebagai kota transit perdagangan daerah sekitar				Mengembangkan Hub Industri Unggulan [KM.3 - PI.1]		
	Kesejahteraan Masyarakat	PK.1. Banyaknya wisatawan pendatang	Mengintegrasikan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) dengan membuat destinasi baru Peceland [KI.4 - PK.1]			Menguatkan Karakter Sambel Pecel Khas Madiun [KM.10 - PK.1]		
	Transaksi Keuangan	PT.1 Berkembangnya Fintech			Mengembangkan Sistem Punishment-Reward (pengurangan pajak, kemudahan izin, dsb.) bagi pelaku usaha yang menyediakan transaksi cashless [KK.2, PT.1]			Meningkatkan Kerjasama dengan penyedia transaksi elektronik [KR.3 - PT.1]
Threats	Industri	AI.1 Kualitas packaging produk kompetitor luar daerah bervariasi dan menarik AI.2 Banyak jenis produk	Meningkatkan Daya Saing Produk [KI.1 - AI.1]	Memberdayakan SDM Usia Produktif di sektor ekonomi kreatif [KK.1, KK.3 - AI.3]	Meningkatkan Kemampuan Mengelola Transaksi Elektronik bagi pelaku usaha [KT.1 - AI.1]			

		yang sama AI.3 Tenaga kerja industri terampil dari luar wilayah						
	Kesejahteraan Masyarakat	AK.1.SDM berpindah keluar dari Madiun karena kurang tersedianya pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat dan keahlian						
	Transaksi Keuangan	AT.1. Belum banyak dan meratanya usaha di Madiun yang menggunakan pembayaran cashless AT2. Belum banyak dan meratanya usaha yang mencatatata keuangan secara digital						

3.3.2 Strategi *Smart Economy*

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Economy* seperti dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Strategi *Smart Economy*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (<i>industry</i>)				
IN01	E1. Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai	% peningkatan index pendapatan daerah dari sektor industri #industri pengolahan pangan #perusahaan perdagangan hasil olahan pangan	E1S1. Mengintegrasikan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) dengan membuat destinasi baru PeceLand E1S2. Menguatkan Karakter Sambel Pecel Khas Madiun E1S3. Meningkatkan Daya Saing Produk E1S4. Mengembangkan Hub Industri Unggulan	Misi 3 Ekosistem industri yang berdaya saing

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare</i>)				
WF01	E2. Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (income)	indeks kesejahteraan masyarakat # rumah tangga menjadi pemasok industri bumbu pecel # anak muda (usia 15-24 tahun) memulai wirausaha olahan pangan	E2S1. Memberdayakan SDM Usia Produktif di sektor ekonomi kreatif	Misi 3 Ekosistem industri yang berdaya saing
Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)				
TR01	E3. Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash dengan didukung oleh usaha-usaha yang melek keuangan (financial literate) dalam suatu ekosistem keuangan yang terpadu	Rerata Pendapatan Asli Daerah (PAD) # Usaha menerapkan sistem akuntansi digital # Usaha memiliki sistem pembayaran digital	E3S1. Meningkatkan Kemampuan Mengelola Transaksi Elektronik bagi pelaku usaha E3S2. Mengembangkan Sistem Punishment-Reward (pengurangan pajak, kemudahan ijin, dsb.) bagi pelaku usaha yang menyediakan transaksi cashless E3S3. Meningkatkan Kerjasama dengan penyedia transaksi elektronik	Misi 3 Ekosistem industri yang berdaya saing

3.4 Smart Living

Tujuan yang disusun pada *Smart Living* adalah Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, aman, nyaman, dan efisien.

3.4.1 Analisis Strategi *Smart Living*

Smart Living menggunakan solusi cerdas untuk mengoptimalkan infrastruktur dan pemerintahan yang cerdas dan responsif untuk melibatkan warga dalam pengelolaan kota mereka. Sistem sensor, jaringan, dan aplikasi mengumpulkan data yang berguna, seperti kemacetan lalu lintas, penggunaan energi, dan tingkat CO2. Data ini digunakan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan kota, termasuk transportasi, bangunan, utilitas, lingkungan, infrastruktur, dan layanan publik. Secara garis besar, sasaran dalam mencapai *Smart Living* terlihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Sasaran Dalam Mencapai *Smart Living*

Pada tingkat strategis, kota harus dapat mencapai keseimbangan antara ketiga tujuan, yaitu *harmony*, *health*, dan *mobility*. Pencapaian ketiga tujuan ini hanya bisa diwujudkan apabila ada integrasi antara Master Plan dan rencana Pembangunan yang didukung oleh Pemerintah Kota yang dinamis dan adaptif. Ketiga tujuan dapat tercapai apabila ada sinergi diantara sasaran sasaran program, yaitu peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan system keselamatan dan keamanan.

Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Pada bagian peningkatan kesehatan, ada tiga komponen utama yang terintegrasi mendukung tercapainya kehidupan yang harmony, yaitu perumahan dan rumah, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan. Perumahan merupakan zona khusus tempat tinggal di mana lokasi perumahan menentukan jarak perjalanan ke lokasi kerja maupun sekolah. Jarak yang jauh mengakibatkan kelelahan dan kemungkinan terpapar emisi kendaraan akan menurunkan daya tahan masyarakat terhadap penyakit. Rumah, desain rumah yang sehat diperlukan untuk menjamin adanya pertukaran udara. Disain rumah yang difasilitasi dengan cahaya dan sirkulasi udara akan menghemat listrik dan mengurangi penggunaan AC.

Pemeliharaan kesehatan merupakan fasilitas penunjang pemeliharaan kesehatan masyarakat. Lokasi puskesmas atau rumah sakit yang tidak jauh dari lingkungan perumahan akan dapat menyegerakan pelayanan kesehatan. Fasilitas pendaftaran online memungkinkan pasien tidak perlu menunggu lama di puskesmas. Pelayanan pengantaran obat juga memungkinkan pasien untuk segera pulang setelah pengurusan resep obat. Poin terakhir adalah pendidikan. Pendidikan menjadi bagian dari Peningkatan Kesehatan (*Health*) terbagi menjadi dua hal, yaitu kualitas masyarakat terdidik meningkat sehingga mampu menjaga kesehatan diri dan keluarganya; sedangkan hal lainnya adalah terkait lokasi sekolah. Lokasi sekolah yang jauh memungkinkan siswa di bawah umur membawa kendaraan sendiri ke sekolah sehingga rawan terjadi kecelakaan. Disamping itu lokasi sekolah yang jauh akan menyebabkan siswa lelah di perjalanan sehingga minat belajarnya turun.

Infrastruktur

Infrastruktur yang perlu disiapkan adalah infrastruktur untuk utilitas, transportasi dan bangunan gedung maupun bangunan lain seperti jembatan, terowongan, dam dan bangunan fisik lainnya. Infrastruktur Utilitas harus menjamin efisiensi dan responsive terhadap kebutuhan pengembangan maupun pemeliharaan. Infrastruktur utilitas ini meliputi infrastruktur air bersih, lampu LED yang responsive terhadap matahari dan cuaca, dan utilitas listrik dan penggunaannya. Pada utilitas air bersih, kualitas air harus secara rutin dapat di monitor, adanya sensor kebocoran maupun aplikasi pelayanan utilitas harus responsive. Pengelolaan limbah air kotor yang arahnya *zero waste* juga disiapkan.

Lampu LED untuk PJU juga harus secara smart diketahui jadwal pemeliharannya dan tingkat responsivenya terhadap perubahan cahaya, sehingga dapat otomatis menyala apabila diperlukan. *Smart Grid* menganalisa konsumsi energy dan menyalurkan kebutuhan listrik secara efisien. Infrastruktur transportasi meliputi *smart parking meter*, sensor kemacetan, aplikasi pelaporan kerusakan jalan, jalur khusus pejalan kaki, pesepeda, transportasi umum, info rute dan jadwal transportasi umum, kondisi drainase jalan untuk pencegah banjir dan kerusakan jalan. Bangunan dalam kota harus memiliki fungsi sebagai *green building* di mana *smart* penggunaan energinya, material yang digunakan adalah material ramah lingkungan, dan dilengkapi *smart utility*. Ada detector dan pemadam kebakaran yang berfungsi secara *smart*, terdapat sensor polusi udara dan monitor perkiraan cuaca yang ditempatkan di atap gedung sehingga berfungsi untuk kota secara keseluruhan. Gedung juga dilengkapi dengan detector sampah maksimum sehingga meminimalkan pergerakan truk sampah dalam mengangkut sampah dari gedung ke gedung lain. Terdapat detector gempa serta sensor kualitas bangunan akibat adanya getaran yang ditimbulkan gempa.

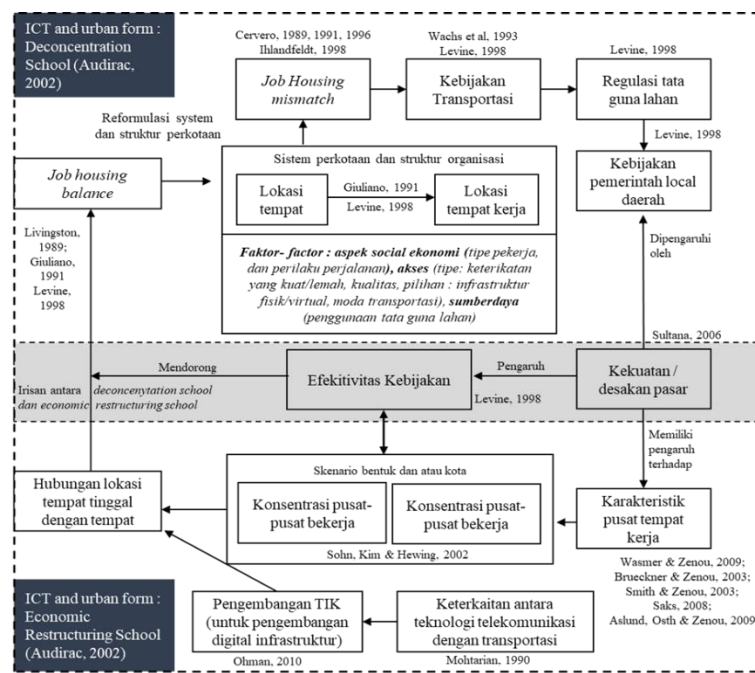
Keselamatan dan Keamanan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu ditunjang dengan rasa aman terhadap gangguan kejahatan maupun kemungkinan kecelakaan di jalan. Untuk itu perlu ada *emergency camera*, *facial recognition camera*, dan *wearable detection*. *Emergency camera* memungkinkan untuk penolong dapat menganalisa keparahan kondisi darurat yang ada dan menemukan rute terpendek untuk mencapai lokasi darurat. *Facial recognition camera* membantu untuk mengurangi kejahatan karena adanya kemudahan dalam mengenali pelaku kejahatan. *Wearable detection* akan mendeteksi keberadaan *smartphones* menyediakan *wifi*, dan memungkinkan masyarakat atau pengunjung berkomunikasi dengan kota terkait event maupun fasilitas lain.

Strategi dalam persiapan Kota Madiun kearah *Smart City* perlu dimulai dengan pendataan kondisi eksisting terkait ketersediaan data, keakurasian data dan kecukupan data untuk digunakan dalam analisis SWOT.

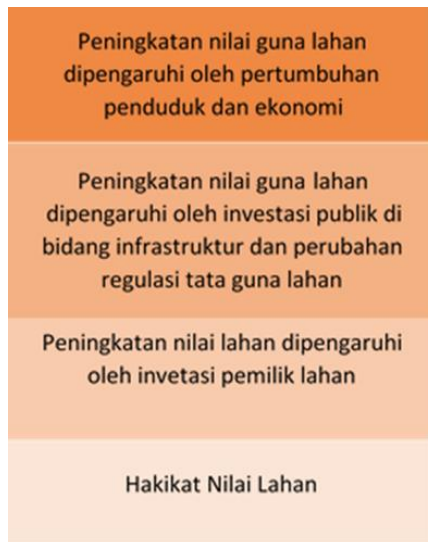
Kesehatan

Sebagaimana telah disampaikan dalam sasaran, bahwa salah satu factor untuk hidup secara sehat adalah lokasi perumahan dan bagaimana pengaturan tata guna lahan akan berpengaruh pada mobilisasi masyarakat. Dalam hal ini pengaturan tata guna lahan harus mempertimbangkan hal tersebut, termasuk aturan RTH. Penataan ini perlu keterlibatan Pemerintah Kota secara aktif. Secara garis besar hubungan antara perkembangan kota secara geografis dan aksesibilitasnya disajikan pada gambar berikut.



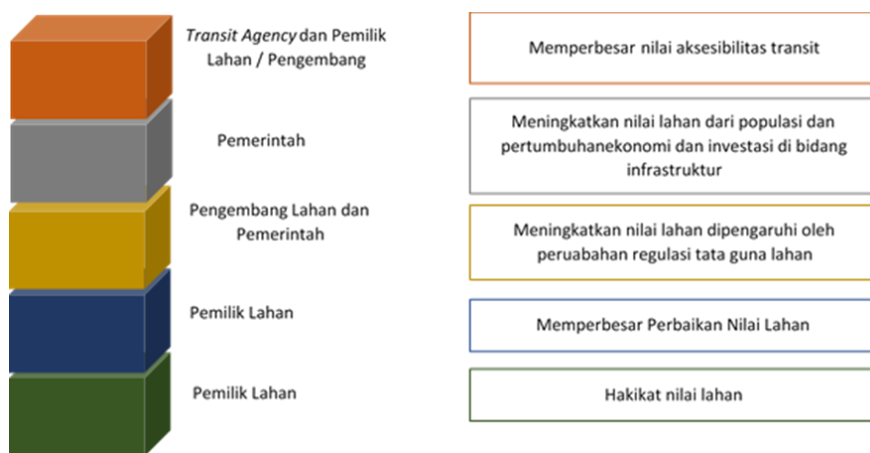
Gambar 0.8 Hubungan Antara Perkembangan Kota Secara Geografis dan Aksesibilitas (Sumber: Sutriadi, 2015)

Dalam kaitannya dengan pengaturan lahan, perlu dilihat nilai suatu lahan. Hal ini dimaksudkan agar peruntukan lahan tidak salah dan menjadi beban pemilik atau pemerintah dalam hal memelihara asset. Pemanfaatan asset lahan, dikenal dengan *land value capture*. LV ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang juga merupakan pengembangan lahan untuk suatu yang bernilai lebih.



Gambar 3.9 Land Value Capture (Sumber: Lubis, 2018)

Peningkatan nilai guna lahan merupakan bagian dari pengembangan kota. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah pengadaan **Pecel-Land**. Nilai lahan di sekitar area tersebut otomatis akan meningkat. Perubahan fungsi dan nilai lahan ini yang perlu dikontrol oleh pemerintah dengan Smart untuk menghindari permasalahan kemacetan karena perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan juga harus memperhatikan lokasi sekolah, perkantoran dan pusat kegiatan lainnya untuk menjaga agar infrastruktur transportasi tidak terganggu aksesibilitasnya.



Gambar 3.10 Pengontrolan Fungsi Lahan (Sumber: Lubis, 2018)

Daftar Sekolah

Berdasarkan data dari website Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (diakses pada tanggal 30 September 2019), tercatat bahwa pada semester ganjil 2019/2020 total bangunan sekolah di Madiun adalah 145, yang terdiri dari 82 sekolah negeri dan 63 sekolah swasta. Dibandingkan dengan data pada semester ganjil 2016/2017, Kota Madiun menambah 5 sekolah yang sudah memiliki NPSN. Sementara jumlah perguruan tinggi di Kota Madiun adalah 23. Berikut adalah data jumlah sekolah, daftar nama sekolah pada semester ganjil 2019/2020, dan daftar nama perguruan tinggi di Kota Madiun :

Tabel 0.7. Jumlah Sekolah di Kota Madiun pada Semester Ganjil 2019/2020

No	Wilayah	Total			SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Taman	55	33	22	26	19	7	9	6	3	4	4	0	11	3	8	5	1	4
2	Manguharjo	50	29	21	22	19	3	11	7	4	3	2	1	12	1	11	2	0	2
3	Kartoharjo	40	20	20	24	18	6	3	1	2	5	0	5	7	1	6	1	0	1
Total	Total	145	82	63	72	56	16	23	14	9	12	6	6	30	5	25	8	1	7

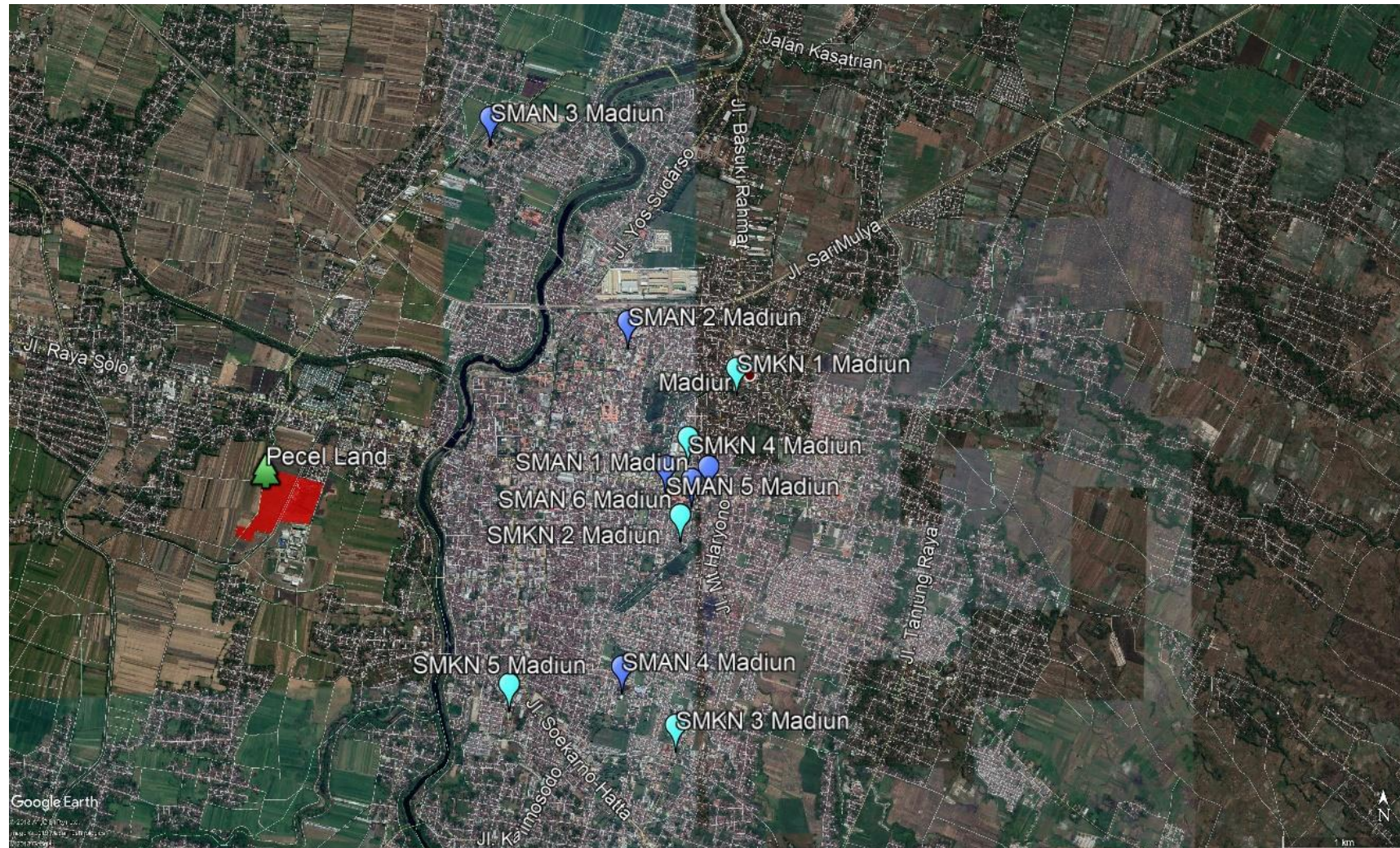
Sumber : <http://dapo.dikdasmn.kemdikbud.go.id/sp/2/056200>

Keterangan :

N : Sekolah Negeri

S : Sekolah Swasta

Dibawah ini merupakan peta akses menuju SMA dan SMK yang ada di Kota Madiun.



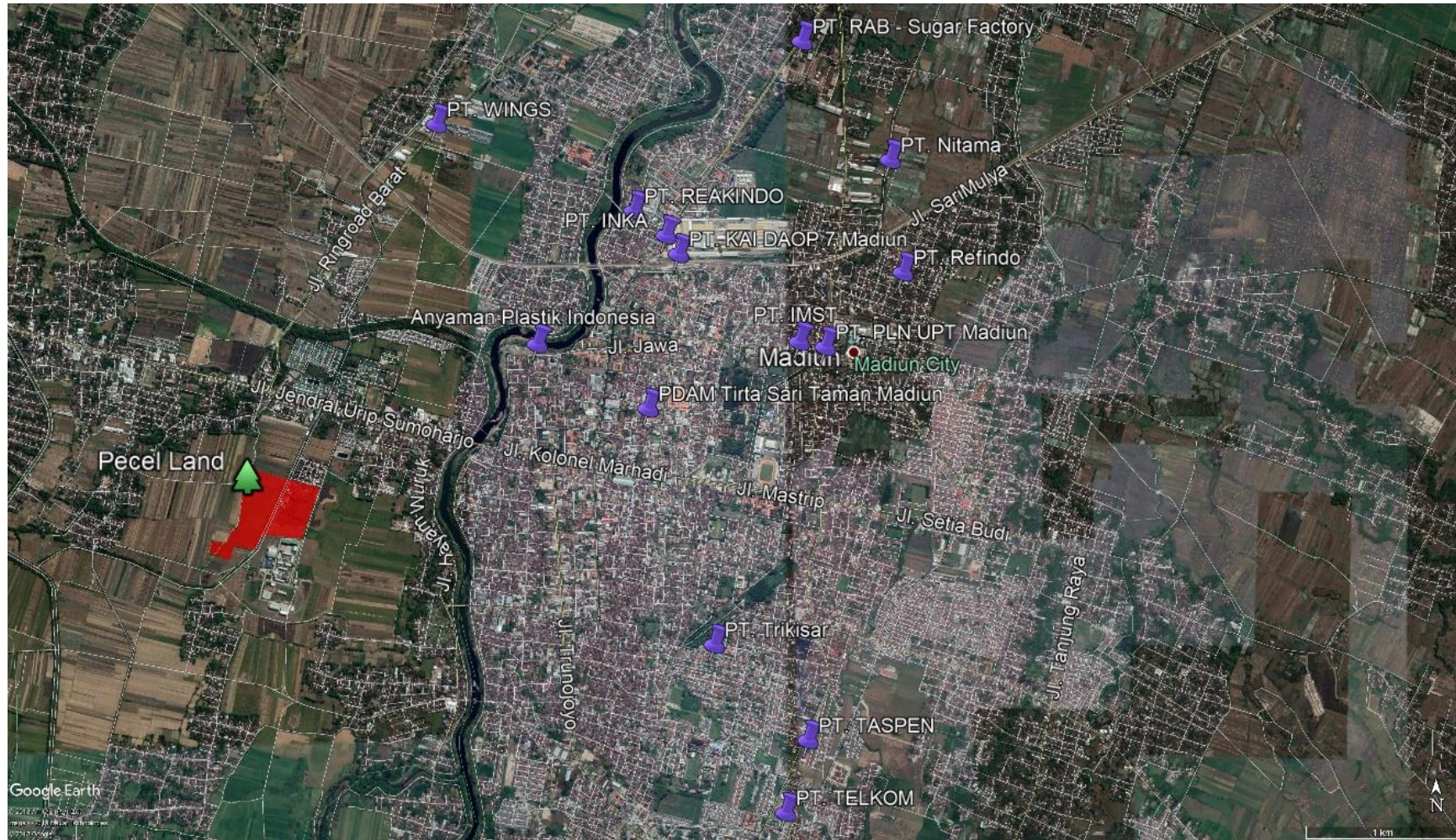
Gambar 3.11 Akses Menuju SMA dan SMK di Kota Madiun

Daftar Industri dan Kantor

Mengutip dari website www.madiunkota.go.id , terdapat 59 kantor OPD di Kota Madiun. Mulai dari kantor Dinas hingga kantor Kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Madiun. Untuk sektor industri, Kota Madiun merupakan salah satu yang berperan besar di dalam industri kereta api. PT. Industri Kereta Api merupakan salah satu perusahaan yang berada di Kota Madiun yang menjadi produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Selain dioperasikan di Indonesia, produk dari PT INKA telah menyebar dan beroperasi di beberapa negara, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia. Selain PT INKA juga banyak perusahaan lain yang bertempat di Kota Madiun. Berikut adalah daftar nama Industri dan Kantor yang berada di wilayah administratif Kota Madiun.



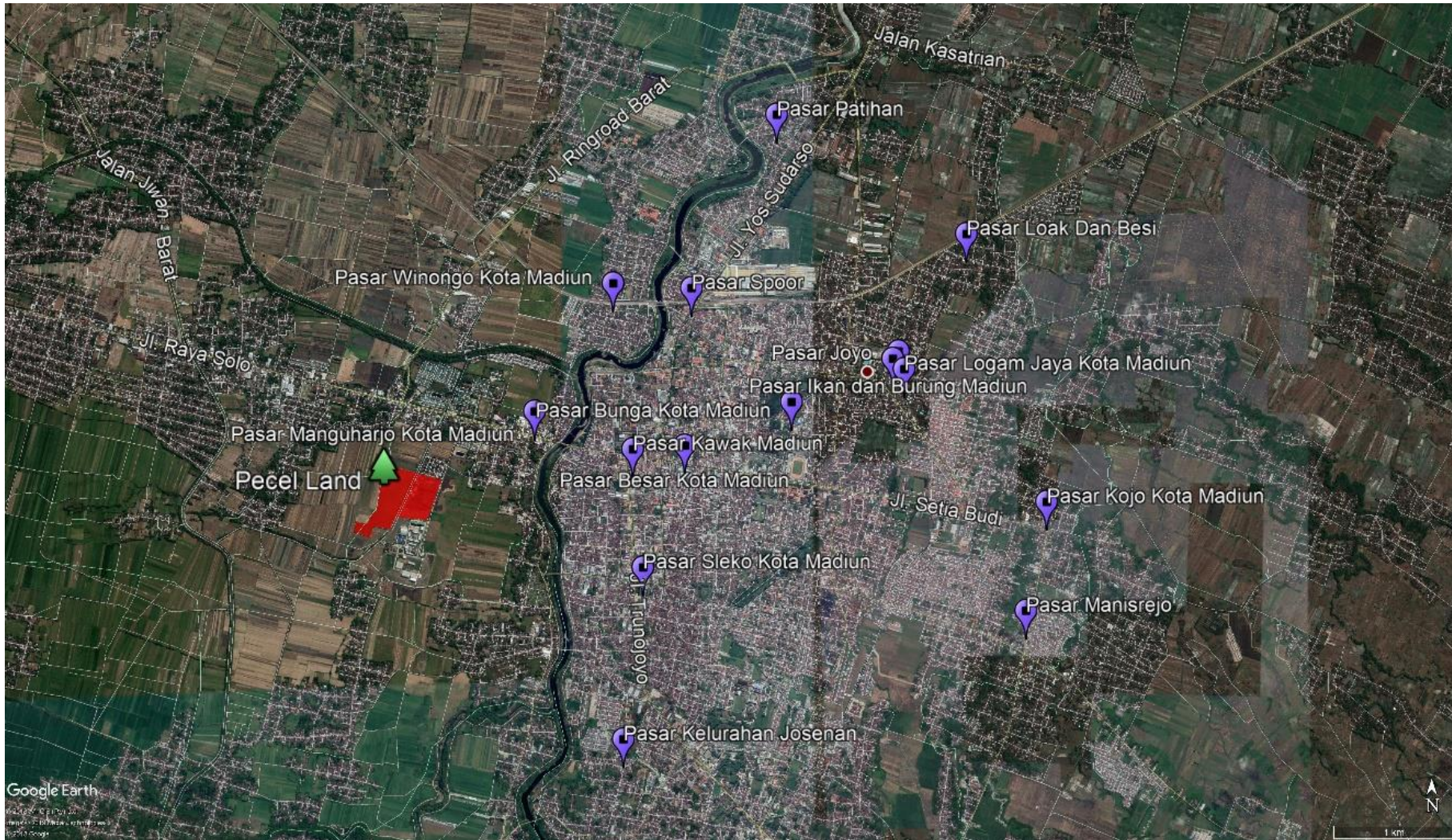
Gambar 3.12 Akses Menuju Kantor OPD Kota Madiun



Gambar 3.13 Akses Menuju Beberapa Industri di Kota Madiun

Daftar Pasar / Pusat Perbelanjaan (Mall)

Berdasarkan data pasar/pusat perbelanjaan yang ada di Kota Madiun, dipetakan berdasarkan akses menuju lokasinya seperti dibawah ini.



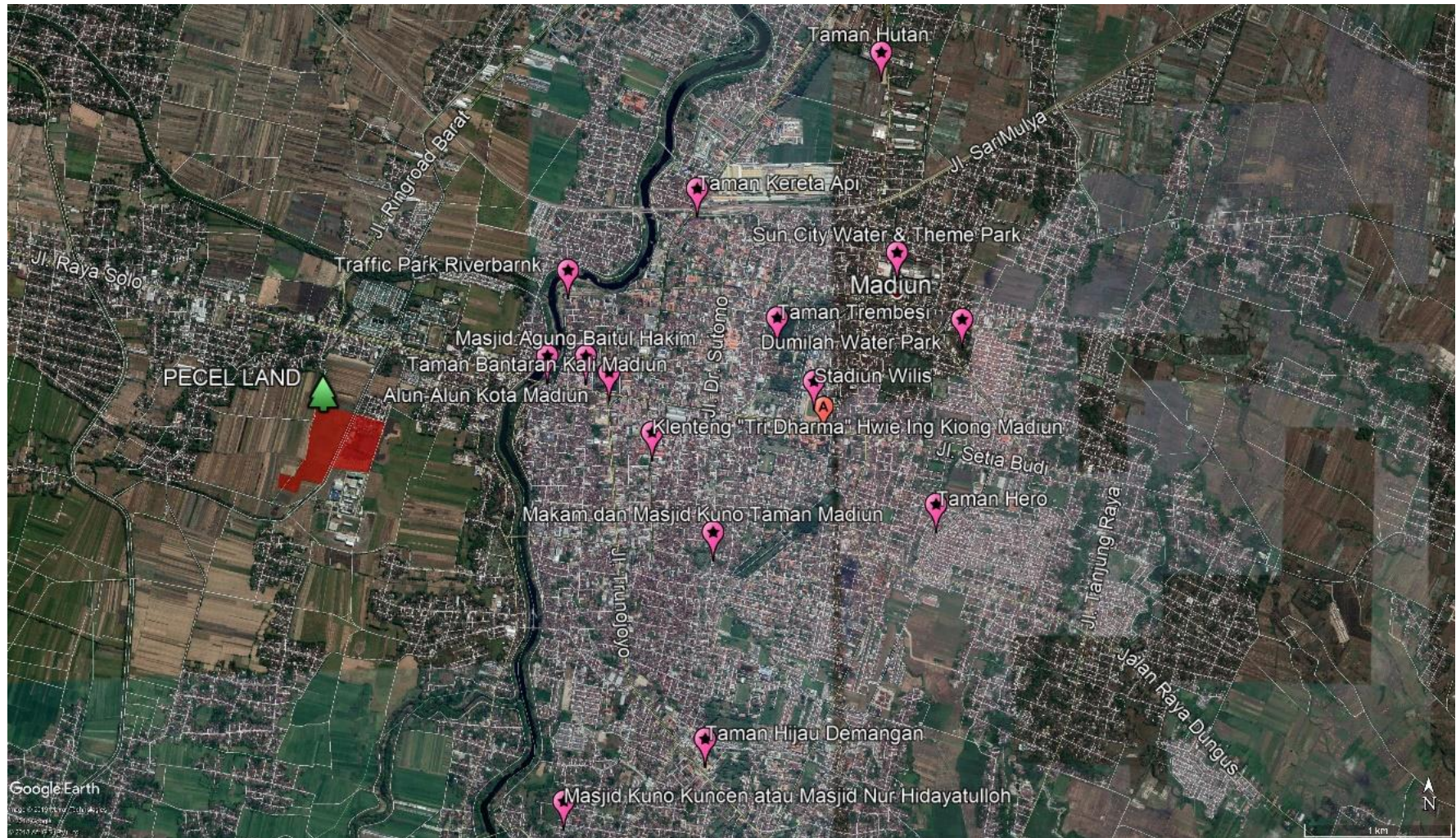
Gambar 3.14 Akses Menuju Pasar di Kota Madiun



Gambar 3.15 Akses Menuju Pusat Perbelanjaan atau Plaza di Kota Madiun

Daftar Pariwisata

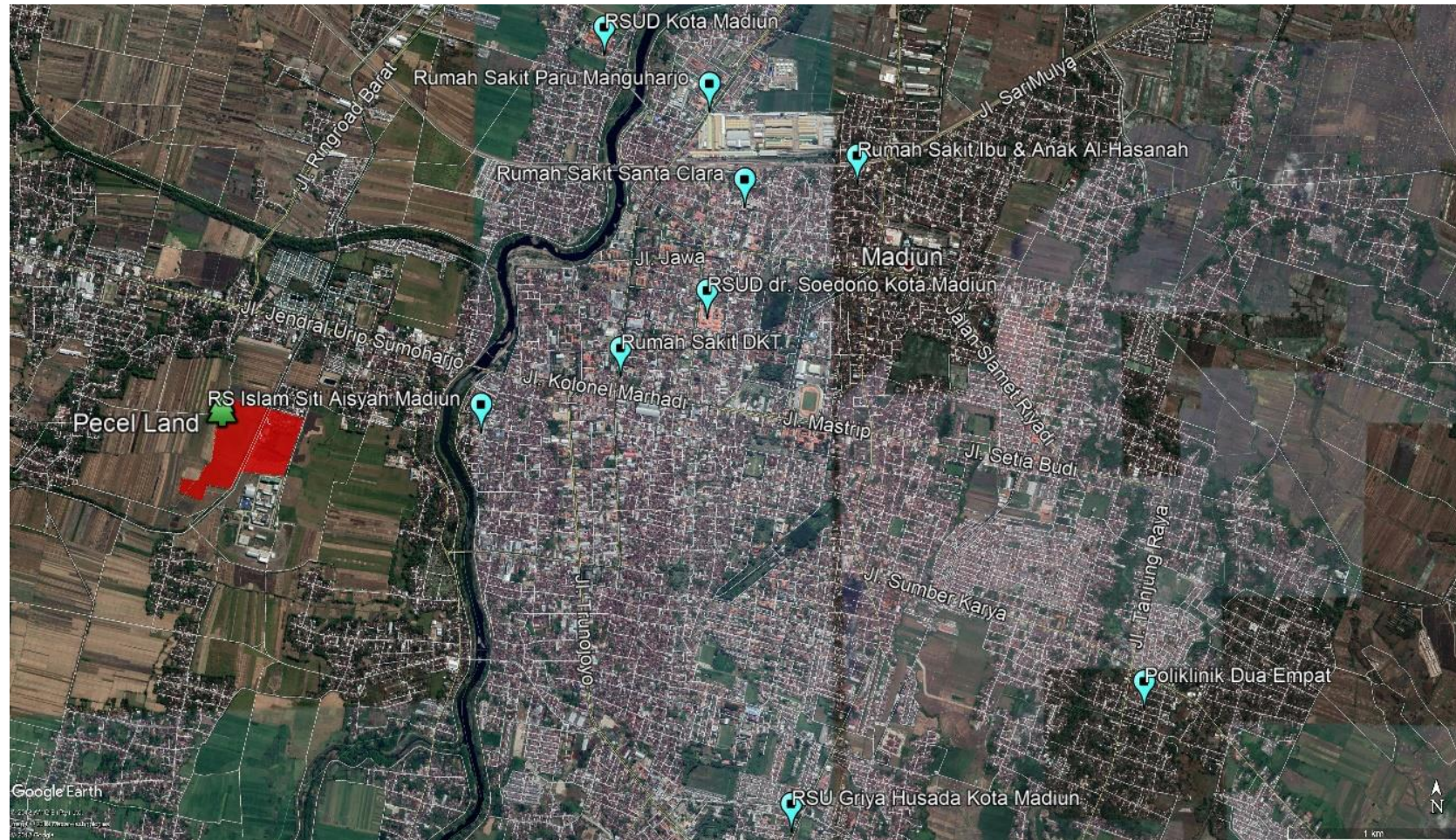
Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dalam suatu kota merupakan salah satu langkah untuk penghijauan kota dan menekan pemanasan global. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Beberapa taman di Kota Madiun juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Pemerintah juga sudah menyediakan prasarana yang baik, seperti misalnya tempat duduk dan penerangan yang cukup. Pada tahun 2019 pemerintah Kota Madiun akan membangun tujuh RTH untuk menyusul taman-taman yang sudah ada sebelumnya. Selain taman, wisata di Kota Madiun juga terdapat *water park* dan tempat bersejarah seperti masjid kuno. Berikut adalah daftar pariwisata di Kota Madiun :



Gambar 3.16 Akses Menuju Pariwisata di Kota Madiun

Daftar Rumah Sakit

Berikut ini merupakan peta daftar rumah sakit dan aksesnya.



Gambar 3.17 Akses Menuju Rumah Sakit di Kota Madiun

Data Demografi

Mengutip dari publikasi berjudul Data Demografi, Ekonomi, dan Sosial Budaya Kota Madiun tahun 2017 (https://madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2017/12/5-DATA-DEMOGRAFI-fix_Q.pdf) , tingkat kepadatan penduduk menghasilkan rata-rata jumlah penduduk per km². Makin besar jumlah penduduk pada setiap km² yang bertempat tinggal di suatu daerah maka semakin padat penduduknya. Kepadatan penduduk Kota Madiun tahun 2016 sebesar 6.321 jiwa/Km² , yang artinya setiap 1 Km² di Kota Madiun dihuni oleh sekitar 6.321 jiwa. Kepadatan penduduk tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 6.267 jiwa/Km².

Tabel 3.8 Jumlah penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Manguharjo	30.772	29.598	62.877
Taman	43.528	45.485	89.013
Kartoharjo	8.549	29.598	58.147
Jumlah	102.849	107.188	210.037

(sumber : Data Demografi, Ekonomi, dan Sosial Budaya Kota Madiun tahun 2017)

Berikut adalah data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun.

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Kota Madiun pada Tahun 2018

Kecamatan	Luas (km ²)	SP2010	SP2010	2018
Kartoharjo	10,73	48.906	49.008	50.945
Manguharjo	10,04	49.391	49.463	48.540
Taman	12,46	72.667	72.834	77.212
Jumlah	33,23	170.964	171.305	176.697

(sumber : Kota Madiun Dalam Angka 2019)

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Agama yang Dianut 2018

Kecamatan	Kartoharj	Manguharjo	Taman	Total
Islam	53.293	53.716	80.383	187.392
Protestan	2.828	3.807	5.426	12.061
Katolik	1.670	1.981	2.724	6.375
Hindu	54	93	86	233
Budha	75	200	422	697
Lainnya	7	4	28	39
Jumlah	57.927	59.801	89.069	206.797
Luas km ²	10,73	10,04	12,46	33,23
Kepadatan	5.399	5.956	7.148	6.223

(sumber: Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Mangu Harjo, dan Kecamatan Taman Dalam Angka 2019)

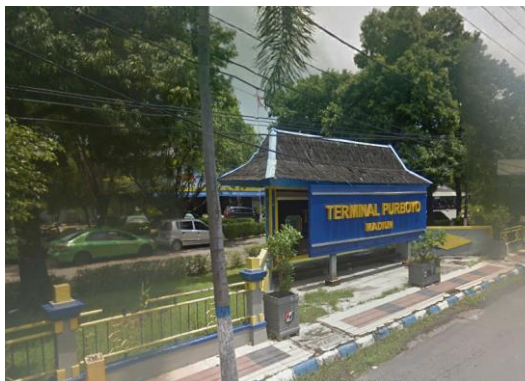
Jumlah penduduk dan pertumbuhannya penting untuk mengukur mobility ke masa depan untuk mempersiapkan pengembangan selanjutnya. Dari data demografi juga akan terlihat tingkat pendidikan masyarakat kota sehingga dapat dilakukan pendekatan yang sesuai untuk partisipasi dalam program *Smart City*.

Lokasi Terminal dan Stasiun

Menurut data dari Dinas Perhubungan di Kota Madiun, sarana transportasi di Kota Madiun sudah cukup memadai. Terdapat terminal bus di Kota Madiun, bernama Terminal Purbaya. Di Kota Madiun juga dilengkapi dengan dua sub terminal, masing-masing adalah Sub Terminal Manis Rejo dan Sub Terminal Mayjen Sungkono. Selain itu, juga terdapat Stasiun Kereta Madiun (MN) yang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A dan terbesar yang berada di dalam pengelolaan PT KAI DAOP VII Madiun. Berikut adalah lokasi dari masing-masing terminal dan stasiun di Kota Madiun :

Tabel 3.11 Daftar Terminal dan Stasiun di Kota Madiun

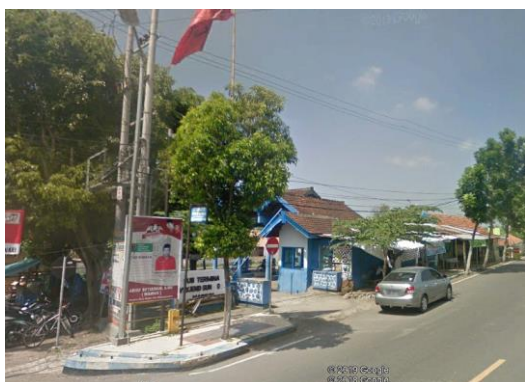
No.	Terminal / Stasiun	Alamat
1	Terminal Purboyo	Jl. Basuki Rahmat, Patihan, Manguharjo
2	Terminal Angkot Manisrejo	Jl. Klp. Sari, Masisrejo, Taman
3	Terminal Angkot Mayjend Sungkono	Jl. Mayjend Sungkono, Manguharjo
4	Stasiun Madiun	Jl. Kopol Sunaryo No. 6A, Manguharjo



Terminal Purboyo



Sub-Terminal Manisrejo



Sub-Terminal Mayjend
Sungkono



Stasiun Madiun

Gambar 3.18 Infrastruktur Transportasi Umum di Kota Madiun

SWOT Smart Living akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 3.12 Matrik SWOT Smart Living

TOWS MATRIX - SMART LIVING KOTA MADIUN 2019	Strength				Weakness			
	KEAMANAN	KENYAMANAN	SEHAT	MOBILITY STRENGTH	KEAMANAN	KENYAMANAN	SEHAT	MOBILITY STRENGTH
SK.1 Pemerintah Daerah memiliki Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penegakan PERDA dan penyelenggaraan TIBUMTRAN MAS serta perlindungan masyarakat (SATPOL PP)	SE.1 Akses cukup SE.2 Penanganan banjir sudah memadai SE.3 Sanitasi sudah ODF,80 persen jambanisasi tinggal 50 SE.4 Pengelolaan sampah sudah ada satgas dan bank sampah yang	SS.1 Kesadaran masyarakat untuk berobat bagus SS.2 Manajerial sudah bagus SS.3 Modal cukup yang pendanaan dari pemerintah n APBD, DBHCHT, DAK, Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan (BK Provinsi)	SM.1 Ketersediaan angkutan umum sudah baik, baik konvensional maupun onlinea	WK.1 Jumlah Aparatur Negara Sipil yang menyelenggara kan penegakan PERDA dan TIBUMTRANM AS sangat terbatas dan kurang	WE.1 Penanganan sampah overload dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam penanganan sampah masing masing WE.2 RTH masih kurang dan keindahan perlu ditingkatkan WE.3 Rumah kos membuat kurang nyaman	WS.1 Kurangnya prilaku hidup sehat dari masyarakat t WS.2 Digital Kurang WS.3 Kurang prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat	WM.1 Anggaran Kurang, sehingga perencanaan yang ada tak terlaksana (Capital Lemah) WM.2 Pemeliharaan sudah bagus tetapi perlengkapan kurang WM.3 Transportasi umum kekurangannya di Angkot tetapi Transportasi	

			<p>untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan SK.3 Adanya prasarana dan sarana dalam mendukung kegiatan pelayanan penyelenggaraan TIBUMTRAN MAS SK.4 Adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang penyelenggaraan TIBUMTRAN MAS</p>	<p>memadai (memenuhi standard)</p>				<p>WE.4 Enforcement nya kurang WE.5 Manajerial kurang WE.6 Dana pengelolaan sampah mahal</p>		<p>online sudah lebih dari cukup WM.4 Kinerja Ruas Jalan Nasional semakin menurun WM.5 Banyaknya pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor) WM.6 Tingkat disiplin lalu lintas kurang</p>
<p>Opportunity</p>	<p>KEAMANAN</p>	<p>OK.1 Masyarakat kota Madiun yang ramah OK.2 Ada</p>	<p>Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan</p>							

		<p>sinergisitas 3 pilar, yaitu Pemerintah Daerah, TNI dan Polri</p> <p>OK.3 Adanya jimpitan pada saat ronda malam sebagai modal untuk menyelenggarakan kegiatan masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan</p> <p>OK.4 Angka kejahatan di kota Madiun yang relatif kecil</p> <p>OK.5 Adanya perguruan pencak silat yang berpusat di kota Madiun</p>	<p>Lingkungan</p> <p>[SK.2, SK.3, SK.4 - OK.3, OK.5]</p>							
	<p>KENYAMANAN</p>	<p>OE.1 Adanya Komitmen BUMN dan pelaku usaha dalam</p>						<p>Meningkatkan Kualitas Pemukiman</p> <p>[WE.2, WE.3 - OE.1]</p>		

		pembangunan RTH							
	SEHAT	OS.1 Adanya forum peduli kesehatan yang bermitra dengan PKK, Organisasi profesi, LSM peduli kesehatan, institusi pendidikan kesehatan, dll			Mempermu dah Akses Pelayanan dan Informasi Layanan Kesehatan [SS.1, SS.3 - OS.1]			Mewujudk an Masyarakat at yang ber- Berperilak u Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) [WS.1 - OS.1]	
	MOBILITY STRENGTH	OM.1 Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan instansi terkait OM.2 Adanya forum keselamatan di tingkat pelajar dan masyarakat OM.3 Tersedianya angkutan umum sekolah						Meningkatk an Aksesibilita s Masyarakat [WM.3 - OM.1, OM.2, OM.3]	

		gratis (bus dan angkot)								
Threat	KEAMANAN	TK.1 Masyarakat belum sepenuhnya mempunyai kesadaran dalam menciptakan keamanan lingkungan TK.2 Madiun sebagai kota transit sehingga berpotensi untuk rawan gangguan keamanan TK.3 Adanya potensi konflik internal di perguruan pencak silat dan antar perguruan pencak silat.	Mewujudkan Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu [SK.2, SK.3 - TK.1, TK.2, TK.3]							
	KENYAMANAN	TE.1 Kepedulian Masyarakat								

		dalam pemeliharaan RTH kurang TE.2 Belum adanya investor dalam pengelolaan sampah TE.3 Prilaku masyarakat dalam memproduksi sampah plastik yang masih tinggi								
	SEHAT	TS.1 Perkembangan penyakit tidak menular yang semakin meningkat TS.2 Banyaknya penjual makanan siap saji yang tidak sehat								
	MOBILITY STRENGTH	TM.1 Perkembangan teknologi transportasi				Mengoptimalkan Sistem Manajemen Transportans				

		yang cepat TM.2 Meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi				i [SM.1 - TM.1, TM.2]				
--	--	---	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

3.4.2 Strategi *Smart Living*

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Living* adalah sebagai berikut:

Tabel 0.13 Strategi *Smart Living*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)				
1.	L1. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (recreational).	% peran serta masyarakat dalam mengembangkan kualitas lingkungan permukiman	L1S1. Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan L1S2. Meningkatkan Kualitas Pemukiman	Misi 3 Harmonisasi tata kota yang nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Mewujudkan Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)				
2.	L2. Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (healthcare), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (sport)	Indeks Keluarga Sehat	L2S1. Mewujudkan Masyarakat yang ber-Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) L2S2. Mempermudah Akses Pelayanan dan Informasi Layanan Kesehatan	Misi 3 Harmonisasi tata kota yang nyaman
Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)				
3.	L3. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.	indeks tingkat pelayanan jalan	L3S1. Mengoptimalkan Sistem Manajemen Transportansi L3S2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat L3S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu	Misi 3 Harmonisasi tata kota yang nyaman

3.5 Smart Society

Tujuan yang disusun pada *Smart Society* adalah Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.

3.5.1 Analisis Strategi *Smart Society*

Matrik SWOT *Smart Society* akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 3.14 Matrik SWOT *Smart Society*

TOWS MATRIX - SMART SOCIETY KOTA MADIUN 2019	Strength			Weakness		
	Komunitas	Pendidikan	Keamanan	Komunitas	Pendidikan	Keamanan
SK.1Terbentuknya komunitas hobby, profesi, pemerhati, relawan social, dll secara terstruktur.	SP.1 jumlah perguruan tinggi di madiun cukup banyak SP.2 Madiun menjadi tempat pendidikan yang diminati oleh daerah sekitar Kota Madiun SP.3 dukungan dari pemerintah daerah untuk pendidikan sangat besar	SE.1 pusat data kependudukan yang valid SE.2 SDM bidang keamanan yang cukup SE.3 system keamanan yang cukup (institusi)	WK.1 Belum ada prestasi yang menonjol, yang mencerminkan basic komunitas WK.2 Usia produktif lebih sedikit dalam berpartisipasi	WP.1 kualitas perguruan tinggi di madiun belum ada yang bertaraf nasional WP.2 kualitas pendidikan kota madiun belum stabil WP.3 pemanfaatan dukungan dari pemerintah daerah belum terserap secara maksimal WP.4 lembaga pendidikan dan	WE.1 ketergantungan terhadap pemerintah pusat di data kependudukan WE.2 Gesekan kepentingan antar SDM keamanan WE.3 kinerja PPSI belum optimal	

		<p>SP.4 terdapat banyak sumber belajar di kota madiun</p> <p>SP5. terdapat banyak dunia usaha dan dunia industry di kota madiun</p> <p>SP.6 terdapat perpustakaan umum dan taman baca dengan pelayanan yang cukup lengkap di kota madiun</p> <p>SP.7 terdapat titik akses internet di hampir semua tempat di kota madiun</p> <p>SP.8 ada pusat informasi untuk mendukung dunia pendidikan kota madiun</p> <p>SP.9 pengelolaan</p>		<p>masyarakat belum memanfaatkan sumber belajar secara maksimal</p> <p>WP.5 keberadaan dunia usaha dan industry belum dimanfaatkan sebagai mitra dunia pendidikan secara maksimal</p> <p>WP.6 keberadaan perpustakaan dan taman baca belum mendukung secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan kota madiun</p> <p>WP.7 akses internet di hampir semua tempat di kota madiun belum dimanfaatkan untuk</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>informasi dan data sudah cukup baik SP.10 ada upaya untuk melayani difabel di kota madiun SP.11 adanya pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan SP.12 adanya angkutan siswa gratis SP.13 Banyak anak atau remaja Madiun yang punya bakat dan potensi luar biasa SP.14 Pemerintah kota menerbitkan peraturan terkait pendidikan</p>		<p>meningkatkan kegiatan pendidikan WP.8 pusat informasi yang ada belum dimanfaatkan untuk mendukung dunia pendidikan kota madiun WP.9 pengelolaan informasi dan data kurang efektif dan rapi WP.10 Pelayanan pendidikan bagi yang kebutuhan khusus di kota madiun belum maksimal WP.11 pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan belum dimanfaatkan masyarakat WP.12 angkutan siswa gratis belum dimanfaatkan</p>	
--	--	---	--	---	--

						<p>maksimal WP.13 Banyak anak atau remaja Madiun yang punya bakat dan potensi luar biasa belum ditangani secara optimal WP.14 peraturan terkait pendidikan belum tersampaikan secara cepat dan merata</p>	
Opportunity	Komunitas	<p>OK.1 Sumber daya manusia yang cukup dan peduli OK.2 Display dari yang sudah berprestasi.</p>	Meningkatkan Kualitas Diseminasi Informasi [SK.1 - OK.1, OK.2]				
	Pendidikan	<p>OP.1 Tren teknologi pendidikan kian beragam OP.2 Gaya belajar anak yang dinamis OP.3 Meningkatnya kesadaran orang tua untuk pendidikan anak OP.4 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ruang untuk orang dengan kebutuhan khusus</p>					<p>Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak [WP.2, WP.13 - OP.1, OP.2, OP.3] Meningkatkan Kualitas Fasilitas Belajar [WP.6, WP.7, WP.9, WP.10 - OP.4]</p>

	Keamanan	<p>OE.1 keamanan dan ketertiban di masyarakat lebih baik</p> <p>OE.2 terciptanya kerukunan masyarakat yang kuat</p> <p>OE.3 pencegahan kriminalitas</p> <p>OE.4 kemas wisata budaya dan SDM keamanan</p>			<p>Menciptakan Sistem Keamanan Masyarakat yang Dinamis [SE.1, SE.2, SE.3 - OE.1, OE.2, OE.3]</p>			
Threat	Komunitas	<p>TK.1 antar komunitas ada gap/pembatas, benturan</p> <p>TK.2 kurangnya interaksi social karena kemajuan teknologi komunikasi</p>	<p>Meningkatkan Sinergi Antar Instansi serta Kelompok Masyarakat [SK.1 - TK.2]</p>					
	Pendidikan	<p>TP.1 Sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan perguruan tinggi bertaraf nasional/internasional masih sangat jauh dari ideal</p> <p>TP.2 kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kota madiun belum merata kualitas SDM dan sarpras belum merata</p> <p>TP.3 kesadaran lembaga pendidikan dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber belajar masih rendah</p>		<p>Menguatkan Sektor Pendidikan Informal [SP.4, SP.6, SP.7, SP.8, SP.10. SP.11 - TP.4]</p>			<p>Mewujudkan Fasilitas Pendidikan yang Unggul [WP.2 - TP.1, TP.2]</p>	

		<p>TP.4 kesadaran dunia pendidikan dan dunia usaha dan industry untuk berkerjasama masih rendah</p> <p>TP.5 kesadaran masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan perpustakaan dan taman baca masih rendah</p> <p>TP.6 Masyarakat belum tahu dan belum sadar cara pemanfaatan internet untuk meningkatkan kegiatan pendidikan</p> <p>TP.7 belum ada kerjasama pemanfaatan pusat informasi yang ada untuk mendukung dunia pendidikan kota madiun</p> <p>TP.8 pengelolaan informasi dan data belum ditata secara efektif dan rapi dengan memanfaatkan IT yang ada</p> <p>TP.9 Pelayanan pendidikan bagi yang kebutuhan khusus di kota madiun belum maksimal</p> <p>TP.10 Kesadara</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		masyarakat untuk memanfaatkan Pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan belum maksimal TP.11 keengganan orang tua dan kemauan siswa untuk memanfaatkan angkutan siswa gratis masih rendah TP.12 Belum ada program dari pihak terkait untuk menangani anak atau remaja Madiun yang punya bakat dan potensi luar biasa TP.13 Proses pembuatan dan sosialisasi peraturan terkait pendidikan belum tersampaikan secara cepat dan merata						
	Keamanan	TE.1 Benturan kekuatan antar SDM Keamanan						

3.5.2 Strategi Smart Society

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Society* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Strategi Smart Society

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (<i>Community</i>)				
CM0 1	S1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah	Index partisipasi masyarakat	S1S1. Meningkatkan kualitas diseminasi informasi S1S2. Meningkatkan Sinergi Antar Instansi serta Kelompok Masyarakat	Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas
CM0 2	S2. Mengembangkan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif	index sumber daya masyarakat	S2S1. Menguatkan Sektor Pendidikan Informal	Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas
Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (<i>Learning</i>)				
LN01	S3, Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-	akreditasi sekolah dan perguruan tinggi	S34S1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak S34S2. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Belajar	Misi 5

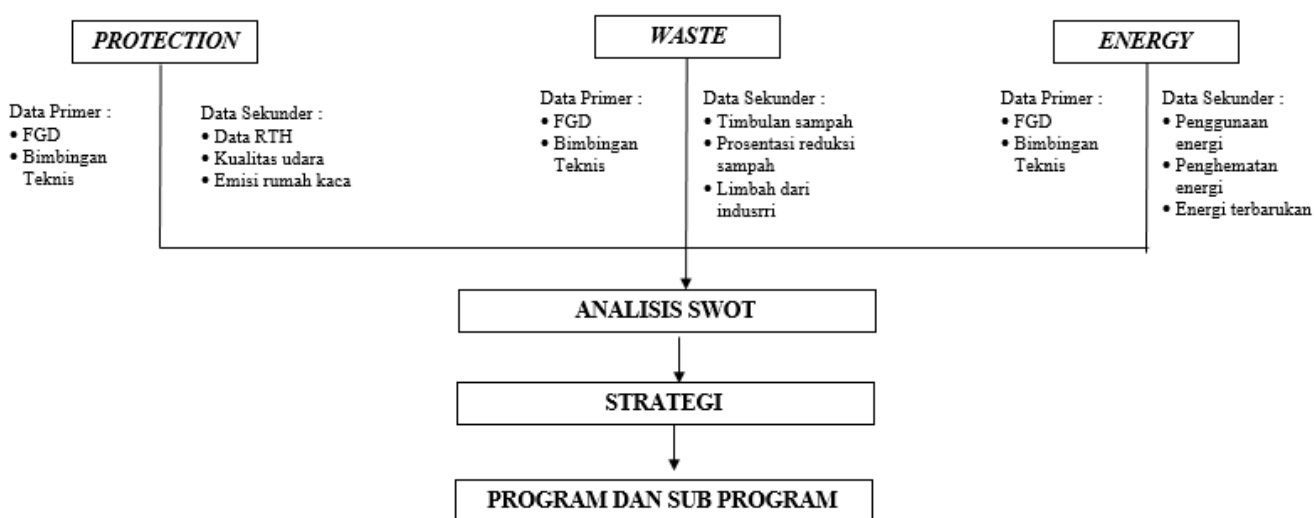
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
	luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang difable.		S34S3. Mewujudkan Fasilitas Pendidikan yang Unggul	Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas
LN02	S4. Membangun platform edukasi bagi masyarakat			Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)				
SC01	S5. Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT).	indeks ketentraman	S5S1. Menciptakan Sistem Keamanan Masyarakat yang Dinamis	Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas

3.6 Smart Environment

Tujuan yang disusun pada *Smart Environment* adalah Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, terpadu, dan mandiri (*Madiun Health and Comfort City*).

3.6.1 Analisis Strategi Smart Environment

Dalam melakukan penyusunan strategi *Smart Environment* digunakan metodologi seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.19 Metodologi Penyusunan Strategi Smart Environment

Kajian dimensi *Smart Environment* dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk melakukan penentuan terhadap kondisi eksisting indikator-indikator yang ada dalam dimensi *Smart Environment*. Data primer dilakukan dengan melakukan *Forum Discussion Group* atau FGD dengan dinas-dinas yang terkait, sedangkan data sekunder didapatkan dari laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas-dinas tersebut dengan kurun waktu 1 tahun atau lebih. Selanjutnya data-data yang didapat digunakan untuk mendukung analisis SWOT terhadap dimensi *Smart Environment* yang hasilnya berupa program dan sub program dalam dimensi *Smart Environment* untuk mewujudkan *Smart City Madiun*.

Berdasarkan data lingkungan yang ada di Kota Madiun saat ini, ada beberapa data yang sudah ada. Namun beberapa data belum ada di dinas terkait, seperti data jejak karbon yang ada di Kota Madiun.

Tabel 3.16 Penentuan Indikator pada Dimensi Smart Environment untuk Kota Madiun

Sub Dimensi	Indikator	Data	Analisis
Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	Indeks Tutupan Vegetasi	Ada	Indeks Tutupan Vegetasi masih kurang
Restorasi tingkat pencemaran sungai	Indeks Pencemaran Air	Ada	81% dari total 91 lokasi titik sampling menunjukkan kondisi air sungai tercemar ringan
Pengendalian polusi udara	Indeks Standar Pencemaran Udara - ISPU	Tidak ada	Selama ini hanya pengukuran parameter SO2 dan NO2 saja
Pengembangan sistem tata kelola limbah atau,	Indeks Pencemaran Air	Ada	81% dari total 91 lokasi titik sampling menunjukkan kondisi air sungai tercemar ringan
Pengembangan sistem tata kelola sampah rumah tangga (household)	Prosentasi Reduksi Sampah Rumah Tangga	Tidak Ada	
	Reduksi Volume Sampah ke TPA	Ada	6% reduksi selama 4 tahun terakhir
Pengembangkan sistem tata kelola limbah industri	Ijin Lingkungan Industri	Tidak Ada	
Pengembangan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (public)	Ijin Lingkungan bagi fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan/mall, pasar	Tidak Ada	
Penjagaan keseimbangan ekosistem lingkungan dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem	Luas area genangan	Ada	Kota Madiun tidak mempunyai genangan setinggi lebih dari 30 cm dan lebih dari 2 jam

Sub Dimensi	Indikator	Data	Analisis
sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.			
Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab	Total penggunaan energi perumahan per kapita (kWh/tahun)	Tidak Ada	
	Emisi efek rumah kaca (ton/kapita)	Tidak Ada	
Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (environmentally friendly) dan berkelanjutan (sustainable) serta terjangkau bagi masyarakat.			

Dari penentuan indikator yang sesuai dengan kondisi eksisting Kota Madiun, maka disusunlah SWOT-Matriks *Smart Environment*. SWOT matriks *Smart Environment* akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 3.17 Matrik SWOT Smart Environment

TOWS MATRIX - SMART ENVIRONMENT KOTA MADIUN 2019	STRENGTH			WEAKNES			
	PROTECTION	WASTE (SAMPAH PADAT)	WASTE (LIMBAH CAIR)	ENERGY	PROTECTIO N	WASTE (SAMPAH PADAT)	WASTE (LIMBAH CAIR)
SP.1 Adanya sumur resapan SP.2 Sudah adanya Perda IMB yang mengatur luasan lahan SP.3 Sudah adanya Perda tentang RTH	SW.1 Ketersediaan TPS sementara yang telah terbagi di beberapa titik SW.2 Armada angkut dan SDM yang cukup SW.3 Pengelolaan anggaran cukup baik SW.4 Sudah ada perda yang mengatur Retribusi SW.5 Pemanfaatan sampah organik untuk pupuk kompos SW.6 pemanfaatan	SC.1 Sudah ada perda yang mengatur untuk ijin IPAL bagi usaha industry SC.2 Telah tersedia komunal (IPAL)	SE.1 Pasokan Listrik stabil SE.2 Pemakaian lampu hemat energi SE.3 Ketersediaan anggaran yang cukup	WP.1 Kurangnya sosialisasi tentang perlindungan lingkungan hidup WP.2 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	WW.1 Belum ada perda dari sumber (rumah) ke TPS WW.2 TPA sudah Overload WW.3 Pengelolaan sampah belum sanitary (masih control land fill) WW.4 Kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah masih kurang WW.5 Perilaku masyarakat yang belum menerapkan PK5	WC.1 Banyak usaha industry yang belum memiliki pengelolaan limbah (IPAL) WC.2 Pengawasan pembuangan limbah masih kurang WC.3 Belum ada perda yang mengatur untuk limbah domestic (rumah tangga)	WE.1 Belum menerapkan real metterry (PLN), berapapun pemakaiannya, tagihan masih menggunakan flat tarif. WE.2 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan hemat energi

				gas metan hasil pengolahan sampah				WW.6 Belum adanya penerapan teknologi pengelolaan sampah di masyarakat		
OPORTUNITI	PROTEKSI	<p>OP.1 Adanya kearifan lokal masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (bersih desa, tanam pohon)</p> <p>OP.2 Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penelitian pencegahan pencemaran limbah dan sampah</p> <p>OP.3 Peran</p>	Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau [SP.3 - OP.3]				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup [WP.1, WP.2 - OP.1, OP.3, OP.4]			

		serta ORMAS dan masyarakat sebagai pekerja sosial komunitas berbasis lingkungan OP.4 Pemanfaatan teknologi untuk monitoring kualitas air dan udara								
	WASTE (SAMPAH PADAT)	OW.1 Adanya bank sampah OW.2 Sumber energi alternative dari pengelolaan sampah OW.3 Daur ulang sampah plastic (potensi ekonomi)								

	WASTE (LIMBAH CAIR)	OC.1 Penerapan teknologi pengolahan air (limbah cair) OC.2 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah		Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga [SW.2 - OC.2]	Menegakkan Peraturan Terkait Ijin Lingkungan Pada Industri [SC.1, SC.2 - OC.1]		Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Sekolah, Kantor, dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah [WW.4, WW.5 - OC.2]	Meningkatkan Pengendalian Kualitas Udara [WC.1, WC.2 - OC.1]	
	ENERGY	OE.1 Pengelolaan sampah menjadi sumber energi alternative OE.2 Pembangunan tiang PJU dekoratif (untuk estetika, penghematan anggaran, kerapian,			Mengoptimalkan Penggunaan Listrik [SE.2, OE.2]				Menciptakan Energi Alternatif Terbarukan [WE.1 - OE.1]

		smart living & branding)								
THREAT	PROTECTI ON	TP.1 Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian	Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air [SP.1 - TP.1]					Mengembangkan Keseimbangan Lingkungan [WW.2 - TP.2]		
		TP.2 Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat berbanding lurus dengan volume sampah	Menciptakan Pengelolaan Bencana Banjir yang Responsif [SP.2, SW.1, SW.5, SW.6 - TP.2]							

3.6.2 Strategi *Smart Environment*

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Environment* adalah sebagai berikut

Tabel 3.18 Strategi *Smart Environment*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)				
PT01	EN1. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara sertamengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT)	indeks kualitas lingkungan hidup	EN1S1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
PT02	EN2. Membangun ruang terbuka hijau	Indeks Tutupan Vegetasi	EN2S1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
PT03	EN3. Mengembangkan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi	Indeks Pencemaran Air	EN3S1. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air EN3S2. Meningkatkan pengelolaan dan penanganan mitigasi bencana banjir secara responsif.	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
PT04	EN4. Mengendalikan polusi udara	Indeks Standar Pencemaran Udara - ISPU	EN4S1. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Udara	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)				
WS01	EN5. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (household)	Prosentasi Reduksi Sampah Rumah Tangga Reduksi Volume Sampah ke TPA	EN5S1. mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
WS02	EN6. Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (industrial)	Ijin Lingkungan Industri	EN6S1. Menegakkan peraturan terkait ijin lingkungan pada industri	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
WS03	EN7. Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>)	Ijin Lingkungan bagi fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan/mall, pasar	EN7S1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah, kantor, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
WS04	EN8. Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta	Luas area genangan	EN8S1. Mengembangkan Keseimbangan Lingkungan	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
	ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.			
WS05	EN9. Memanfaatkan energi yang efisien dan bertanggungjawab	Total penggunaan energi perumahan per kapita (kWh/tahun) Emisi efek rumah kaca (ton/kapita)	EN9S1. Mengoptimalkan penggunaan listrik	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
WS06.	EN10. Mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.		EN10S1. Menciptakan energi alternatif terbarukan	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)

BAB IV

RENCANA AKSI SMART CITY KOTA MADIUN

Kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Terdapat tiga konsep dalam *Smart City*. Pertama, *Smart City* adalah sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola kehidupan masyarakat di perkotaan. Kedua, konsep *Smart City* mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya yang efektif dan efisien. Ketiga, *Smart City* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Dalam rencana aksi ini, ditetapkan dari berbagai goal atau tujuan utama yang bertujuan untuk menjawab problem statement, aktivitas, objektif, hingga tugas-tugas (tasks) atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait perubahan yang akan dilakukan. Rencana aksi *Smart City* dibagi dalam 4 (empat) Rencana, yaitu :

1. Pengembangan kebijaksanaan dan kelembagaan *Smart City*
2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City*
3. Rencanapengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *Smart City*
4. Rencana penguatan literasi *Smart City*

4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City* Kota Madiun

Pembangunan Kota Madiun yang berwawasan *Smart City* pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka pembangunan wilayah dan sumber daya (manusia, alam, dan teknologi) secara optimal, efisien dan efektif. Secara garis besar, pembahasan mengenai spesifikasi tata kelola *Smart City* dibagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi pengelola dan tata kelola.

A. Arahan Umum Manajemen *Smart City*

Arahan umum yang terkait dengan Aspek Keorganisasian dalam Tata Kelola *Smart City* adalah sebagai berikut:

1. **Kepemimpinan.** Fungsi utama yang harus ada terkait kepemimpinan dalam bidang *Smart City* adalah:
 - Memimpin Organisasi Pengelola, yaitu mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian, dan evaluasi internal.
 - Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder yang menjadi pengguna layanan *Smart City*.
2. **Hubungan yang sinergis.** Dalam rangka memastikan hubungan sinergis antar stakeholder, sebaiknya membentuk **Dewan Smart City**. Dewan *Smart City* merupakan lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola *Smart City*. Pembentukan Dewan *Smart City* Daerah berfungsi sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam Masterplan (Rencana Induk) *Smart City*. Dewan *Smart City* memiliki tugas dan kewajiban:
 - Memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
 - Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di daerah;
 - Menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi OPD;
 - Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di daerah;
 - Menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di daerah;
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* sekurang-kurangnya satu bulan sekali;
 - Membahas hasil asesmen/audit internal dan independen sebagai materi evaluasi;
 - Melakukan pelaporan kepada Kepala Daerah terkait perkembangan pelaksanaan *Smart City*.

B. Kerangka Organisasi Tata Kelola *Smart City*

Sesuai dengan prinsip pemisahan antara governance dan manajemen, maka usulan organisasi tata kelola *Smart City* adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Governance*, dilakukan oleh 4 pihak :
 - Wali Kota selaku pemegang amanat untuk pengelolaan Kota Madiun (eksekutif).
 - DPRD selaku wakil rakyat dan pemegang kekuasaan legislative.
 - Dewan *Smart City* sebagai forum komunikasi dan antar stakeholder *Smart City* untuk dapat saling berkontribusi dalam kemajuan Kota Madiun.
 - Tim Pelaksana *Smart City* yang akan mengawal implementasi *Smart City* di Kota Madiun. Tim Pelaksana *Smart City* Daerah dibentuk untuk menjamin terjadinya sinkronisasi antara Masterplan (Rencana Induk) *Smart City* dengan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, maupun Renja SKPD.
2. Fungsi Manajemen. Dilakukan oleh pengelola layanan yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Daerah Kota Madiun maupun pihak lain (stakeholder).

C. Manajemen SDM

Untuk menjawab tantangan kebutuhan dan kondisi SDM di Kota Madiun, dapat diterapkan prinsip Pemilahan Tugas. Prinsip pemilahan tugas dilakukan pada kondisi keterbatasan SDM pada organisasi pengelola TI, yakni dengan tujuan untuk:

1. Mendapatkan kinerja yang optimal;
2. Menghindari kemungkinan bertumpuknya tanggung-jawab beberapa fungsi kritis TI pada seorang personel; dan
3. Mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan aset system informasi.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City* Kota Madiun

Rencana pembangunan infrastruktur smrat city dibagi menjadi 3, yaitu: infrastutur Teknologi Informasi, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur akan berhasil ketika pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama untuk mewujudkan Kota Madiun menjadi Kota cerdas menuju Kota kelas dunia.

4.2.1 Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi system informasi secara terperinci yang terdiri dari hardware, software, database, sumber daya manusia, telekomunikasi, dan prosedur. Rencana aksi pembangunan infrastruktur teknologi informasi terdiri dari pembangunan data center, jaringan, disaster recovery center, dan city operation center.

A. Data Center

Kota Madiun perlu menyediakan data center yang dapat diakses bersama oleh seluruh aplikasi penunjang *Smart City*. Data center dimaksud akan menyediakan kapasitas penyimpanan (*storage*), pemrosesan (*computing*), dan distribusi data yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi *Smart City*. Data center dimaksud setidaknya memiliki komponen dan perannya sebagai berikut:

1. *Database Server*. Tempat penyimpanan data pokok, data transaksi, data analisis, dan pelaporan dari semua aplikasi penunjang *Smart City*.
2. *Application Server*. Fasilitas yang menyediakan backend API dan frontend untuk aplikasi *Smart City*.
3. *File Sharing Server*. Fasilitas cloud yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data bersama.
4. *Mail Server*. Fasilitas email resmi untuk lingkungan Pemkot Madiun.
5. *Domain Name Server*. Fasilitas untuk nama domain resmi dalam pemberian alamat layanan *Smart City*.

B. Jaringan

Ketersediaan jaringan mutlak diperlukan oleh Kota Madiun untuk pemanfaatan sumber daya yang dibangun melalui inisiatif *Smart City* secara optimal. Infrastruktur jaringan yang akan dibangun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni: Infrastruktur Jaringan Intra OPD (Intranet Kabupaten) dan Infrastruktur Jaringan Internet Masyarakat.

1. Jaringan Intra OPD

Jaringan intra OPD merupakan jaringan komputer yang menghubungkan seluruh kantor dinas di lingkungan Pemkot Madiun. Jaringan yang dibangun dapat melalui jalur privat maupun publik. Kapasitas jaringan yang disediakan harus mampu menangani lalu lintas data dalam kapasitas besar, termasuk diantaranya menyediakan jalur komunikasi VoIP dan Video Conference dalam lingkungan OPD di Kota Madiun.

2. Jaringan Internet Masyarakat

Jaringan internet masyarakat merupakan jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan perangkat pemerintahan hingga tingkat kecamatan/kelurahan. Tersedianya jalur tersebut akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan kemudahan akses layanan bagi perangkat pemerintahan maupun masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan pemerintah.
- b. Memungkinkan pemantauan kondisi daerah terotomasi menggunakan teknologi Internet of Things, seperti monitoring cuaca, kondisi lahan pertanian, kondisi aliran irigasi, dan lainnya.
- c. Mendorong perangkat pemerintah setempat untuk memunculkan inovasi dalam pelayanan masyarakat, seperti perpustakaan digital, *public hotspot*, kelas keterampilan digital, dan lainnya.

C. Disaster Recovery Center

Disaster Recovery Center (DRC) merupakan fasilitas replikasi dan backup secara berkala terhadap seluruh data yang tersimpan di data center. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika terjadi kejadian force majeure yang mengakibatkan gagalnya data center dalam menyediakan layanan yang seharusnya. DRC dirancang agar mampu mengambil alih sementara peran data center sampai keadaan layanan pulih kembali.

D. City Operation Center

City Operation Center merupakan pusat kendali operasi *Smart City*, dimana seluruh operasional sistem *Smart City* dapat dimonitoring. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai tampilan yang menyajikan informasi real time dari perangkat dan sistem yang tersebar di seluruh Kota Madiun.

Tabel 4.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Target	Leading Sector	Anggaran
1	Pengembangan Data Center	Sertifikasi data Center	100%	Dinas Kominfo	APBD
2	Pembangunan Jaringan Komputer yang terkoneksi internet	Persentase kecamatan/ kelurahan yang memiliki akses internet	100%	Dinas Kominfo	APBD
3	Pembangunan Disaster Recovery Center	Sertifikasi DRC	100%	Dinas Kominfo	APBD
4	Pembangunan City Operation Center	Jumlah dashboard system informasi yang terintegrasi	100%	Dinas Kominfo	APBD

4.2.2 Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Infrastruktur keras yang mendukung pembangunan smart city Kota Madiun adalah sebagai berikut:

A. Destinasi Wisata

Pembangunan destinasi wisata di Kota Madiun bertujuan agar Kota Madiun semakin dikenal dan memiliki positioning yang kuat di masyarakat. Dengan pembangunan destinasi wisata yang memperkenalkan budaya serta kuliner khas menjadikan warisan budaya Kota Madiun dikenal oleh masyarakat luas.

B. Galeri Oleh-Oleh

Pembangunan galeri oleh – oleh merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Madiun. Selain itu juga sebagai media pemasaran kuliner dan cinderamata khas Kota Madiun, Misalnya madumongso, bluder, sambel pecel instan, dan cinderamata minimatur kereta api. Galeri oleh – oleh dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil dari UMKM yang ada di Kota Madiun.

C. Transportasi dan Mobilitas

Rencana pembangunan infrastruktur fisik yang harus disiapkan sebagai strategi, salah satunya adalah fasilitas untuk mobilitas, yaitu sarana dan prasarana transportasi. Sebagai gambaran awal, dengan melalui Google Map, dapat diperkirakan kecepatan rata rata kendaraan di beberapa ruas jalan di Kota Madiun berdasarkan data Hari Minggu, 06 Oktober 2019 dan Senin, 07 Oktober 2019.

Tabel 4.2 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Minggu, 06 Oktober 2019

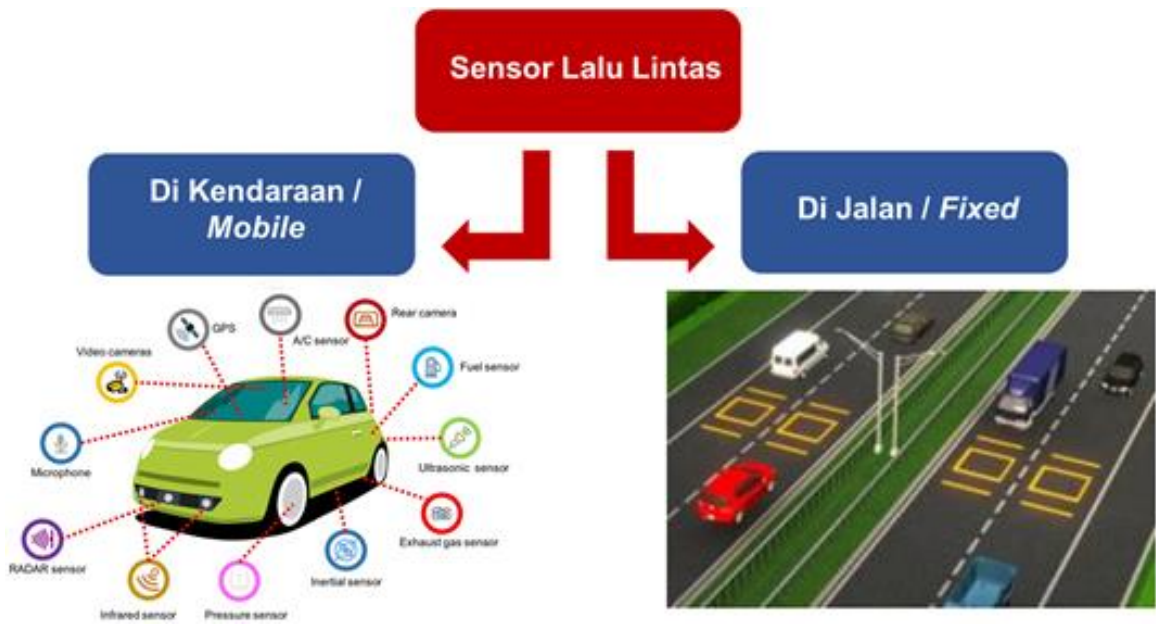
Nama Jalan	Kecepatan (km/h)
JL Pahlawan	26,00
JL Kol Marhadi	21,47
JL Pangsud - Mastrip	21,97
JL. MT Haryono	26,61
JL. Basuki Rahmat	28,87
JL. S. Parman	17,59

Nama Jalan	Kecepatan (km/h)
JL. Soekarno Hatta	30,00
JL. Urip Sumoharjo	26,00
JL. Dr Soetomo	26,00
JL. Yos Sudarso	39,37
Terminal Mayjend - PeceLand	25,96
Terminal Manisrejo - PeceLand	28,94
Gerbang Tol - PeceLand	38,69
Terminal Purabaya - PeceLand	28,83
Stasiun Madiun - PeceLand	24,23

Tabel 4.3 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Senin, 07 Oktober 2019

Nama Jalan	Kecepatan AM (km/h)	Kecepatan PM (km/h)
JL Pahlawan	29,25	26,00
JL Kol Marhadi	24,00	24,00
JL Pangsud - Mastrip	21,00	18,67
JL. MT Haryono	27,00	24,00
JL. Mayjend Panjaitan	25,50	25,50
JL. Basuki Rahmat	38,57	40,00
JL. S. Parman	20,00	15,00
JL. Soekarno Hatta	30,00	30,00
JL. Urip Sumoharjo	20,40	20,40
JL. Dr Soetomo	26,00	26,00
JL. Yos Sudarso	36,00	33,00

Kecepatan rata-rata tersebut cukup rendah dan berpotensi pengeluaran emisi yang cukup tinggi. Kecepatan yang rendah ini kemungkinan karena lalu lintas yang cukup padat, walaupun belum ada data berapa volume lalu lintas harian rata-rata di masing-masing ruas jalan tersebut. Perkembangan dari informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) menghasilkan gagasan untuk mengembangkan teknologi sensor yang lebih maju. Integrasi dari informasi, komunikasi dan teknologi di dalam bidang transportasi salah satunya adalah Intelligent Transportation System (ITS), yang dapat membuat kondisi berkendara (travelling experience) menjadi lebih baik, lebih aman dan lebih efisien.



(Joelianto, 2018)

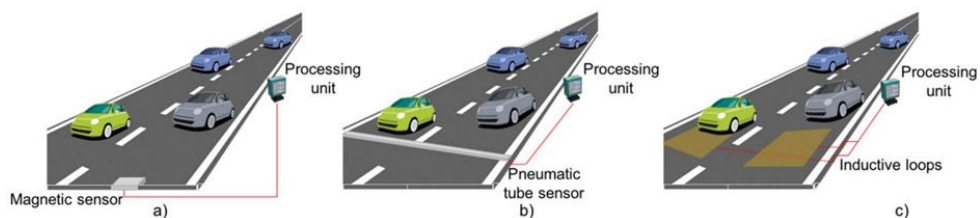
Gambar 4.1 Sensor Lalu Lintas

Tujuan utama ditematkannya Fixed Sensors adalah untuk mengumpulkan data lalu lintas, seperti misalnya :

1. Data jumlah kendaraan (volume kendaraan, komposisi kendaraan)
2. Kecepatan kendaraan (kecepatan rata-rata, over speeding, dll)
3. Kepadatan lalu lintas
4. Rata-rata headway (occupancy kendaraan, kepadatan lalu lintas, derajat kejenuhan)
5. Dan tujuan lainnya.

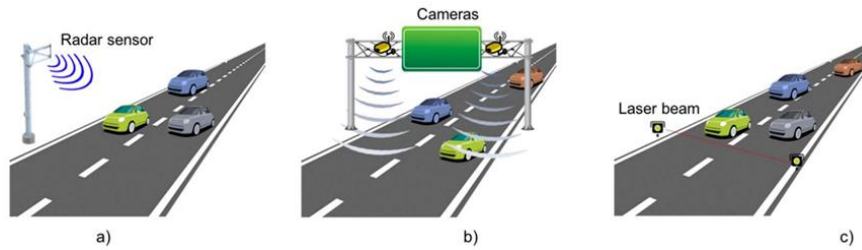
Sensor-sensor tersebut bekerja secara real-time dan akan membantu para stakeholder untuk menyediakan jaringan transportasi yang lebih baik dan lebih adaptiv. Fixed Sensor dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang terlihat dan yang tidak terlihat (intrusive and non-intrusive).

1. Intrusive



Gambar 4.2 Sensor Intrusive

2. NonIntrusive



Gambar 4.3 Sensor NonIntrusive

Contoh lain Road Sensors dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4 Road Sensors

Kategori	Type Sensor	Aplikasi dan Penggunaan
Intrusive (terlihat)	<i>Pneumatic road tube</i>	Digunakan untuk mendeteksi jumlah kendaraan, klasifikasi kendaraan, dan menghitung kendaraan
	<i>Inductive Loop Detector (ILD)</i>	Digunakan untuk mendeteksi pergerakan kendaraan, keberadaan kendaraan, menghitung kendaraan, dan <i>occupancy</i> kendaraan. Sinyalnya akan mencatat di dalam perangkat yang ditempatkan di sisi jalan
	<i>Magnetic sensor</i>	Digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, dan mengidentifikasi kondisi berhenti-laju kendaraan
	<i>piezoelectric</i>	Mengklasifikasikan kendaraan, menghitung kendaraan dan mengukur beban dan kecepatan kendaraan
Non Intrusive (tak terlihat)	<i>Video Camera</i>	Mendeteksi kendaraan yang berpindah laju dan mengklasifikasikan kendaraan dari ukuran. Juga dapat mengetahui keberadaan kendaraan, <i>flow rate</i> , <i>occupancy</i> , dan kecepatan masing-masing golongan
	<i>Radar sensors</i>	Mendeteksi volume kendaraan dan kecepatan, mendeteksi arah dari kendaraan dan dapat digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas
	<i>infrared</i>	Dapat digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan, ukuran kendaraan, volume kendaraan, dan <i>occupancy</i> jalur tersebut
	ultrasonic	Mentracking jumlah kendaraan, keberadaan kendaraan, dan <i>occupancy</i>
	Accoustic array sensors	Untuk membantu mengukur panjang lintasan kendaraan, keberadaan kendaraan dan kecepatan kendaraan
	Road surface condition sensors	Untuk mengumpulkan informasi cuaca, seperti suhu temperatur, <i>dew point</i> , <i>water film height</i> , dan kondisi jalan
	RFID (radio frequency identification)	Digunakan untuk mentracking kendaraan, biasanya digunakan di jalan tol

Kebanyakan orang menganggap kamera Surveillance atau CCTV adalah sensor lalu lintas. CCTV adalah kamera yang digunakan untuk memonitor saat real-time, atau merekam kondisi dari beberapa tempat yang berbeda di satu waktu yang sama. Tanpa melakukan analisis/penggunaan software/program, CCTV tidak akan menghasilkan informasi apapun, sebab data yang dihasilkan dari CCTV hanya berupa rekaman video. Untuk menghasilkan data lalu lintas, CCTV harus ditambahkan dengan beberapa perangkat atau program yang nantinya akan memproses gambar dan menghasilkan data lalu lintas yang diinginkan. Berikut ini merupakan data CCTV yang dimiliki oleh Kota Madiun berdasarkan lokasi.

no	Simpang	Jumlah Kaki Simpang	Lokasi	CCTV	Audio
1	SIMPANG PIRING / REJOAGUNG	4	JL. BASUKI RAHMAD	1	
			JL. RINGROAD	1	
			JL. YOS SUDARSO	1	
			JL. RAYA MADIUN - NGANJUK	1	
2	SIMPANG PROLIMAN	5	JL. DIPONEGORO	1	1
			JL. S.PARMAN	1	
			JL. THAMRIN	1	
			JL. RIMBA DHARMA	1	
3	SIMPANG KLEGEN	4	JL. MASTRIP	1	
			JL. THAMRIN	1	
			JL. SETIA BUDI	1	
			JL. MT HARYONO	1	
4	SIMPANG SERAYU - PANDJAITAN	4	JL. SERAYU	2	
			JL. DI PANJAITAN	2	
5	SIMPANG TE'AN	4	JL. RAYA GEGER	1	
			JL. KAPTEN TENDEAN	1	
			JL. DI PANJAITAN	1	
			JL. SUKARNO HATTA	1	
6	SIMPANG PATUNG GAJAH	4	JL. SUKARNO HATTA	2	
			JL. KALIMOSODO	1	
			JL. CILIWUNG	1	
7	SIMPANG MERAK	4	JL. SUKARNO HATTA	2	
			JL. MERAK	1	
8	SIMPANG SLEKO	4	JL. TRUNOJOYO	1	1
			JL. MAYJEND SUNGKONO	1	
			JL. MUSI	1	
			JL. H. AGUS SALIM	1	
9	SIMPANG AGUS SALIM - CITANDUI	4	JL. H. AGUS SALIM	2	
			JL. CITANDUI	1	
			JL. MERPATI	1	
10	SIMPANG SEMERU - ALUN2	4	JL. SEMERU	1	
			JL. ALUN2	2	
			JL. PANDAN	1	
11	SIMPANG GADING	3	JL. URIP SUMOHARJO	1	
			JL. RINGROAD	1	
			JL. RAYA SOLO	1	
12	SIMPANG RINGROAD - PUSPOWARNO	4	JL. RINGROAD	2	
			JL. PUSPO WARNO	1	
			JL. RAYA SIDOMULYO	1	
13	SIMPANG HAYAM WURUK	3	JL. URIP SUMOHARJO	1	
			JL. HAYAM WURUK	1	
14	SIMPANG SRITI	4	JL. URIP SUMOHARJO	1	1
			JL. MAYJEND SUNGKONO	1	
			JL. A. YANI	1	
			JL. KOL. MARHADI	1	
15	SIMPANG TUGU	4	JL. PAHLAWAN	1	1
			JL. COKROAMINOTO	1	
			JL. PANGLIMA SUDIRMAN	2	
16	SIMPANG JATIM CELL	3	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	2	
			JL. DR. SUTOMO	1	
17	SIMPANG BALI	4	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	2	
			JL. BALI	2	
18	SIMPANG LETKOL SUWARNO - KELAPA MANIS	4	JL. LETKOL SUWARNO	1	
			JL. KELAPA MANIS	1	
			JL. TAMAN PRAJA	1	
			JL. SUMBER KARYA	1	
19	SIMPANG JOYO	3	JL. DIPONEGORO	1	
			JL. IMAM BONJOL	1	
			JL. SLAMET RIYADI	1	
20	SIMPANG KARTINI	4	JL. DIPONEGORO	1	
			JL. DR. SUTOMO	2	
			JL. KARTINI	1	
21	SIMPANG MANDIRI	4	JL. JAWA	1	
			JL. PAHLAWAN	2	
			JL. A. YANI	1	
22	SIMPANG URIP SUMOHARJO - TIRTA RAYA	4	JL. URIP SUMOHARJO	2	
			JL. TIRTA RAYA	1	
			JL. SIDO MAKMUR	1	
23	Depan Matahari		Jl. Pahlawan	1	1
				83	5

Gambar 4.4 Data Lokasi dan Jumlah CCTV Kota Madiun

1. Keuntungan Pengumpulan Data Lalu Lintas

Kota yang memiliki fasilitas sensor lalu lintas akan mampu mengevaluasi kondisi lalu lintas di kotanya dengan mudah.

Beberapa evaluasi yang dapat dilakukan, antara lain :

- Macroscopic fundametal diagram (MFD)
- OD-matrix estimation
- Pembagian zona kota
- Tingkat homogenitas
- Pola kemacetan lalu lintas
- Memprediksi beberapa parameter lalu lintas
- Kota yang tidak memiliki sensor lalu lintas cenderung susah melakukan evaluasi-evaluasi tersebut.

2. Pengembangan Mobile Sensors

Mobile Sensor – sensor yang dapat berpindah-pindah – merupakan salah satu jenis dari sensor yang tertanam dalam kendaraan yang berarti sudah terpasang di setiap kendaraan. Dengan bantuan GPS akan mengumpulkan koordinat dari kendaraan, dan kecepatan kendaraan setiap waktu. Data ini akan digabungkan untuk mengestimasi waktu tempuh kendaraan, rute perjalanan, juga akan memberikan keluaran yang akurat seperti misalnya :

- Average flow
- Kepadatan rata-rata
- Kecepatan rata-rata
- Deteksi gangguan perjalanan
- Turning ratio
- Waktu siklus APILL
- Pola kemacetan
- Estimasi panjang antrian
- Matriks asal tujuan yang selalu terupdate

3. Keuntungan Dari Evaluasi Lalu Lintas

Dengan menggabungkan fixed and mobile sensor, maka akan memberikan banyak peluang untuk mengembangkan algoritma prediksi lalu lintas yang lebih baik. Google telah memulai proyek ini dengan menambahkan google maps berupa beberapa fitur, seperti estimasi waktu tempuh, atau rute perjalanan terbaik. Juga banyak metode lain yang dapat digunakan untuk memprediksi lalu lintas, lebih tepatnya prediksi yang menggabungkan aspek temporal dan ruang.

4. Pengambil Data Menggunakan Simulator

Traffic Simulators juga dapat digunakan untuk menghasilkan parameter lalu lintas suatu kota yang tidak didapatkan dari sensor lalu lintas itu sendiri. Beberapa traffic simulator seperti Vissim, SUMO, Aimsun, Matsim dapat menampilkan kondisi lalu lintas dari data sampling, walaupun tingkat akurasi tidak tinggi. Beberapa parameter berikut yang dibutuhkan untuk analisis lalu lintas (reconstruct proper traffic analysis) :

- Volume kendaraan di beberapa titik
- Distribusi kecepatan kendaraan (dengan asumsi kondisi yang hampir sama di semua titik)
- Komposisi kendaraan (dengan asumsi kondisi yang hampir sama di semua titik)
- Turning Ratio
- Waktu siklus / waktu nyala hijau APILL di setiap persimpangan

Sensor lalu lintas merupakan suatu alat yang dapat menyediakan evaluasi kondisi lalu lintas kota secara akurat dan dapat diandalkan. Dengan adanya data lalu lintas dari fixed dan mobile sensors akan sangat membantu pemerintah mengatur lalu lintas yang lebih baik untuk kotanya. Meskipun suatu kota belum memiliki sensor, kota tersebut tetap dapat mengevaluasi dan menganalisis kondisi lalu lintas kota dengan tingkat akurasi yang rendah dengan menggunakan traffic simulators. Semua saran digunakan untuk membuat kondisi lalu lintas yang lebih baik di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun smart city di Indonesia.

D. Wajah Kota

Pengembangan wajah kota dapat dilakukan dengan cara pembangunan landmark sebagai ikon kota Madiun, penataan taman – taman kota, penambahan penanda jalan – jalan kota (signage), penambahan RTH di wilayah Kota, dan memastikan kebersihan kota. Sehingga dengan melihat wajah Kota Madiun yang indah, bersih, dan rapi semakin menambah ciri khas Kota Madiun sesuai dengan ikon Kota Madiun Kharismatik.

4.2.3 Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial adalah semua yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik, yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Dengan pembangunan infrastruktur social dapat meningkatkan perilaku sosial dan pola pikir masyarakat. Selain itu

infrastruktur social juga meliputi kesehatan dan pendidikan masyarakat. peningkatan infrastruktur sosial bertujuan untuk menjadikan masyarakat Kota Madiun menjadi lebih berkualitas. Pembangunan infrastruktur sosial dapat dilakukan dengan adanya komintas pemuda sadar wisata, pemberian pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, penegakan hukum yang ada di masyarakat, peningkatan pelayanan publik, kebijakan publik, dan terpenuhinya norma – norma yang ada di masyarakat.

4.3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City Kota Madiun

Pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan *Smart City*. Analisis kondisi pengembangan aplikasi dan perangkat lunak ini sebagai pijakan awal (*baseline*) sekaligus salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan paket-paket pekerjaan bidang TIK yang harus dilakukan selama lima tahun ke depan.

Selain itu, mengingat pengembangan aplikasi *Smart City* pada dasarnya merupakan pengembangan dari aplikasi *e-Government* yang lingkupnya mencakup skala integrasi sehingga disebut sebagai smart government, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem smart e-Government untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama atau interoperabel.

Disamping itu, sistem *e-Government* lingkup serta fungsinya juga cukup besar sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak pihak, baik pengembang maupun analis yang handal, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan smart e-Government yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi smart e-Government diperlukan standarisasi pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun pengembang sistem aplikasi. Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi smart e-Government:

a. Reliable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bebas bug/error.

b. Interoperable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.

c. Scalable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.

d. User Friendly

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan Bahasa dan budaya penggunanya.

Selain harus memenuhi standar yang harus dipenuhi, pembangunan sistem aplikasi memiliki tahapan yang dilakukan analisis untuk menentukan aplikasi apa saja yang akan diusulkan. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaan usulan aplikasi yaitu:

a. Penentuan Kelompok Urusan

Setiap urusan yang dimiliki oleh tiap OPD pada kota Madiun didapatkan dari RPJMD serta tupoksi yang mengatur untuk masing-masing kegiatan dalam OPD. Urusan yang telah berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan cakupan tugas dan wewenang. Di kota Madiun, terdapat 26 Dinas dan 3 Kecamatan yang telah dilakukan penggalan kebutuhan potensi sistem informasi pada tahun 2017. Tiap OPD memiliki berbagai jumlah urusan dan kelompok urusan yang berbeda-beda sesuai RPJMD dan tupoksi yang mengaturnya. Dalam tabel 4.2 disebutkan merupakan rekapitulasi data jumlah urusan, kelompok urusan dan jumlah sasaran RPJMD dari tiap OPD yang digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan aplikasi disetiap OPD.

Tabel 4.5 Total Kelompok Urusan

No	Nama OPD	Jumlah Urusan	Jumlah Kelompok Urusan	Jumlah Sasaran RPJMD
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	25	4	3
2.	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	62	3	1
3.	Badan Pendapatan Daerah	31	2	1
4.	Sekretariat Daerah Kota Madiun	67	6	4
5.	Sekretariat DPRD Kota Madiun	11	2	1
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	3	3
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	53	2	1
8.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro	77	3	1
9.	Dinas Kesehatan dan KB	99	4	3
10.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	56	3	1
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	14	2	0
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	17	3	0
13.	Dinas Pendidikan	81	3	3
14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46	2	2
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	20	4	1
16.	RSUD Sogaten Kota Madiun	32	3	1
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	63	2	1
18.	Satpol PP	56	3	1
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	53	3	1
20.	Inspektorat Kota Madiun	4	1	2
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57	5	3
22.	Dinas Lingkungan Hidup	51	4	1

No	Nama OPD	Jumlah Urusan	Jumlah Kelompok Urusan	Jumlah Sasaran RPJMD
23.	Dinas Perdagangan	78	2	1
24.	Dinas Tenaga Kerja	27	2	1
25.	Dinas Perhubungan	45	3	1
26.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	104	3	1
27.	Kecamatan	13	5	3
TOTAL		1256	81	43

Berdasarkan informasi pada tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah urusan pada semua OPD adalah 1256 urusan, dimana setelah dilakukan pengelompokan urusan terbagi menjadi 81 kelompok urusan.

b. Daftar Aplikasi dalam Masterplan eGovernment dan Kaitannya dengan Dimensi Smart City

Kota Madiun telah mempunyai rencana pembangunan eGovernment yang termuat dalam masterplan e-Government. Pada tabel dibawah ini diuraikan aplikasi apa saja yang diusulkan sebagai acuan pengembangan di setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan keterkaitannya dengan dimensi-dimensi Smart City Kota Madiun

Tabel 0.3 Sebarang usulan aplikasi Kota Madiun 2019 - 2023

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
1.	SIM Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Standarisasi terhadap halal, merk, barcode, SNI, hak cipta, nutrisi, uji kelayakan, perizinan masuk mall, pameran industri, pengembangan produk dan kerja sama dengan IKM	Smart economy
2.	e-Izin	Dinas PU dan Tata Ruang	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendaftaran perizinan mendirikan bangunan	Smart governance Smart environment

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			<p>perairan, penggunaan tanah pengairan dan air permukaan</p> <p>Fitur :</p> <p>Perizinan online</p> <p>Approval via aplikasi</p> <p>Pelayanan berbasis online</p> <p>Izin Pembangunan Sumur Dalam</p> <p>Izin Melakukan Irigasi</p> <p>Izin Pembongkaran Saluran Drainase</p> <p>Izin penyedia air minum</p>	
3.	SIMPEDAL (Sistem Informasi Penanaman Modal)- MIS	DPMTSP	<p>Sistem informasi berbasis website yang menjadi portal bagi masyarakat yang ingin melakukan penanaman modal di kota Madiun. Pada SIMPEDAL diberikan informasi yang lengkap tentang prosedur bagaimana mengajukan penanaman modal beserta simulasi pendapatan hasil investasi bagi investor.</p> <p>Fitur :</p> <p>Informasi penanaman modal Modul yang menyediakan seluruh informasi terkait kebijakan, prosedur, dan alur penanaman modal yang ada pada kota Madiun</p> <p>Pendaftaran penanaman modal Modul yang mengakomodir pendaftaran penanaman modal secara online bagi investor di kota Madiun</p>	Smart economy smart branding

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
4.	Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Sistem informasi pengelolaan data pembayaran pajak daerah Fitur : Pendataan pelayanan pajak harian Pengelolaan data pajak daerah Grafik laporan pembayaran masyarakat tiap tahun	Smart governance
5.	SISTEM INFORMASI KARTU PAJAK NON PBB	Badan Pendapatan Daerah	aplikasi mengenai pendaftaran dan pendataan pajak non PBB	Smart governance
6.	SIM Monitoring dan Pelaporan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Masa kerja, urusan keputungan TKI, permasalahan yang dihadapi, pemberdayaan setelah purna TKI	Smart society smart economy
7.	e-Health	Dinas Kesehatan	Aplikasi informasi kesehatan online Fitur : Data jenis penyakit Pencarian penyakit Rekomendasi obat	Smart society Smart living
8.	Aplikasi Perijinan	Dinas Perdagangan	Sistem informasi perizinan dinas terintegrasi dengan DPMPTSP Fitur : Rekomendasi perijinan usaha Surat izin usaha perdagangan	Smart governance Smart economy
9.	SIPANDU	Dinas Perumahan dan permukiman	Sistem informasi peta pandu perumahan dan permukiman berbasis GIS	Smart living smart governance

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
10.	Sistem Informasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil	Mirroring data kependudukan dan pencatatan sipil dari pusat	Smart governance
11.	SIM Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<p>Sistem informasi Jasa Konstruksi merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas untuk pengendalian perbaikan dan pemeliharaan gedung, bangunan, dan lingkungan.</p> <p>Fitur :</p> <p>Data keluhan atau aspiran masyarakat terkait bidang jasa konstruksi</p> <p>Data gedung, bangunan, dan sapras umum</p> <p>Data perbaikan dan pembangunan sesuai bidang</p> <p>Dashboard terkait gedung, bangunan, dan lingkungan</p>	Smart governance Smart living
12.	SIM PJJ (Pelaporan Jalan Jembatan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sistem informasi untuk melaporkan mengenai kondisi jalan dan jembatan yang dapat disertai dengan bukti yang mendukung seperti foto	Smart living
13.	Sistem Informasi Administrasi Nikah	Kecamatan	<p>Sistem informasi pendataan pernikahan</p> <p>Fitur :</p> <p>Pencarian data pernikahan</p> <p>Pendataan pernikahan</p> <p>Pengajuan pernikahan</p>	Smart living

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
14.	Integrasi layanan publik di OPD tingkat kota dengan kecamatan dan kelurahan	Kecamatan	Integrasi layanan publik di OPD tingkat kota dengan kecamatan dan kelurahan	Smart governance
15.	SIM Ketertiban	SATPOL PP	Sistem informasi pelaporan jika ada kerusuhan di sekitar warga	Smart society
16.	Website Promosi hasil produk industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Website Promosi hasil produk industry Fitur : GIS sebaran hasil produk berdasarkan titik kota Gallery foto hasil produk Info kontak pembelian hasil produk	Smart branding smart economy
17.	SIM Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan	Sistem informasi untuk memberikan kuesioner secara online untuk keluarga yang kemudian akan ada fitur rekap hasil kuesioner	Smart living
18.	EMAIL CAMPAIGN	DPMPPTSP	Mempromosikan sektor usaha kota Madiun yang mampu untuk dilakukan investasi melalui email kepada stakeholder potensial.	Smart economy smart branding
19.	SOCIAL MEDIA CAMPAIGN	DPMPPTSP	Mempromosikan sektor usaha kota Madiun melalui media sosial dimana informasi selalu up-to-date.	Smart economy smart branding
20.	SMS Gateway	DPMPPTSP	Mempromosikan peluang investasi kota Madiun melalui penyebaran SMS ke stakeholder potensial.	Smart economy smart branding

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
21.	Website kota Madiun (menambahkan submenu investasi dan penanaman modal)	DPMPTSP	Pada website utama kota Madiun terdapat submenu mengenai "Investasi dan Penanaman Modal". Pada submenu tersebut berisi informasi mengenai gambaran umum sektor usaha yang potensial untuk investasi. Halaman submenu dibubuhkan link untuk menuju ke SIMPEDAL	Smart economy smart branding
22.	Aplikasi proposal bantuan tempat ibadah	Sekretaris Daerah	Aplikasi pengajuan proposal bantuan tempat ibadah	Smart society
23.	SMS Gateway	Dinkominfo	Pelayanan melalui SMS langsung ke dinas Diskominfo	Smart society
24.	SIM Rekomendasi Izin Usaha	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi rekomendasi izin usaha Fitur : Approval rekomendasi Pengiriman rekomendasi	Smart economy smart governance
25.	Simponi	Dinas Sosial	aplikasi ini digunakan untuk pencatatan pengaduan KDRT dan diperlukan pengembangan fitur peaporan secara mandiri dan histori penanganan.	Smart society smart living
26.	Sistem Siaga Bencana	BPBD	Sistem Informasi Manajemen untuk keperluan tanggap bencana, sistem ini dapat menyajikan lokasi-lokasi rawan bencana dan dapat memuat laporan dari masyarakat mengenai	Smart living

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			musibah bencana seperti banjir dan lain-lain	
27.	e-Arsip	Perpustakaan	Sistem Informasi Manajemen yang dapat berfungsi untuk menyimpan dan mencari arsip, artikel dan arsip dalam bentuk lain yang mencakup letak arsip secara fisik dan isi dari arsip tersebut. Terdapat data arsip, mulai dari naskah, status, hak akses, retensi, lokasi penyimpanan, dan sebagainya. Semua OPD bisa input daftar arsipnya, beserta pengkategorianya apakah termasuk arsip aktif, inaktif, statis, atau dinamis.	Smart society
28.	Inslite	Perpustakaan	Sistem informasi pelayanan perpustakaan Fitur : memberikan feedback maupun kuisoner online untuk pengukuran indikator kinerja menampilkan statistik kunjungan dan IKM kuisoner online IKM generate hasil IKM dalam csv/xls	Smart governance smart society
29.	Bank Data Kesehatan	Dinas Kesehatan	Sistem informasi kesehatan masyarakat Fitur : Rekam medis terintegrasi Data ketersediaan dan fungsi obat Inventory KB	Smart living

Tahun 2019				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
30.	SI Penyusunan	BPKAD	Mendukung penyusunan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, RKA-SKPD, RKPA-SKPD. Dapat memberikan notifikasi ke OPD melalui email / sms untuk menyerahkan dokumen.	Smart governance
31.	DSS SKPD	BPKAD	Dapat melakukan analisa history pengeluaran setiap OPD setiap triwulan OPD input data	Smart governance
32.	SIM Pelayanan Perijinan	Dinas Perhubungan	Sistem informasi pelayanan dinas perhubungan Fitur : Pelayanan ijin trayek Perizinan angkutan Database angkutan	Smart governance smart living
33.	SIM PKB	Dishub	Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor	Smart environment

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
1.	Integrasi SIGMA dengan SIG	BPKAD	Integrasi data aplikasi SIGMA dengan SIG dengan berbagi data 'aset'	Smart governance
2.	Integrasi SIM Rekonsiliasi Aset Daerah dengan SIPKD	BPKAD	Integrasi SIM Rekonsiliasi Aset Daerah dengan SIPKD dengan berbagi data 'aset'	Smart governance
3.	SIM ORMAS	Bakesbangpol	Sistem informasi pendataan organisasi masyarakat Fitur : Pendaftaran organisasi masyarakat Perpanjangan ormas	Smart Society

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			Pendataan organisasi masyarakat Penyuluhan organisasi masyarakat Informasi kegiatan ormas	
4.	SIM ijin Penelitian	BaKesbangpol	sistem informasi pendaftaran survei/penelitian, daftar pengajuan penelitian, laporan survey	Smart society
5.	SIM Pelayanan RSUD	RSUD	Mengelola data dan mengontrol layanan yang ada di tiap RSUD Masyarakat bisa akses daftar layanan yang disediakan masing masing RSUD Fitur : Pendaftaran online Pendataan pasien Pendataan kamar inap Rekam medis pasien Dll	Smart living
6.	Sistem Informasi Manajemen Pegawai	Sekretariat DPRD	sistem informasi berisikan mengenai cuti, form ijin kawin/cerai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pensiun, pindah antardaerah, pengangkatan, buku induk pegawai, permintaan karis/karsu, hukuman disiplin	Smart governance
7.	DSS Seleksi & Monitoring guru dan kepala sekolah	Dinas Pendidikan	Melakukan kepala sekolah. Menampilkan persyaratan calon kepala sekolah. Calon kepala sekolah dapat melakukan pendaftaran. Sistem melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah dimasukkan sebelumnya. Menampilkan hasil rekomendasi seleksi. Admin dapat memilih kepala sekolah	Smart society smart governance

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			berdasarkan rekomendasi sistem. Menampilkan kepala sekolah yang terpilih, sekaligus diklat nya. Bekerja sama dengan LPPKS untuk diklat	
8.	SI Administrasi Guru dan Tendik	Dinas Pendidikan	Membantu dalam urusan administrasi guru dan tendik, seperti pembuatan surat perintah tugas, surat izin belajar, maupun surat izin cuti. Mengintegrasikan data berkas usulan penerbitan surat perintah tugas hingga berkas usul izin cuti, hingga menjadi dokumen surat perintah tugas maupun dokumen surat izin cuti. Sistem otomatis mengecek kelengkapan berkas, dan menampilkan peringkatan kekurangan berkas. Sistem juga memiliki reminder melalui SMS untuk mengisi kelengkapan berkas. Bekerja sama dengan BPKAD yang dapat melihat data, untuk keperluan pengambilan keputusan atas tidak masuk kerja	Smart governance
9.	DSS Perijinan Sekolah, PAUD, Lembaga	Dinas Pendidikan	Menerima permintaan perijinan dan berkas pemohon, melakukan seleksi dan meneruskan bila memenuhi syarat, melakukan verifikasi (checklist verifikasi), penilaian berdasarkan indikator yang dipenuhi. Mengenerate berita acara yang akan dijadikan dasar penerbitan rekomendasi ke walikota. Bila diterima	Smart governance smart living

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			walikota, maka diupdate data status nya di aplikasi, mengarsipkan SK Pendirian dari Walikota di aplikasi, dan menyampaikan SK Pendirian ke pemohon. Penerusan permohonan perijinan berdasarkan tipe sekolah (ke kemenag atau kemendikbud) Memberikan peringatan untuk sekolah yang perijinan nya rawan dicabut. Terintegrasi dengan SI Monitoring Sekolah, sebagai sumber data performa tiap sekolah.	
10.	SIM Monitoring Sekolah	Dinas Pendidikan	Monitoring performa tiap sekolah. Sekolah memasukkan data sesuai template melalui aplikasi berbasis website. TU yang jugaa admin, akan mendapatkan notifikasi sms ketika memasukkan data, sekaligus apabila belum mengumpulkan data (mendekati deadline dan ketika melewati deadline). Pada halaman awal, terdapat daftar sekolah yang belum memasukkan penilaian serta 5 sekolah tertaat, sehingga sekolah dapat termotivasi untuk mengumpulkan data. Terdapat data hasil UN, sehingga bisa analisa hasil UN tiap sekolah. Menampilkan kurikulum dasar dan wajib untuk sekolah, yang dikelola OPD. Terdapat fitur memasukkan data kurikulum, sehingga OPD juga dapat	Smart governance smart living

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			melakukan monitoring atas kurikulum tiap sekolah. Sekolah dapat melihat kurikulum tahun sebelumnya, dan melakukan perubahan kurikulum berdasar data sebelumnya (sehingga, apabila tidak ada perubahan tidak perlu menulis dua kali). Terintegrasi dengan Dapodik, yang terdapat kurikulum tiap sekolah	
11.	SIM Sarana Prasarana & monitoring sarana prasarana	Dinas Pendidikan	Monitoring sarana prasarana sekolah. Inventarisasi sarana prasarana. Salah satu syarat indikator perijinan sekolah. Generate laporan. Terintegrasi dengan DSS Perijinan Sekolah. Koordinasi dengan BPKAD	Smart governance smart living
12.	Dashboard Informatif Curah Hujan, Lahan Sawah, dan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Halaman yang menyajikan informasi curah hujan, lahan sawah, dan jaringan irigasi	Smart environment
13.	SIK	BKD	aplikasi adminitrasi kepegawaian, permintaan pengembangannya yaitu adanya SIK versi mobile	Smart governance
14.	Sistem Pelaporan Online Koperasi	DPMPTSP	Sistem informasi pelaporan koperasi secara keseluruhan Fitur : Laporan kegiatan Laporan rutin Pengaduan Monitoring	Smart economy
15.	Data Center BAPPEDA	Bappeda	web based , berisi lokasi penyimpanan semua file BAPPEDA, untuk	Smart governance

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			memudahkan membagi data dan mencegah data hilang karena kerusakan maupun kehilangan hardware. [modul kegiatan] web based , berisi data center mengenai siapa saja kontraktor, pelaksanaam kegiatan, dsb; memberikan notifikasi untuk hal hal yang ganjal	
16.	e-Controlling	Bappeda	Dipakai untuk melihat selisih antara perencanaan dengan realisasi. Terintegrasi antara e-Planning kegiatan dengan SI Realisasi. Dengan fokus utama untuk me-monitor dan evaluasi proses pelaksanaan program, khususnya program yang berhubungan dengan sosial, budaya, dan pemerintahan. CRUD program. Terdapat kode, nama, rencana, mau pun realisasinya. Fitur : Perencanaan Fisik dan Prasarana Perencanaan dan Perekonomian Perencanaan Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan	Smart governance
17.	SIM Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata	Sistem informasi pengelolaan data usaha pariwisata Fitur : (masyarakat) mengajukan proposal sebagai mitra usaha pariwisata, dimana akan	Smart branding Smart economy

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			Terintegrasi dengan SIM Daya Tarik Wisata. (OPD) melihat daftar proposal, menyetujui atau pun menolak. daftar usaha pariwisata. log aktivitasnya. log dan dashboard performa.	
18.	E-CHAMPIONSHIP	Dinas Pariwisata	Aplikasi yang memfasilitasi kegiatan pengembangan potensi di bidang pemuda dan olahraga seperti kejuaraan turnamen, kejuaraan pramuka , dan sejenisnya	Smart society
19.	SI Monitoring Berita	Dinkominfo	mengelompokkan berita berita yang terkait dengan isu kota madiun di seluruh portal berita dan sosmed menggunakan kata kunci, sehingga apabila suatu konten berita terdapat kata kunci yang telah diidentifikasi, maka berita tersebut akan dikelompokkan sesuai kata kunci tersebut. Data dari pengelompokan data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan.	Smart society Smart living
20.	Dashboard pengolahan aduan masyarakat	Dinkominfo	Aplikasi yang membantu statistik mengenai pengaduan masyarakat yang sudah diterima oleh kominfo kemudian dapat di convert menjadi sebuah laporan.	Smart governance
21.	Aplikasi Service Desk	Dinkominfo	melakukan fungsi service desk. menerima pengaduan insiden teknologi informasi.	Smart governance
22.	SIM Daftar Domain Masyarakat	Dinkominfo	Aplikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan	Smart society

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			domain gratis di kominfo. berisi modul untuk mengupload data data yang dibutuhkan untuk mendaftar	
23.	SI Filtering	Dinkominfo	daftar konsep dan konten negatif	Smart society
24.	SIM Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	<p>Sistem keseluruhan layanan pertanian.</p> <p>Fitur :</p> <p>(untuk masyarakat) pengendalian hama, perbenihan pangan, hortikultura, tanaman semusim, tahunan. jadwal sosialisasi ke masyarakat, informasi bimbingan dan pembiayaan. daftar pertanian dan sertifikasinya.</p> <p>(untuk opd) Analisa usaha pertanian. peta penyebaran pertanian tiap daerah.</p> <p>Tracking subsidi ke petani (daftar petani, jumlah subsidi yang dianggarkan, jumlah yang telah diterima, log).</p> <p>Tracking asuransi ke petani terintegrasi dengan SIM Asuransi.</p> <p>dashboard statistik jumlah pertanian dan hasilnya. SIM HPP (Hasil Pertanian dan Perkebunan)</p>	Smart economy Smart environment
25.	Aplikasi Perumahan	Dinas Perumahan dan permukiman	<p>Aplikasi untuk mengelola data perumahan</p> <p>Fitur :</p> <p>Pencarian letak perumahan</p>	Smart environment

Tahun 2020				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			GIS letak perumahan Saprasi, Taman	
26.	SIM PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dinas Pariwisata	Pencatatan seluruh kegiatan di bidang pemuda dan olahraga, pencatatan kejuaraan yang diperoleh, pencatatan jumlah atlet dan aktivis pramuka, dll	Smart society
27.	KNOWLEDGE MANAGEMENT PEMUDA DAN PRAMUKA	Dinas Pariwisata	Sistem informasi yang menyimpan sumber pengetahuan tentang seluruh informasi pemuda dan pramuka di kota Madiun	Smart society
28.	DASHBOARD PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dinas Pariwisata	Bentuk visualisasi data warehouse sehingga dapat diketahui jumlah kegiatan di bidang pemuda dan olahraga, peningkatan program pengembangan pemuda dan olahraga, dll	Smart society

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
1	SIM Asuransi	Dinas Pertanian dan Pangan	(masyarakat) mendaftar asuransi. katalog paket asuransi. mengajukan asuransi. melakukan pembayaran asuransi. melihat status asuransi. notifikasi sms ketika h-3 deadline pembayaran per bulan, dan petani belum membayar. (OPD) CRUD paket asuransi, tracking, daftar pembayaran dan klaim. daftar petani yang telat membayar.	Smart economy Smart society

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
2	SIG PBB	Badan Pendapatan Daerah	aplikasi mengenai peta daerah, perlu pengembangan pada fitur update peta block	Smart economy
3	Aplikasi Pemilah Gender	Dinas Sosial	aplikasi ini digunakan untuk menginputkan data gender masing-masing OPD dan mampu untuk memilah data dan menghasilkan laporan mengenai gender	Smart society
4	aplikasi input data PKK	Dinas Sosial	digunakan untuk menyimpan data mengenai PKK dan kegiatannya	Smart society
5	website forum anak kota madiun	Dinas Sosial	website memiliki fitur CSR bagi lembaga yang ingin berpartisipasi	Smart society
6	SIM Evaluasi Kerja Siaga Bencana	BPBD	Sistem yang berisi pencatatan dan pelaporan kinerja terkait evaluasi kerja siaga bencana Fitur : Pelaksanaan penanggulangan bencana pelaksanaan pemberian bantuan detail waktu terjadinya bencana hingga waktu usainya bencana status penanganan bencana (tertangani, tertunda dll) detail korban bencana yang terintegrasi dengan dispendukcapil detail sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana yang	Smart environment

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			terintegrasi dengan Dinas PU	
7	TPS Control Arsip	Dinas Perpustakaan	SI memasukkan data kondisi arsip. Juga dapat melakukan autentikasi arsip, dimana jika ada arsip foto jaman dulu, maka foto itu perlu dideskripsikan mengenai peristiwa nya apa , kapan, dimana, mendeskripsikan kejadian, pelakunya siapa.	Smart governance
8	SIM Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	website online (juga ada versi mobile), Fitur: diakses pengunjung perpustakaan memiliki katalog online	Smart governance
9	Website UMKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pemasaran/promosi UMKM, pemasaran produk UMKM	Smart economy
10	SIM Monitoring IKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sistem informasi yang mampu untuk membantu dalam memonitoring IKM	Smart governance
11	Web Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pendaftaran TKI dan Lembaga kerja di sekitar daerah Madiun	Smart economy
12	SIM Laporan Penyakit	Dinas Kesehatan	Sistem pendataan dini ODGJ, narkoba, diabetes melitus, hipertensi (keluarga rawan & tidak rawan)	Samrt living
13	SIM Antrian Online	Dinas Kesehatan	Kategori pasien dan keluhan pasien	Smart governance smart living
14	SIM Pengaduan Pasar	Dinas Perdagangan	Sistem informasi yang memungkinkan pengguna	Smart economy

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			pasar untuk dapat melakukan pengaduan terkait dengan pelanggaran, ketertiban, kenyamanan, keamanan pasar maupun sarana dan prasarana pasar.	
15	Data Restribusi Pasar	Dinas Perdagangan	Penyimpanan data-data mengenai retribusi pasar	Smart governance
16	Knowledge Management System KESBANGPOL	Bakesbangpol	KMS mengenai ketahanan ideologi negara, bela negara, hak asasi manusia, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan	Smart society
17	Sistem Informasi Kepegawaian RSUD	RSUD	memiliki data mengenai pendidikan, pangkat, jabatan, riwayat keluarga, diklat, penghargaan, NIK, Cuti, Ijin belajar setiap pegawai RSUD	Smart governance
18	SIM Keuangan RSUD	RSUD	pengelolaan data belanja dan pendapatan (tagihan) RSUD. Memasukkan data transaksi pasien yang menghasilkan pendapatan yang diterima dan dibandingkan dengan pendapatan yang seharusnya diterima	Smart governance smart living
19	Sistem Informasi Aspirasi	Sekretariat DPRD	Sistem informasi yang akan mengumpulkan data aspirasi masyarakat	Smart governance smart society
20	DSS Pengusulan Satya Lencana	Dinas Pendidikan	Memberikan rekomendasi guru yang akan menerima penghargaan satya lencana. Menerima input usulan satya lancana, yang akan diperiksa oleh JFU,	Smart living Smart governance

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			dan dapat diteruskan ke Kasubag. Kasubag melakukan pemeriksaan, dan dapat diteruskan ke Staf sehingga dapat diproses dan diteruskan ke BKD. Sistem menyimpan setiap log aktivitas. Bekerja sama dengan BKD yang menerima usulan satyla lancana	
21	DSS Beasiswa Sekolah	Dinas Pendidikan	Menerima penawaran beasiswa dan menampilkan. Sekolah menerima notifikasi beasiswa baru. Siswa dapat melakukan pendaftaran beasiswa melalui aplikasi. Aplikasi dapat melakukan penyaringan beasiswa (untuk tahap 1 atau seleksi tahap berkas administrasi) secara otomatis. Siswa yang telah diterima atau lolos seleksi beasiswa akan mendapatkan surat keterangan yang digenerate otomatis oleh aplikasi, dan sekolah yang bersangkutan dapat melihat jumlah siswa yang lolos dari sekian pendaftar. Koordinasi dengan LPM	Smart living Smart governance
22	TPS Pencatatan Rekam Kedisiplinan Siswa	Dinas Pendidikan	Mencatat siswa yang melakukan pelanggaran kedisiplinan beserta hukumannya. Satpol PP dapat melakukan pencatatan pelanggaran.	Smart living smart society

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			Kerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan Sekolah yang terhubung.	
23	DSS Perijinan Kegiatan Lembaga	Dinas Pendidikan	Menerima proposal perijinan dari lembaga. Muncul notifikasi dan peringatan bahwa proposal tidak bisa diteruskan apabila ada berkas atau dokumen yang kurang lengkap. OPD dapat melakukan survey dan memasukkan hasil survey serta memberi catatan. Sistem dapat memberikan rekomendasi apakah ijin diberikan atau tidak.	Smart society smart governance
24	SIM IMB	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sistem informasi untuk dapat melihat status dan detail dari tiap IMB	Smart governance smart living
25	SIM TRB	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sistem informasi Tata Ruang dan Bangunan yang merupakan aplikasi berbasis web Fitur: Data pemetaan tata ruang dan bangunan Data pembangunan ruang dan bangunan Dashboard ruang dan bangunan Data inventarisasi harga bangunan gedung	Smart governance smart living
26	APLIKASI INVENTARISASI BARANG KANTOR	Kecamatan	Sistem informasi yang mengolah data aset dan inventaris kantor kecamatan	Smart governance

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
27	JAGA	DPMPTSP	Update informasi yang ada pada aplikasi JAGA beserta aktivitas yang dilakukan DPMPTSP kota Madiun terkait penanaman modal dan perizinan	Smart economy
28	E-KERJASAMA PENANAMAN MODAL - MIS	DPMPTSP	Aplikasi internal Dinas Penanaman Modal yang berperan untuk mencatat hubungan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dengan instansi lain di kota Madiun	Smart governance
29	E-UMKM - MIS	DPMPTSP	Aplikasi mencatat dan menganalisa data penanaman modal dan pelaku usaha di kota Madiu	Smart economy smart governance
30	SIM Evaluasi Satpol PP	SATPOL PP	Memonitor performa setiap pegawai. Setiap aktivitas yang dilaksanakan pegawai, akan dicatat, dan diberikan skor. Sistem juga dapat menampilkan daftar semua pegawai serta skor yang didapat, berdasarkan skor tertinggi, mau pun berdasarkan departemennya. Setiap bulan, pegawai dengan skor tertinggi dapat diberikan apresiasi. Selain itu, setiap pegawai masuk, maka harus absen melalui finger print atau pun handkey. Terdapat laporan kedisiplinan setiap pegawai dan skor yang didapat (setiap keterlambatan,	Smart governance

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			absen, pulang lebih awal akan mendapat pengurangan skor) (terintegrasi dengan E-Performance BKD)	
31	Integrasi perijinan	SATPOL PP	Integrasi perijinan dengan DPMPTSP	Smart governance
34	E-COMMUNITY	Dinas Pariwisata	Aplikasi yang menyediakan informasi komunitas bidang pemuda dan olahraga yang ada di Kota Madiun sehingga masyarakat dapat selalu mengupdate informasi terkini tentang aktivitas pengembangan kemampuan di setiap komunitas yang difasilitasi oleh DISPORA maupun instansi yang lain	Smart society
37	SIM Pasar	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi yang memberikan informasi dan analisis harga pasar	Smart living
38	SIM Peternakan	Dinas Pertanian dan Pangan	Terdapat berbagai informasi mengenai : (untuk masyarakat) edukasi peternakan, pengolahan, investasi, Alur / jalur peredaran benih / bibit ternak, Daftar mitra yang bisa bekerjasama bidang peternakan, jadwal sosialisasi, informasi bimbingan dan pembiayaan, Daftar peternak dan sertifikasinya, Komoditas hasil peternakan (untuk opd) analisa usaha ternak.	Smart living

Tahun 2021				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			penyebaran pengembangan ternak.	
39	ADAKAU (aplikasi data kualitas air dan udara)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem informasi analisis data kualitas air dan udara	Smart environment

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
1	SIM Penanggulangan Wabah	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi yang dapat menampilkan berbagai wabah yang ada beserta dengan penanggulangannya	Smart environment
3	Aplikasi Pendataan PMKS dan PSKS	Dinsos	Aplikasi yang akan membantu pendataan PMKS dan PSKS	Smart living
4	Sensor Banjir	BPBD	Sensor yang digunakan untuk membantu memantau ketinggian debit air di sungai-sungai yang berada di kota Madiun. Mengirimkan sinyal sungai mana saja yang ketinggian air nya melewati batas normal	Smart environment
5	SIM Rencana Kegiatan Tahunan	Inspektorat	Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)	Smart governance
6	Dashboard persebaran daerah transmigrasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dashboard ini dapat memetakan beberapa informasi mengenai : daerah yang paling banyak dituju untuk transmigrasi	Smart environment

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			data gaji di daerah target transmigrasi	
7	SIM pengangguran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sistem informasi pendaatan pengangguran dalam kota Madiun	Smart economy
8	SIMDA BMD	BPKAD		Smart governance
9	SIM Persediaan	BPKAD	Sistem informasi yang memproses data persediaan barang	Smart governance
10	GIS Angkutan Umum	Dishub	Sistem informasi untuk melakukan monitoring terhadap angkutan yang sedang beroperasi, mengetahui peta angkutan, mengetahui jumlah angkutan umum yang beroperasi pada suatu wilayah	Smart living
11	SIM Pembukuan	Dinas Perdagangan	Pengolahan form kwitansi pembayaran, pengecekan form kwitansi pembayaran, cross check hasil pelaporan pembayaran, rekapitulasi retribusi yang terintegrasi antara bagian pasar, pembukuan, bendahara pemasukan dan retribusi	Smart governance
12	SIM Evaluasi Lembaga Kursus	Dinas Pendidikan	Mendata lembaga kursus untuk evaluasi akreditasi lembaga. Menetapkan standar minimum yang harus dimiliki lembaga untuk tiap kategori akreditasi Terintegrasi dengan DSS Perijinan Sekolah, PAUD, Lembaga. Kerja sama dengan BAP	Smart society

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			(Badan Akreditasi Provinsi) dalam hal akreditasi	
13	Aplikasi Pemantauan	PUTR	Aplikasi yang berguna untuk memantau sumber daya air dan drainase	Smart environment
14	Aplikasi Pengecekan Fasilitas	PUTR	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan pengecekan terhadap fasilitas jalan, jembatan, drainase, dll	Smart environment
15	Aplikasi Pemantauan Pintu Air	PUTR	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap pintu air	Smart environment
16	Simjab	Sekretariat Daerah	Sistem informasi jabatan	Smart governance
18	SIM LINMAS	Satpol PP	Sistem informasi pengelolaan linmas	Smart society
19	Aplikasi CCTV khusus Satpol PP	Satpol PP	Aplikasi pemantauan CCTV khusus oleh Satpol PP	Smart society
21	SIM Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Ternak	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi yang dapat membantu dalam pemeriksaan dan pengobatan hewan ternak. Fitur : Terdapat berbagai informasi mengenai daftar pemeriksaan yang perlu dilakukan, penyakit hewan ternak beserta gejalanya, pengobatan yang dapat dilakukan terhadap gejala hewan yang sakit, historis pemeriksaan, historis pengobatan SIM Kesejahteraan Hewan ??	Smart economy

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			SIM Penyakit Hewan ?? SIM Pemeriksaan Higienitas ??	
22	SIM Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Menampilkan peta rawan pangan, peta pola konsumsi pangan, alur / jalur distribusi pangan, angka konsumsi pangan per daerah, angka cadangan pangan per daerah dan provinsi (jumlah target, jumlah yang ada, selisihnya) dalam bentuk dashboard, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, PPH (Pola Pangan Harian), tingkat konsumsi, NBM (Neraca Bahan Makanan). Selain itu, juga terdapat daftar pangan dan harga di tingkat produsen dan konsumen, baik target (harapan) maupun realisasinya.	Smart economy Smart living
23	SISMIOP	Badan Pendapatan Daerah	merupakan aplikasi terkait pelayanan PBB, perlu adanya pengembangan terkait fitur summary secara otomatis, diintegrasikan dengan pemeriksaan di lapangan	Smart governance smart economy
24	SIM Monitoring & Maintenance Fasilitas Penanganan Bencana	BPBD	Sistem pencatatan, pelaporan, monitoring dan maintenance fasilitas penanganan bencana Fitur : Data pos pantau Kendaraan pantau pendistribusian bantuan logistik	Smart society

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			Barang-barang siaga bencana lainnya	
25	SIM Rehabilitasi dan Rekonstruksi (MIS)	BPBD	Aplikasi yang dapat menyediakan perencanaan, dokumentasi, seta formulir untuk kegiatan rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait bencana daerah. Fitur: Penyusunan Proposal Reaksi (Rencana Aksi) Penyusunan Anggaran Halaman dokumentasi	Smart society
26	Aplikasi Pelaporan	Inspektorat	Aplikasi yang dilengkapi dengan fitur checklist, SIM Pemeriksaan yang dapat digunakan untuk memeriksa RFK setiap bulan dan dapat memberi laporan temuan pemeriksaan sehingga OPD yang bersangkutan juga dapat memeriksa.	Smart governance
27	SIM Audit	Inspektorat	Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk mengelola dan memantau hasil-hasil pemeriksaan, termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditan (objek pemeriksaan) secara efektif	Smart governance
28	SIM Pelaporan LKJ	Inspektorat	Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk mengelola pelaporan kinerja instansi	Smart governance
29	SIM Monitoring Sarana dan Prasarana Pasar	Dinas Perdagangan	Sistem pencatatan dan pelaporan untuk mempermudah dalam	Smart living

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.	
30	Sistem Informasi Penjadwalan	Sekretariat DPRD	sistem informasi berfungsi untuk menampilkan jadwal rapat, menyimpan jadwal rapat, menyimpan risalah rapat, catatan rapat, list opd yang hadir, tema/judul rapat dan daftar hadir	Smart governance
31	Website publikasi naskah	Sekretariat DPRD	berisikan naskah yang telah disetujui	Smart governance
32	Sistem undangan elektronik	Sekretariat DPRD	sistem memiliki fitur untuk ttd elektronik, data undangan, pengiriman undangan, data opd	Smart governance
33	SIM Sosialisasi tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	Mengundang tenaga tendik dalam sosialisasi. Bekerja sama dengan BKD, yang memiliki program pembinaan	Smart governance
34	DSS Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional	Dinas Pendidikan	Memberikan rekomendasi sekolah penyelenggara berdasarkan indikator yang diinginkan dan data performa tiap sekolah. Menampilkan skor penilaian tiap sekolah. OPD dapat menetapkan sekolah penyelenggara. Data dilakukan secara online, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi. Terdapat forum diskusi atau komentar, sehingga dapat melakukan diskusi meskipun tidak berada pada waktu yang sama.	Smart governance

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			Terintegrasi dengan SI Monitoring Sekolah, yang memiliki data performa tiap sekolah. Koordinasi dengan Puspendik.	
35	SIM Kegiatan Sekolah	Dinas Pendidikan	Koordinasi Penjadwalan pembinaan siswa sekolah tentang kepedulian kedisiplinan, kesehatan, dan lingkungan oleh OPD terkait. Termasuk pembinaan usaha kesehatan untuk siswa dan guru oleh Dinas Kesehatan. OPD terkait dapat memasukkan jadwal ketersediaan mereka Kerja sama dengan Dinas lingkungan hidup, kepolisian, PU, Kesehatan, Pertanian, Pemerintah kota, mengenai jadwal ketersediaan mereka.	Smart governance
37	SI Manajemen Pelaporan Kegiatan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem informasi pelaporan dari kegiatan usaha ke dinas	Smart environment
38	Dashboard Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Halaman yang akan memberikan informasi proses pengelolaan sampah	Smart environment
39	Upgrade Sipandu (2019)	Dinas Perumahan dan permukiman	Integrasi dengan dukcapil untuk verifikasi warga; atau setiap kelurahan mempunyai kode supaya laporan mendapatkan prioritas penyelesaiannya (kode = pelapor sudah terverifikasi). Namun, warga biasa tetap dapat melaporkan langsung secara mudah, dengan melewati aplikasi mobile dan	Smart society

Tahun 2022				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			mengirimkan foto sebagai bukti (sistem otomatis mendapatkan lokasi mobile pelapor). Ada ontrolling kualitas (dashboard layanan publik yang keluhan terbanyak)	

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
1	Aplikasi Data Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang dapat menampilkan data-data mengenai gedung pemerintah	Smart governance
2	Aplikasi List Kelengkapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang digunakan untuk mengecek kelengkapan dari gedung dan bangunan	Smart governance
3	Aplikasi List Progress Pemantauan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang dapat menunjukkan mengenai progres dari pemantauan yang sudah dilakukan ke lapangan	Smart governance
4	SIM Kebutuhan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sistem informasi untuk dapat mengelola kebutuhan dan menyesuaikan PAK dengan kebutuhan anggaran, Fitur: data anggaran data inventaris data pengadaan data PAK	Smart governance
5	Aplikasi update informasi	BKD	aplikasi mampu memberikan informasi	Smart governance

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
	ketersediaan gedung diklat		mengenai gedung diklat yang masih tersedia beserta dengan tanggal dan waktunya, mengupdate data ketersediaan gedung diklat, menginputkan data gedung diklat.	
6	Sistem Informasi Pelaporan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Kecamatan	Sistem informasi pelaporan warga terhadap fasilitas umum yang rusak, sengaja dirusak, atau membutuhkan fasilitas tambahan	Smart governance
7	Integrasi agenda untuk seluruh sekpri	Sekretariat Daerah	Integrasi data untuk sekpri	Smart governance
9	SIM GAKDA	SATPOL PP		Smart governance
10	Apresiasi Seniman (SIM)	Dinas Pariwisata	Sistem informasi untuk menampilkan dan mengapresiasi seniman	Smart society
13	SIM Inventarisasi	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi yang membantu dalam mengelola inventarisasi OPD	Smart governance
16	Aplikasi Baca Online Yuk!	Dinas Perpustakaan	Aplikasi perpustakaan untuk membaca buku secara online	Smart society
17	SIM Sosialisasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan	Penjadwalan sosialisasi kearsipan. Memasukkan data target dan realisasi pencapaian tiap sosialisasi dengan OPD lain, untuk memastikan bahwa menerapkan pengelolaan kearsipan	Smart governance

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			sesuai dengan yang diharapkan	
18	Dashboard Persebaran Hasil Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dasboard yang berisi informasi mengenai titik-titik pesebaran hasil industri	Smart economy
19	Dashboard Pemetaan	Dinas Kesehatan	terkait masing-masing urusan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit	Smart governance
20	Dashboard Kesehatan Kota Madiun	Dinas Kesehatan	Menampilkan visualisasi berkaitan dengan kesehatan, angka kematian, dan keluarga berencana	Smart governance
21	SIM Pameran Dagang	Dinas Perdagangan	Sistem informasi yang mampu memberikan informasi mengenai pameran dagang, promosi produk dalam negeri	Smart economy
22	Dashboard Konflik	Bakesbangpol	Dashboard yang menampilkan visualisasi konflik yang terjadi di kota Madiun	Smart society
23	RTHKP Virtual 360	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi yang dapat menampilkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan vitur 360. apikasi ini dapat menjadi sarana edukasi, hiburan maupun sumber informasi bagi masyarakat	Smart environment
24	Dashboard Kependudukan untuk Summary Executive	Dispendukcapil	dashboard ini berisikan informasi mengenai jumlah penduduk, jenis	Smart governance

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
			kelamin, usia, dan persebaran penduduk	
25	Aplikasi Leger Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang dapat memudahkan dalam melakukan leger jalan. Leger (jalan) bermakna "catatan tentang perkembangan ruas jalan"	Smart governance
26	DASHBOARD TREND INVESTASI ESS	DMPTSP	Menyajikan data untuk stakeholder penting seperti Bupati mengenai data trend investasi yang ada di Madiun	Smart economy
27	Dashboard DPMPTSP	DPMPTSP	Dashboard pelayanan DPMPTSP	Smart governance
28	LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah)	Sekretariat Daerah	(laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah)	Smart governance
29	E-Monitoring Operasi	Satpol PP	Daftar petugas, sasaran operasi, lokasi, keterangan, serta dokumentasi sebelum, ketika, dan setelah penertiban. Juga terdapat grafik untuk menunjukkan tren penertiban, serta peta penertiban yang pernah dilakukan (sebagai referensi untuk penyidikan penertiban selanjutnya).	Smart governance
32	SIM Hasil Monitoring	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi yang mampu untuk menyimpan dan menampilkan hasil dari monitoring di lapangan	Smart economy

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	OPD	Keterangan	Dimensi
33	SIM Perencanaan Khusus Internal	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem Informasi perencanaan dalam dinas	Smart governance
34	Aplikasi pencarian partisipasi tenaga perempuan di seluruh Madiun	Dinas Sosial	Aplikasi pencarian tenaga perempuan	Smart economy
35	SIM Penjadwalan dan Penugasan	Inspektorat	Untuk memudahkan koordinasi dengan OPD yang lain	Smart governance
36	Aplikasi Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Mengumpulkan peraturan-peraturan yang berlaku seperti UU, PERMEN, Kebijakan	Smart governance
37	MITS (Madiun Intelegent Traffic Systems)	Dinas Perhubungan	Sistem lampu merah cerdas. Fitur : jika macet di sisi arah kanan maka lampu hijau otomatis lebih lama analisis kemacetan	Smart living
38	SIM Kebakaran	Satpol PP	Pendeteksian adanya potensi kebakaran dengan memanfaatkan sensor panas pada titik rawan kebakaran dan penerimaan secara online (versi website)	Smart living

4.4. Rencana Penguatan Literasi *Smart City* Kota Madiun

Pengertian literasi menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan materi cetak dan tulisan yang terkait dengan berbagai bidang. Jenis literasi dibedakan menjadi:

1. Literasi Teknologi
2. Literasi Informasi
3. Literasi Media
4. Literasi Global
5. Literasi Kompetensi Sosial Dan Tanggungjawab.

Selain literasi melalui Website <https://madiunkota.go.id/>, penguatan literasi *Smart City* dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen *Smart City* lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui bimtek, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Penguatan literasi *Smart City* sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparat tentang pentingnya implementasi *Smart City* agar dapat tersampaikan dengan baik.

4.4.1 Penguatan Literasi Masyarakat

Penguatan literasi masyarakat terhadap *Smart City* dapat dilakukan melalui:

1. Sosialisasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat, Forum Komunikasi Kelompok Sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada.
2. Melakukan kampanye massif melalui produksi konten di media massa, baik online dan offline, serta media sosial tentang gerakan pengembangan *Smart City*, program dan tahapan implementasinya.
3. Membangun sinergi pentaholic (akademik, bisnis, pemerintah, media dan komunitas) melalui forum *Smart City*.

4.4.2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparat

Peningkatan kapasitas SDM aparat diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan literasi *Smart City* di kalangan aparatur, tetapi juga untuk menjamin keberhasilan pengembangan dan implementasi *Smart City* di Kota Madiun. Peningkatan kapasitas SDM aparat untuk mendukung *Smart City* dilakukan melalui:

1. Pelatihan pengelolaan operasional situs web OPD
2. Pelatihan pengisian konten situs web OPD
3. Pelatihan pengelolaan data pengaduan (LAPOR dan Form Pengaduan Layanan Masyarakat)
4. Pelatihan PPID
5. Sosialisasi Program Kota Madiun *Smart City*
6. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer
7. Sosialisasi Masterplan *Smart City* Kota Madiun
8. Pelatihan operasional dan pemeliharaan jaringan komputer lokal
9. Pelatihan jaringan berbasis teknologi mikrotik, Cisco dan juniper
10. Pelatihan keamanan komputer

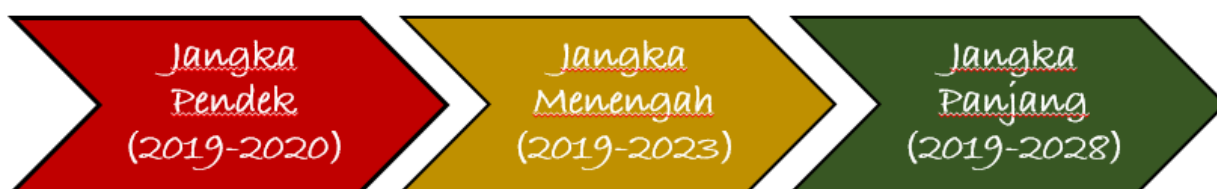
11. Pelatihan pemrograman aplikasi berbasis web dan mobile (android dan IOS)
12. Pelatihan pengembangan website
13. Pelatihan windows server
14. Pelatihan pengelolaan system database (MySQL, Oracle, dan PostgreSQL)
15. Pelatihan operasional aplikasi-aplikasi yang telah dibangun
16. Pelatihan pengolahan data statistic dan infografis
17. Pelatihan pengelolaan SPSE (penunjang e-procurement)

Selanjutnya sosialisasi *Smart City* juga akan berhasil jika dimasukkan sebagai kegunaan dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat. Pelayanan secara baik dan cepat melalui konsep *Smart City* akan membawa *Smart City* masuk ke tengah masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan pada akhirnya bisa bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat.

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY KOTA MADIUN

Road map atau peta jalan pembangunan *Smart City* Kota Madiun dimulai dari dimensi utama yang menjadi fokus dalam pembangunan *Smart City*. Pembangunan *Smart City* Kota Madiun berdasarkan dimulai berdasarkan roadmap jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun) seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 51 Roadmap Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang

Dalam roadmap implementasi program pembangunan *Smart City*, dimensi yang menjadi focus utama dalam pembangunan *Smart City* Kota Madiun adalah dimensi *Smart Branding*. Melihat kondisi Kota Madiun, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan agar Kota Madiun memiliki positioning yang kuat di masyarakat, diantaranya mengembangkan wajah kota dan pariwisata serta peluang bisnis bagi investor di Kota Madiun. Dari potensi inilah kemudian disepakati *quick win* program pembangunan *Smart City*. Hasil *quick win* berupa program pembangunan PeceLand.

1. Quick Win: PeceLand

PeceLand merupakan pariwisata yang mengedepankan pada edukasi tentang kuliner khas, budaya, dan ikon Kota Madiun. Kuliner yang menjadi ciri khas Kota Madiun adalah Pecel. Kota Madiun juga dikenal sebagai kota pendekar yang dibuktikan dengan adanya dengan adanya 14 perguruan pencak silat yang tersebar diseluruh Kota. Selain itu Kota Madiun juga terkenal sebagai kota penghasil kereta api dimana terdapat pabrik Kereta Api (PT. INKA) terbesar di Asia Tenggara yang luasnya mencapai 22 hektar. PeceLand ini akan dikembangkan dengan 3 ikon tersebut yaitu: Pecel, Pencak Silat, dan Kereta Api yang digambarkan seperti pada gambar 5.2.

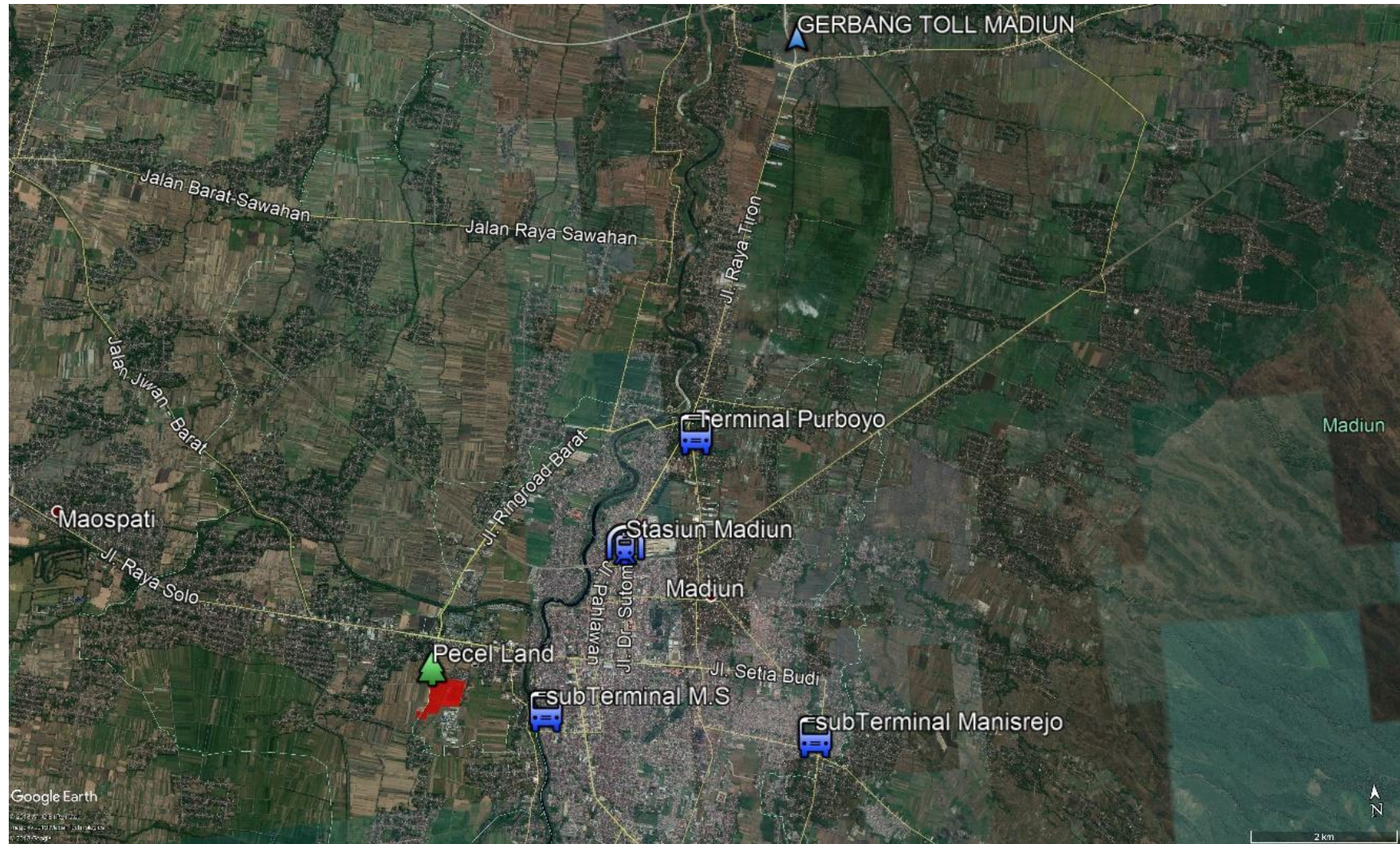


Gambar 5.2 PeceLand: Quick Win Smart City Kota Madiun

Lokasi PeceLand berada di Jalan Tirtaraya, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan PeceLand adalah 18 Hektar yang dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan akses menuju PeceLand pada Gambar 5.4.



Gambar 5.2Peta Lokasi PeceLand



Gambar 5.3 Akses Menuju PeceLand

Pembangunan PeceLand ini dimulai dengan pelelangan lahan. Setelah lahan telah disepakati, tahap selanjutnya adalah urban farming atau penanaman bahan-bahan pembuatan pecel, dari mulai sayur – sayur an dan bahan – bahan pembuatan sambel kacang. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan musem pecel tempoe dulu, galeri oleh – oleh, serta sarana yang unik atau instagramable, wisata air sungai, transportasi traincel untuk berkeliling, dan pembangunan aplikasi e-PeceLand berbasis android GPS dimana aplikasi ini untuk memudahkan pengunjung mengecek keberadaan posisi pengunjung. Tujuan utama dari PeceLand adalah membuat pengunjung interaktif dengan slogan “*Green and Farm*” dimana pengunjung dapat memilih dan memetic sayur – sayuran, mengoleh sambel pecel sesuai keinginan mereka.

Program pembangunan PeceLand merupakan program pembangunan dalam roadmap jangka pendek (2019-2020) yang kemudian akan dilakukan pengembangan dalam jangka menengah (2019-2023) dan jangka panjang (2020-2023). Roadmap pembangunan jangka pendek: PeceLand akan dipaparkan sebagai berikut.

5.1 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Pendek (Quick Win) Kota Madiun: PeceLand

Tabel 5.1 Roadmap Implementasi Program Pembangunan Jangka Pendek: PeceLand

ID	Program	Tujuan dan Sasaran	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi		Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
QW0 1	Urban Farming	Penanaman bahan olahan pecel	Banyaknya jenis sayuran bahan pecel	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD, BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)		2019 (Perencanaan) 2020(Pembangunan) 2021-2028 (pengembangan)	205(15)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
QW0 2	Pengolahan Sambel Pecel :	Pengenalan variasi proses	Meningkatnya pemahaman masyarakat	Dinas PUTR	Dinas Perindustrian, Dinas	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD,	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan		2019 (Perencanaan)	216(15)	Program Pengelolaan

ID	Program	Tujuan dan Sasaran	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi		Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	- Pembangunan Fisik Rumah Produksi Sambel Pecel - Penyiapan Sumber Daya Manusia	pembuatan bumbu pecel		Dinas Tenaga Kerja	Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Disbudparpora	BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum, dan pelaku usaha				2020(Pembangunan) 2021-2028 (pengembangan)		Kekayaan Budaya
QW03	Pembangunan Galeri/Museum Pecel Tempo Doeloe dan Museum Silat	Pengenalan dan edukasi sejarah pecel Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan branding pecel Kota Madiun semakin luas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Disbudparpora, Dinas PUTR	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD, BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan		2019 (Perencanaan) 2020(Pembangunan) – 2021 2022-2028 (pengembangan)	216(15)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
QW04	Pembangunan Galeri Oleh-Oleh	Pengenalan kuliner dan kerajinan	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan	Dinas Koperasi dan UMKM	Disbudparpora, Dinas	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD,	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan		2019 (Perencanaan)	216(15)	Program Pengelolaan

ID	Program	Tujuan dan Sasaran	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi		Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		khas Kota Madiun	branding Kota Madiun semakin luas		Perdagangan	BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum, dan pelaku usaha				2020(Pembangunan) 2021-2028 (pengembangan)		Kekayaan Budaya
QW05	Pembangunan sarana dan prasana yang instagramable	Meningkatkan antusiasme pengunjung di Kota Madiun	Meningkatnya jumlah pengunjung	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas PU dan Tata Ruang, BAPPEDA	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD, BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)		2019 (Perencanaan) 2020(Pembangunan) 2021-2028 (pengembangan)	302(15)	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
QW06	Pembangunan wisata air/sungai	Meningkatkan antusiasme	Meningkatnya jumlah pengunjung	Dinas Kebudayaan Pariwisata,	Dinas Lingkungan Hidup,	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD,	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan		2019 (Perencanaan)	302(15)	Program Pengembangan

ID	Program	Tujuan dan Sasaran	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi		Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		pengunjung di Kota Madiun		Pemuda dan Olahraga	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas PU SD	BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum, dan pelaku usaha				2020(Pembangunan) 2021-2028 (pengembangan)		Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
QW07	Pengembangan kebun tebu	Sarana pembelajaran pengolahan gula merah secara tradisional	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan proses pembuatan gula merah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Lingkungan Hidup, Disbudparpora	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD, BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)		2020-2028	205(15)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
QW08	Pemanfaatan dan pengolahan	Penguraian sampah organik	Penurunan jumlah sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Disbudparpora	Masyarakat, UKM, Dinkes,	APBD	Monev dilakukan setiap bulan		2020-2028	205(18)	Program Pengembangan Kinerja

ID	Program	Tujuan dan Sasaran	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi		Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	sampah organik menjadi kompos					kecamatan, kelurahan						Pengelolaan Persampahan
QW09	Traincel (Angkutan Wisata didalam Kawasan PeceLand)	Memudahkan akses keliling PeceLand	Meningkatnya jumlah pengunjung	Dinas Perhubungan	Disbudparpora	Dinas Tenaga Kerja, Pelaku usaha	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)		2019 (perencanaan) 2020 (pembangunan) 2021-2028 (pengembangan)	209(16)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
QW10	Aplikasi e-PeceLand	Memudahkan akses pengunjung	Meningkatnya jumlah pengunjung	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disbudparpora	Dinas Tenaga Kerja, Pelaku usaha	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)		2019 (perencanaan) 2020 (pembangunan) 2021-2028 (pengembangan)	302(15)	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata

5.2 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Madiun

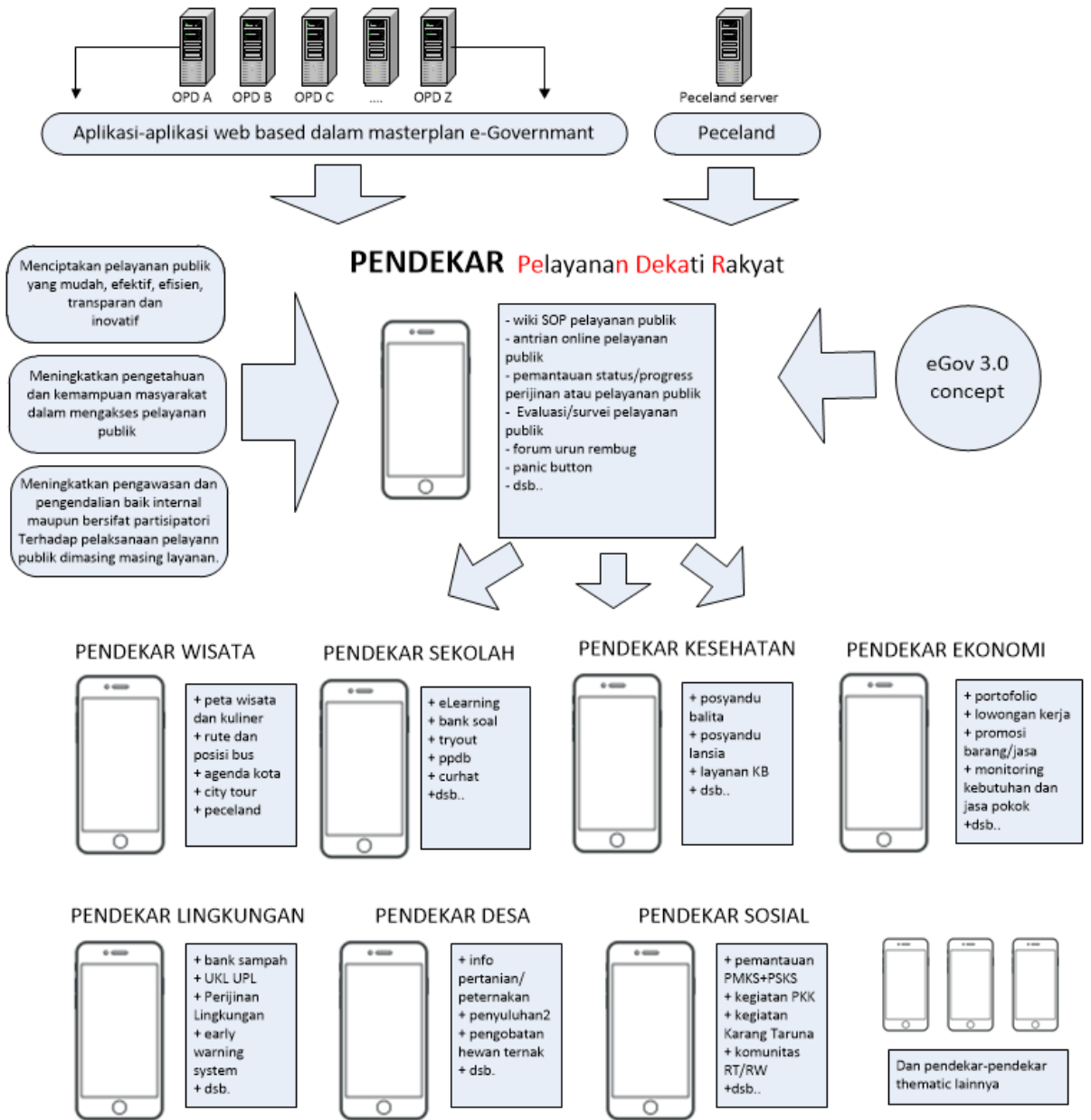
Roadmap atau peta jalan pembangunan *Smart City* Kota Madiun jangka menengah dan jangka panjang akan diuraikan berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* seperti dibawah ini.

5.2.1 Roadmap Smart Governance

Dalam menerapkan roadmap atau peta jalan pembangunan *Smart Governance* didapat berdasarkan hal-hal berikut :

- 1) Program dan sasaran dimensi *Smart Governance* yang meliputi:
 - Menciptakan pelayanan publik yang mudah, efektif, efisien, transparan dan Inovatif
 - Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian baik internal maupun bersifat partisipatori Terhadap pelaksanaan pelayann publik dimasing masing layanan.
- 2) Masterplan *e-Government* 2018-2023
- 3) Konsep eGov 3.0 yang fokus pada pelayanan yang lebih mendekatkan layanan personal per individu

Berdasarkan tiga hal tersebut, maka dirancanglah sebuah sistem dan aplikasi unggulan dengan nama **Pendekar**. Aplikasi Pendekar adalah sebuah aplikasi pada gadget yang diharapkan semua masyarakat Kota Madiun menginstallnya dalam gadgetnya. Di dalam aplikasi Pendekar terdapat bagian aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi-aplikasi yang secara umum dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sedangkan Aplikasi khusus adalah aplikasi yang mempunyai tema tertentu misalnya terkait w isata, pendidika/sekolah, ekonomi, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini saling terhubung dan merupakan bagian dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan berdasarkan masterplan eGovernment. Aplikasi ini dibuat dengan auto update sehingga fitur-fitur aplikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Aplikasi ini juga merupakan bagian dari sistem yang ada di Peceland. Dengan dekatnya seluruh layanan dan informasi kota kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat dengan mudah untuk mendapatkan feedback bagi penyempurnaan layanan dan pembangunan Kota Madiun. Gambar dibawah menunjukkan posisi Aplikasi Pendekar dan contoh-contoh content yang akan dimuat didalamnya.



Gambar 5.4 Aplikasi Pendekar

Selain program unggulan Pendekar diatas, pembangunan smart Governnace jangka menengah dan jangka panjang juga akan melaksanakan program-program lain. Adapun program-program ini diuraikan pada tabel roadmap Smart Governnace dibawah ini.

Tabel 5.2 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Smart Governance

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
G1 S1P 1	Program Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	G1S1P1A. Aplikasi PENDEKAR Modul Prosedur Layanan Publik	Meningkatkan pengawasan layanan publik	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Inspektorat	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2020-2021 2022-2028 (Pengembangan)	404(15)	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
G1 S1P 2	Program Pembangunan Sarana Layanan Publik	G1S1P2A. Pecel Andok, Penyediaan Layanan Internet Sampai RT, Lempeng Gapit, Gajahmada, Cintailah Ananda	Menciptakan sarana layanan publik	Jumlah pembangunan sarana layanan publik	Semua OPD yang memiliki layanan Publik	BPKAD, BAPPEDA, Bagian Hukum	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2020 2021-2028 (Pengembangan)	401(24)	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
G1 S1P 3	Program Efisiensi Kebutuhan Sarana	G1S1P3A. Less Paper	Meningkatkan efisiensi sarana layanan publik	Jumlah layanan publik yang menerapkan <i>paperless</i>	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	401(24)	Program Peningkatan Ketatalaksanaan

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
											Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
G1 S2P 1	Program Sosialisasi Prosedur Layanan Publik	G1S2P1A. Aplikasi PENDEKAR Modul Prosedur Layanan Publik	Meningkatkan kesadaran layanan publik	Jumlah permintaan layanan publik	Semua OPD yang memiliki layanan publik	BPKAD, BAPPEDA, inspektorat	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019 - 2028	401(24)	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
G1 S2P 2	Program Pengembangan Portal Layanan Publik Terpadu	G1S2P2A. Aplikasi PENDEKAR Modul Portal Layanan Publik Terpadu	Meningkatkan kemudahan akses layanan publik	Jumlah pengguna layanan publik	Semua OPD yang memiliki layanan publik	BPKAD, BAPPEDA, Dinkominfo	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020(Pembangunan)	210(15)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
									2021-2028 (Pengembangan)		
G1 S2P 3	Program Penguatan Pelayanan	G1S2P3A. Rekrutmen SDM	Meningkatkan kuantitas SDM layanan publik	Rasio permintaan layanan publik dan SDM layanan publik	Semua OPD yang memiliki layanan publik	BPKAD, BAPPEDA, inspektorat , bagian Hukum	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2018(Penerapan)	406(19)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
		G1S2P3B. Supporting Aplikasi	Menunjang layanan publik	Prosentase layanan publik online	Semua OPD yang memiliki layanan publik	BPKAD, BAPPEDA, inspektorat , bagian Hukum	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2018(Penerapan)	406(17)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
G2 3S1 P1	Program Penambahan Sarana dan Prasarana	G23S1P1A. Aplikasi PENDEKAR EKONOMI	Memudahkan pemenuhan bahan dan jasa pokok	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD,	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	401(15)	Program Peningkatan Fasilitas

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Pendukung Kebutuhan Bahan dan Jasa Pokok	Modul Sarana Prasarana Pendukung Kebutuhan Bahan Pokok & Modul Sarana Prasarana Pendukung Kebutuhan Jasa Pokok		pendukung kebutuhan bahan dan jasa pokok	Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dinas perdagangan, dinas perindustrian	BAPPEDA, Dinkominfo					Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
G2 3S1 P2	Program Pengembangan Portal Monitoring Kebutuhan Bahan dan Jasa Pokok	G23S1P2A. Aplikasi PENDEKAR EKONOMI Modul Portal Monitoring Kebutuhan Bahan Pokok & Portal Monitoring Kebutuhan Jasa Pokok	Memudahkan monitoring bahan dan jasa pokok melalui portal	Rerata downtime	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dinas perdagangan, dinas perindustrian	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD, BAPPEDA, Dinkominfo	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	210(15)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
G4 S1P 1	Program Pengembangan Prosedur Operasional OPD	G4S1P1A. Aplikasi PENDEKAR Modul Prosedur Operasional OPD	Meningkatkan prosedur operasional OPD	Jumlah prosedur operasional baru	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2019-2028	401(23)	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah
G4 S1P 2	Program Keterbukaan Informasi Publik	G4S1P2A. DASHBOARD MADIUN TODAY, JDIH	Meningkatkan akses keterbukaan informasi publik	Jumlah website informasi publik	Semua OPD yang memiliki informasi publik	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD, BAPPEDA, Dinkominfo	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	210(15)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
G4 S1P 3	Program Manajemen Risiko	G4S1P3A. Manajemen Risiko Informasi Data	Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data	Frekuensi backup	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019-2028	210(15)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		G4S1P3B. Manajemen Risiko Aset IT	Meminimalisir terjadinya risiko TI	Frekuensi perawatan aset TI	Semua OPD	Semua OPD	APBD			210(15)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		G4S1P3C. Manajemen Risiko SDM SPBE	Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dalam mengelola risiko	Prosentase risiko terkait <i>human error</i>	Semua OPD	Semua OPD	APBD			406(17)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
G4 S1P 4	Program Manajemen Pengetahuan	G4S1P4A. Service Desk (FnQ)	Menciptakan single point penyelesaian insiden dan masalah TI	Rasio penyelesaian insiden	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	406(15)	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian
		G4S1P4B. Strandart Operational Procedure (SOP)	Menstandarisasi pengelolaan aktivitas pemerintahan	Rasio sub bidang yang belum memiliki SOP	Semua OPD	Semua OPD	APBD				

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		G4S1P4C. Wiki	Mengoptimalkan media berbagi pengetahuan	Jumlah pengunjung website wiki	Semua OPD	Semua OPD	APBD				
G4 S1P 5	Program Manajemen Perubahan	G4S1P5A. E-History	Menerapkan manajemen perubahan	Rasio perubahan yang telah selesai	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019-2020	406(17)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
G4 S1P 6	Program Finalisasi Integrasi Proses dan Layanan antar OPD	G4S1P6A. Integrasi sistem :	Mengintegrasikan layanan antar OPD	Prosentasi aplikasi umum yang terintegrasi	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Perencanaan-Penganggaran) 2021 (Pelaksanaan-Pelaporan)	401(24)	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
		G4S1P6B. Layanan dengan Tanda tangan Elektronik	Meningkatkan efisiensi layanan OPD	Prosentase OPD yang telah menerapkan tanda tangan elektronik	Semua OPD	Semua OPD					

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
									2022-2028 (Pengembangan)		
G4 S2P 1	Program Pelatihan Staf Perencana	G4S2P1A. E-APARATUR Modul Pelatihan Staf Perencana	Mewujudkan staf yang ahli dalam bidangnya	Prosentase staf yang telah mengikuti pelatihan	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019-2028	404(15)	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
G4 S2P 2	Program Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja	G4S2P2A. E-APARATUR Modul Monev Beban Kerja	Meningkatkan kinerja SDM	Frekuensi monev beban kerja	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	210(15)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
G4 S2P 3	Program Evaluasi Kebutuhan Peningkatan	G4S2P3A. E-APARATUR Modul Evaluasi Kompetensi	Menerapkan evaluasi kinerja SDM	Frekuensi pelatihan staf	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019-2028	403(15)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Kompetensi SDM										Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
G5 6S1 P1	Program Evaluasi Regulasi Layanan Publik	G56S1P1A. Aplikasi PENDEKAR Modul Evaluasi Regulasi Layanan Publik	Mengetahui efektifitas regulasi layanan publik	Frekuensi monev regulasi layanan publik	Inspektorat	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019-2028	403(19)	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan
G5 6S1 P2	Program Pengembangan Mata Warga	G56S1P2A. MATA WARGA	Menciptakan pelayanan publik yang mudah, efektif, efisien,	Jumlah komplain masyarakat	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	406(17)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
			transparan dan inovatif.								
G5 6S1 P3	Program Sosialisasi Draft Kebijakan Daerah	G56S1P3A. Aplikasi PENDEKAR Modul Draft Kebijakan Daerah	Menciptakan kebijakan daerah yang efektif	Prosentase draft kebijakan yang telah disetujui	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2028	406(18)	Program Penataan Aparatur
G5 6S1 P4	Penyusunan Kebijakan Pembangunan Layanan SPBE Dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (Semua Layanan Publik)	G56S1P4A. Masterplan SPBE, PERDA, PERWALI, Surat Edaran	Menciptakan pedoman kebijakan pembangunan dan layanan publik	Jumlah kebijakan pembangunan layanan SPBE	Semua OPD	Semua OPD	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019-2028	406(18)	Program Penataan Aparatur

5.2.2 Roadmap Smart Branding

Roadmap pembangunan program *Smart Branding* jangka menengah dan jangka panjang akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 0.3 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Smart Branding

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
B1S1P1	Program Pendataan dan Penetapan Cagar Budaya	B1S1P1A. Makam Kuncen dan Makam Taman	Mendata cagar budaya yang ada di Kota Madiun	Pendataan dan penetapan cagar budaya milik Kota Madiun di tingkat nasional maupun mancanegara	Disbudparpora	Budayawan, Seniman, Komunitas, Kecamatan, Kelurahan, Bappeda, BPKAD, Bagian Hukum, Masyarakat	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan)	216(15)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		B1S1P1B. Bosbow dan cagar budaya lainnya	menetapkan cagar budaya yang ada di Kota Madiun						2020 (Pendataan)		
		B1S1P1C. INKA dan PG Redjo Agung	Melesetarikan cagar budaya yang ada di Kota Madiun						2021 (Penetapan)		
								2022-2028 (Penetapan tingkat nasional)			
B1S2P1	Program Pengembangan Wisata Pengalaman Pencak Silat	B1S2P1A. Galeri Pencak Silat	Mengenalkan pencak silat ke wisatawan	Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pencak silat adalah ciri	Disbudparpora, Padepokan pencak silat	Budayawan, Seniman, Komunitas, Kecamatan, Kelurahan, Bappeda,	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	216(15)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
				khas Kota Madiun		BPKAD, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Masyarakat					
B1S2P2	Program Sahabat Pencak Silat	B1S2P2A. Pembangunan Padepokan bersama sekaligus sebagai galeri marchandise Pencak Silat	Mengenalkan pencak silat ke wisatawan khususnya wisatawan luar Kota Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pencak silat adalah ciri khas Kota Madiun	Disbudparpora, Padepokan pencak silat, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Budayawan, Seniman, Komunitas, Kecamatan, Kelurahan, Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Bagian Hukum, Masyarakat, dan Pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	213(15)	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
		B1S2P2B. Pertandingan silat dan seni rutin dilakukan Pemerintah daerah	Menyebarluaskan event pencak silat ke wisatawan khususnya wisatawan luar Kota Madiun								
B1S3P1	Program Pembangunan PeceLand	B1S3P1A. Pembebasan Lahan	Menjadikan destinasi wisata	Meningkatnya jumlah wisatawan	Disbudparpora, Dinas PU dan Tata Ruang,	Komunitas, Kecamatan, Kelurahan,	APBD dan investor	Monev dilakukan	2019 (Perencanaan)	302(15)	Program Pengembangan Pemasaran

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		B1S3P1G. Pengembangan wisata air sungai	Menjadikan destinasi wisata sebagai branding Kota Madiun								
		B1S3P1H. Pengembangan kebun tebu	Menjadikan destinasi wisata sebagai branding Kota Madiun								
		B1S3P1I. Pengolahan sampah organik menjadi kompos	Menjadikan destinasi wisata sebagai branding Kota Madiun								
		B1S3P1J. Traincel (Angkutan dalam Peceland)	Menjadikan destinasi wisata sebagai branding Kota Madiun								
		B1S3P1K. Aplikasi e-Peceland berbasis android dan GPS	Menjadikan destinasi wisata sebagai branding Kota Madiun								
B1S3P2		B1S3P2A.	Mengenalkan Kota Madiun ke		Disbudparpora, Dishub,	Komunitas, Kecamatan,	APBD dan investor	Monev dilakukan	2019 (Perencanaan)	302(15)	Program Pengembangan

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Destinasi Wisata	B2S1P1C. Penertiban kawasan lingkungan PJU dan taman	Memudahkan akses menuju tempat wisata			Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinkominfo, BPBD, Satpol PP, Bagian Hukum, Masyarakat					
B2S1P2	Program Kerjasama Hotel	B2S1P2A. Bundling paket wisata dan akomodasi hotel	Meningkatkan kenyamanan wisatawan	Meningkatnya jumlah wisatawan	Disbudparpora	Asosiasi Pengusaha Hotel, Bappeda, DPMPSTP, BPKAD, Bagian Hukum	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Penerapan kerjasama)	212(15)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi
B34S1P1	Program Melek Bahasa Asing	B34S1P1A. Pelatihan/kursus kepada duta wisata dan tour guide	Meningkatkan kenyamanan wisatawan	Meningkatnya jumlah wisatawan	Disbudparpora, Dinas Pendidikan, Komunitas	Kecamatan, Kelurahan, Bappeda, BPKAD, Dinas	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Penerapan)	213(15)	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		B4S1P1C. Festival/Gebyar batik skala regional dan nasional	mengenalkan batik motif Kota Madiun sebagai identitas Kota								Kompetitif Usaha Mikro
		B4S1P1D. Penggunaan Batik khas di lingkungan ASN dan Sekolah di hari kamis dan jumat	mengenalkan batik motif Kota Madiun sebagai identitas Kota								
B4S1P2	Program Pengembangan Industri Sambel Pecel	B4S1P2A. Promosi melalui pameran tingkat regional dan nasional	Meningkatkan pemasaran industri sambel pecel	Meningkatkan penjualan sambel pecel	Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, UKM, Komunitas,	APBD	Monev dilakukan setelah event	2020-2028	211(16)	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
B4S1P3	Program Pengembangan	B4S1P3A. Pelatihan inovasi madu mongso	Meningkatkan pemasaran	Meningkatkan penjualan madu mongso	Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,	APBD	Monev dilakukan	2020-2028	211(16)	Program Pengembangan Sistem

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Industri Madu Mongso	(kemasan, rasa, dan bentuk)	industri madu mongso		dan Usaha Mikro	UKM, Komunitas,		setelah event			Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
B4S1P4	Program Pengembangan Sarana bagi PKL dan UKM	B4S1P4A. Sunday Market	Mengembangkan PKL dan UKM	Tersedianya sarana bagi PKL dan UKM	Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, UKM, Komunitas, Satpol PP	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	307(15)	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
B4S1P5	Program Pengembangan Platform Investasi	B4S1P5A. Sistem Informasi Potensi Investasi di sektor Industri Kreatif	Mengembangkan platform investasi	Tersedianya platform industri kreatif	Dinas Kominfo, Disbudparpora, Dinas koperasi dan usaha mikro, Dinas perdagangan	Dishub, Disnaker	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2020 (Perencanaan) 2021 (Penerapan) 2021-2028 (Pengembangan)	212(15)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi
B4S1P6	Program Pengembangan Digitalpreneur	B4S1P6A. Workshop Digitalpreneur	Mngembangkan market place daerah	Tersedianya market place daerah	Dinas Kominfo, Disbudparpora, Dinas koperasi	Dishub, Disnaker	APBD	Monev dilakukan	2020 (Perencanaan)	211(16)	Program Pengembangan Sistem

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Market Place Daerah	B4S1P6B. Gathering dengan dunia usaha, Industri kreatif, dan start up	Meningkatkan keandalan usaha daerah		dan usaha mikro, Dinas perdagangan			setiap bulan	2021 (Penerapan) 2021-2028 (Pengembangan)		Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
		B4S1P6C. Pelatihan berbasis digital bagi pelaku industri kreatif	Meningkatkan pengetahuan pelaku industry kreatif								
B5S1P1	Program Pengelolaan RTH	B5S1P1A. Kampanye pentingnya menjaga fasilitas RTH	Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan lestari	Tersedianya RTH diwilayah RT/RW	RT, RW, DIInas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	Masyarakat, Komunitas, Kelurahan, Kecamatan	APBD Desa	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	104(16)	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman
B5S1P2	Program Taman Kota bertematik	B5S1P2A. Madiun Kota Seribu Bunga	Menciptakan keindahan Kota	Tersedianya taman Kota tematik	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang	Masyarakat, Komunitas, Kelurahan, Kecamatan	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	205(17)	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
											Lingkungan Hidup
B5S1P3	Program Pertahanan Warisan Budaya	B5S1P3A. Restorasi bangunan kolonial belanda, termasuk transportasi kereta api	Mempertahankan warisan budaya sebagai wisata cagar budaya	Penetapan dan pelestarian cagar budaya	Disbudparpora, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,	Masyarakat, Komunitas, Kelurahan, Kecamatan, Bagian Hukum, Bappeda, BPKAD	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2020 (Penetapan) 2020-2028 (Pelestarian)	216(15)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
B5S1P4	Program Pembangunan Spot Berkreasi untuk Anak Muda	B5S1P4A. Pembangunan fasilitas olahraga, seni, pendidikan dan kreativitas anak muda	Meningkatkan area berkreasi anak muda	Tersedianya fasilitas bagi anak muda	Dinas Pu dan Tata Ruang, Disbudparpora, Dinas Pendidikan	Masyarakat, Komunitas, Kelurahan, Kecamatan, Bagian Hukum, Bappeda, BPKAD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2020-2028	103(20)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
B5S1P5	Program Penerangan	B5S1P5A.	Menciptakan Kota yang	Tersedianya lampu hias	Dinas PU dan Tata Ruang,	Dinkominfo, Masyarakat, Dishub	APBD	Monev dilakukan	2020-2028	104(16)	Program Pengelolaan

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Jalan melalui Lampu Hias	Penataan Lampu Hias	nyaman bagi pengguna jalan	untuk menerangi jalan	Dinas Perumahan dan Pemukiman			setiap bulan			RTH, PJU dan Permakaman
B5S1P6	Program Pengembangan Landmark Kota	B5S1P6A. Pembuatan Ikon Monumen Sambel Pecel	Menciptakan identitas Kota Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan identitas Kota Madiun	Dinas PU dan Tata Ruang, Disbudparpora,	Masyarakat, Komunitas, Kelurahan, Kecamatan, Bagian Hukum, Bappeda, BPKAD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2020-2028	404(17)	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota

5.2.3 Roadmap Smart Economy

Roadmap pembangunan program *Smart Economy* jangka menengah dan jangka panjang akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 0.4 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang *Smart Economy*

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
E1 S1P 1	Program One Taste/Satu	E1S1P1A. Lomba Cipta Menu	Mengenalkan karakter sambel pecel Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat	Dinas Perindustrian,	Media, Dinkominfo,	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap	2020 (perencanaan)	404(16)	Program Perencanaan Ekonomi,

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Karakter Rasa Sambel Pecel	Berbahan Dasar Sambel Pecel		akan ciri khas sambel pecel Madiun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Masyarakat , Asosiasi chef indonesia, UKM		semester (6 bulan)	2021-2028 (penerapan)		Sosial dan Budaya
E1 S1P 1	Program Pembangunan Museum Sambel Pecel	E1S1P1A Bazaar Festival Pecel pincuk E1S1P1B Madiun Heritage (Pecel, Silat,dll)	Menjadikan museum Sambel Pecel sebagai sarana edukasi masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan ciri khas sambel pecel Madiun	Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Hukum, Bappeda, BPKAD	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2020 (perencanaan) 2021 (pembangunan) 2022-2028 (pengembangan)	404(17)	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
E1 S2P 1	Program Sambel Pecel Berkualitas	E1S2P1A. Lomba cipta menu berbahan dasar sambel pecel	Meningkatkan kualitas sambel pecel	Meningkatnya kualitas sambel pecel khas Madiun	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	UKM, Industri, Dinas Kesehatan	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	404(16)	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		E1S2P1B. Bantuan pengurusan sertifikasi produk	Memudahkan pengurusan sertifikasi produk	Meningkatnya produk Kota Madiun yang telah bersertifikasi	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	UKM, Industri, BPOM	APBD				
		E1S2P1C. Pelatihan peningkatan kualitas produk, kekhasan produk, penguatan branding produk,									

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		pemasaran produk									
E1 S3P 1	Program Sentra Produk Unggulan	E1S3P1A. Sosialisasi travel agent dan media massa	Mengenalkan produk unggulan Kota Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan produk unggulan Kota Madiun	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	UKM, Industri, Dinas Kesehatan, masyarakat, dan Media	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	2111(16)	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
E1 S3P 2	Program Promosi Produk Unggulan	E1S3P2A. Sosialisasi travel agent dan media massa	Mengenalkan produk unggulan Kota Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan produk unggulan Kota Madiun	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	UKM, Industri, Dinas Kesehatan, masyarakat, dan Media	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	2111(16)	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
		E1S3P3A.					APBD			205(17)	

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
E1 S3P 3	Program Pengembangan Urban Farming	Penanaman kota (Turi)	Mengenalkan bahan sayuran pecel	Tersedianya taman dengan sayur-sayuran bahan pecel	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Disbudparpora	Kecamatan, Kelurahan, BPKAD, BAPPEDA, Disnaker, Dinkes, Bagian Hukum		Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028		Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		E1S3P3B. Penanaman bagi masyarakat (cambah dan kenikir)									
		E1S3P3C. Membangun kampung hidroponik dan kampung tematik lainnya									
E1 S4P 1	Program Kerjasama dengan industri primer	E1S4P1A. <i>Business Gathering</i>	Meningkatkan kerjasama dengan industri primer	Terjalannya kerjasama dengan industri primer	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian	BPKAD, BAPPEDA, Disnaker, Bagian Hukum, dan Pelaku Usaha	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	307(15)	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
E2 S1P 1	Program pemberdayaan komunitas usia produktif	E2S1P1A. Event kerjasama dengan komunitas	Mewujudkan pemberdayaan komunitas usia produktif	Terwujudnya pemberdayaan komunitas usia produktif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian	BPKAD, BAPPEDA, Disnaker, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	106(15)	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
E2 S1P 2	Program pelatihan ketrampilan ekonomi kreatif	E2S1P2A. Pelatihan memulai usaha kreatif	Menciptakan program ketrampilan ekonomi kreatif	Terciptanya program ketrampilan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian, Dinas tenaga kerja	BPKAD, BAPPEDA, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	106(15)	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
E3 S1P 1	Program Coaching Pelaku Usaha Digital	E3S1P1A. Pelatihan ketrampilan interpersonal bagi pelaku usaha digital	Mewujudkan pelaku usaha digital	Terwujudnya pelaku usaha digital	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian, Dinas tenaga kerja	BPKAD, BAPPEDA, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	306(15)	Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguasaan Perdagangan Non Pasar Rakyat
		E3S1P1B. Sosialisasi dan pelatihan	Mewujudkan pasar online dengan	Terwujudnya pasar online	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian,	BPKAD, BAPPEDA, Bagian Hukum,					

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		pemanfaatan fintech untuk akses pasar online, pembayaran non-tunai dan akuntansi online	pembayaran non tunai		Dinas tenaga kerja	dan pelaku usaha					
E3 S2P 1	Program Percepatan Usaha Berbasis Cashless	E3S2P1A. Aplikasi Cellink	Menerapkan percepatan usaha cashless	Penerapan usaha cashless	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian, Dinas perdagangan	BPKAD, BAPPEDA, Bagian Hukum, dan pelaku usaha, UKM	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	306(15)	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat
E3 S2P 2	Program Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Cashless	E3S2P2A. Workshop dan sosialisasi mengenai	Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung cashless	Tersedianya infrastruktur cashless	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian, Dinas perdagangan	BPKAD, BAPPEDA, Dinkominfo Bagian Hukum, dan pelaku	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	404(16)	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

ID	Program	Sub Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		infrastruktur yang mendukung cashless				usaha, UKM					
E3 S3P 1	Program Kerjasama dengan bank/ lembaga keuangan fintech sebagai penyedia	E3S3P1A. Workshop dan Sosialisasi transaksi cashless	Menjalin kerjasama dengan bank/lembaga keuangan	Terjalinnnya kerjasama dengan bank/lembaga keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian, Dinas perdagangan	BPKAD, BAPPEDA, Dinkominfo Bagian Hukum, dan pelaku usaha, UKM	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	404(16)	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5.2.4 Roadmap Smart Living

Roadmap pembangunan program *Smart Living* jangka menengah dan jangka panjang akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 0.5 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Smart Living

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
L1S1 P1	Program Penyediaan Berbagai Saluran Laporan	L1S1P1A. GPS Tracking Laporan	Memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kominfo, DPRD	Media : Radio Media cetak Social media	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019-2020	105(17)	Program Peningkatan Keamana

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Masyarakat (dan menetapkan standar kecepatan respon)		peran serta masyarakat								n dan Kenyamanan Lingkungan
L1S2 P1	Program Kampung Tematik dan Taman Tematik (untuk mereduksi polusi udara)	L1S2P1A. Penentuan tema lingkungan skala kecil	Menjadikan tempat tinggal yang nyaman	Menurunnya polusi udara di Kota	DLH, Kelurahan, RT/RW,	Dinas Pertanian, Media, Dinas Tenaga Kerja	APBD, Investor, Swasembada Warga	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020 : penentuan tema wilayah pengada an bibit persiapan sarana dan prasarana 2021-2022 : pemeliharaan pengada an pupuk	205(16)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	L1S2P1B. Monitoring kualitas nutrisi tanaman (misal di scan daun nya, akan muncul kandungan nutrisi dari tanaman tersebut)	Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengukuran kualitas lingkungan									
	L1S2P1C. Bantuan dana pengadaan dan perawatan kampung tematik	Memberikan fasilitas bagi masyarakat sadar lingkungan									

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		meningkatkan kualitas permukiman									Lingkungan Hidup
L2S1 P1	Program Pemberdayaan Kader Kesehatan	L2S1P1A. Pemberian insentif kader kesehatan dengan sistem point	Mewujudkan kemandirian dalam pelayanan kesehatan berbasis wilayah	Menurunnya jumlah masyarakat yang terkena penyakit	Puskesmas, RSUD, Dinas Kesehatan	Kelurahan, RT/RW	APBD	Monev setiap bulan	2019 - 2028	102(21)	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
	L2S1P1B. Pemetaan tenaga ahli kesehatan di masing-masing daerah	Mewujudkan kemandirian dalam pelayanan kesehatan berbasis wilayah									
	L2S1P1C. Pembinaan wilayah dengan system Bina Wilayah oleh Petugas Kesehatan	Mewujudkan kemandirian dalam pelayanan kesehatan berbasis wilayah									
L2S2 P1	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Layanan Kesehatan	L2S2P1A. Sosialisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi	Mewujudkan kemudahan dalam akses layanan kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Kominfo, Puskesmas, RSUD, Dinas Kesehatan	Kelurahan, RT/RW, Media	APBD, Investor	Monev setiap Triwulan	2019 - 2028	102(15)	Program Pengadaan Peningkatan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		Kesehatan Terpadu Berbasis Online (SIS-BrO) dan Sistem Online di Rumah Sakit									Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
		L2S2P1B. Sosialisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi di Rumah Sakit	Mewujudkan kemudahan dalam akses layanan kesehatan								
		L2S2P1C. Respon cepat PSC 112, public safety centre diperlukan	Mewujudkan kemudahan dalam akses layanan kesehatan								
L3S1 P1	Program Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk mengembalikan fungsi jalan)	L3S1P1A. Operasi Kaki Lima	Meningkatkan mobilitas dalam pemnfaatan jalan sebagai media transportasi	menurunnya jumlahkemacetan kota	Satpol PP	Dinas Perhubungan	APBD	Monev setiap bulan	2019 - 2028	103(17)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
L3S1 P2	Program Pemasangan CCTV di Persimpangan dan Ruas Jalan	L3S1P2A. CCTV Lalu Lintas	Meningkatkan keamanan pengguna jalan	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	Satpol PP, Kepolisian	APBD, investor	Monev setiap bulan	2019 - 2028	209(15)	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
L3S1 P3	Program Rekayasa Lalu Lintas (pada titik titik kemacetan)	L3S1P3A Siaga Lalu Lintas	Mewujudkan efisiensi dalam lalu lintas	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	Satpol PP, Kepolisian	APBD	Monev setiap bulan	2019 - 2028	209(15)	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
L3S1 P4	Program Pengadaan dan Pengimplementasian Teknologi Pendukung Transportasi	L3S1P4A. Sensor Jalan	Meningkatkan kemudahan dalam mengakses alat transportasi	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	Satpol PP, Kepolisian	APBD	Monev setiap bulan	2019 - 2028	209(16)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
L3S1 P5	Program Pengembangan ITS (Intelligent	L3S1P5A. Pengadaan ITS (<i>Intelligent Transport Systems</i>)	Meningkatkan kemudahan bagi pengguna jalan		Dinas Perhubungan	Satpol PP, Kepolisian	APBD	Monev setiap bulan	2019 - 2028	209(16)	Program Peningkatan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Transport Systems) pada setiap persimpangan di Wilayah Kota Madiun										Pelayanan Angkutan
L3S2 P1	Program Pertukaran Status Jalan Nasional dengan Jalan Kota	L3S2P1A. Pindah Status Jalan	Mewujudkan kemudahan bagi moda transportasi antar kota	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan, PU	Satpol PP, Kepolisian	APBD	Monev setiap 6 bulan	2021 - 2023	103(17)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
L3S2 P2	Program Pembangunan dan Pelebaran Pedestrian, Sepeda dan Jalur Difabel	L3S2P2A. Penambahan dimensi jalan agar dapat ditambahkan fasilitas-fasilitas tersebut	Mewujudkan dukungan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus	Meningkatnya akses kemudahan bagi Difabel	Dinas Perhubungan, PU	Satpol PP, Kepolisian	APBD	Monev setiap 3 bulan	2020 - 2028	103(17)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
L3S2 P3	Program Pengadaan	L3S2P3A. Aplikasi untuk tracking armada,	Meningkatkan kemudahan dalam	Meningkatnya akses bagi siwa	Dinas Perhubungan	Dinas Pendidikan	APBD, Investor	Monev setiap bulan	2019 - 2028	209(16)	Program Peningkatan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kejadian	L3S3P3A. Penyediaan jaringan smart system (PJU) pada kawasan strategis	Meningkatkan sistem penanggulangan trantib	Menurunnya tingkat kriminal	Kepolisian, Satpol PP	Dinas Perhubungan	APBD	Monitoring setiap 6 bulan	2019-2028	409(16)	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Umum
		L3S3P4A. Pemadam kebakaran pada kampong rawan kebakaran	Meningkatkan sistem penanggulangan trantib								
	Program Pembangunan Pedestrian pada Kawasan Strategis Penambahan Ruas Jalan	L3S3P5A. Penambahan pedestrian	Meningkatkan fasilitas bagi pejalan kaki	Meningkatnya fasilitas bagi pejalan kaki	Dinas Perhubungan,	Dinas PU	APBD, Investor	Monitoring setiap bulan	2019-2028	105(17)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
											Lingkungan

5.2.5 Roadmap Smart Society

Roadmap pembangunan program *Smart Society* jangka menengah dan jangka panjang akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.6 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Smart Society

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
S1 S1P 1	Program Komunikasi Dua Arah Pemerintah dan Masyarakat	S1S1P1A. Sosialisasi dan publikasi website melalui media cetak dan elektronik (melalui website, media sosial, media cetak dan	Mewujudkan masyarakat yang komunikatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Dinas Pendidikan	Semua OPD	APBD	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2019-2028	210(15)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		elektronik: videotron									
		S1S1B. P1Pembinaan Simpul-Simpul Masa (Influencer)									
S1 S2P 1	Program Masyarakat Partisipatif	S1S2P1A. Pengaktifan partisipasi masyarakat melalui dana sosial masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Dinas Pendidikan	Semua OPD	APBD	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2019-2028		
S1 S2P 2	Program Perbaikan Fasilitas Komunitas	S1S2P2A. Pembangunan sarana prasarana	Mewujudkan tujuan komunitas kota	Meningkatnya jumlah fasilitas penunjang Komunitas	Dinas pemuda dan pariwisata	Dinas PU, Dinas Pendidikan,	APBD, Investor	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	404(17)	Program Perencanaan Fisik dan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		komunikasi dan kolaborasi				Perpustakaan					Sarana Prasarana Kota
S1 S2P 3	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Cluster Masyarakat	S1S2P3A. Pembangunan kelompok masyarakat (cluster) Kota Madiun	Meningkatkan perasaan aman dalam pembentukan lokasi cluster	Terjaminnya lokasi cluster	Dinas Perkim		APBD, Investor	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	404(17)	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota
S1 S2P 4	Program Penyediaan Fasilitas Pendukung Interaksi Masyarakat	S1S2P4A. Pembangunan fasilitas fisik dan pendukung untuk interaksi masyarakat	Meningkatkan pembentukan lokasi cluster	Meningkatnya jumlah lokasi cluster yang ada di masyarakat	Dinas pemuda dan pariwisata	Semua OPD	APBD, Investor	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	404(17)	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota
S2 S1P 1	Program Digitalisasi Proses Pembelajaran	S2S1P1A. Platform edukasi berbasis digital	Mewujudkan kreatifitas msyarakat	Meningkatkan kemampuan individu	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan olahraga	Semua OPD	APBD	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	101(19)	Program Pendidikan non Formal

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
S2 S1P 2	Program Pembinaan Karakter	S2S1P2A. Event terkait pendidikan karakter	Meningkatkan karakter dan budi pekerti baik masyarakat	Meningkatkan kemampuan individu	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan olahraga	Semua OPD	APBD	Monev setiap bulan	2020-2028	217(15)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
S34 S1P 1	Program Pembinaan Keluarga	S34S1P1A. Kerjasama dengan orang tua terkait pentingnya pendidikan anak di rumah penegakan	Meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat	Meningkatkan kemampuan individu	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan olahraga	RT/RW, Kelurahan	APBD	Monev setiap bulan	2020-2028	208(15)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		S34S1P1B. program 1821									

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		S34S1P1C. Pemanfaatan aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)									
		S34S1P1D. Pembentukan tim pemantau melalui Forum PUSPA									
S34 S1P 2	Program Pojok Baca dan Pos Literasi	S34S1P2A. Sosialisasi dari KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) terkait pemanfaatan internet	Meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat	Meningkatkan kemampuan individu	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	RT/RW, Kelurahan, Dinas Pendidikan, Dinkominfo Disbudparpora	APBD	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	217(15)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		S34S1P2B. White list nusantara di router yang dipasang oleh Kominfo									Perpustakaan
		S34S1P2C. Sosialisasi dan Reward bagi peserta baru yang tertib membaca									
		S34S1P2D. Sarana belajar melalui permainan									
S34 S2P 1	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	S34S2P1A. Lomba perpustakaan, pembangunan studio 6D	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi	APBD	Monev setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	101(16)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
											Kependidikan
S34 S2P 2	Program Manajemen Sekolah dengan Kebutuhan Khusus	S34S2P2A. Pembangunan Fasilitas Sekolah untuk Difabel	Meningkatkan kemudahan belajar bagi difabel	Meningkatnya kualitas sekolah dan sarana bagi difabel	Dinas Pendidikan	Semua OPD	APBD, investor, masyarakat	Monev setiap bulan	2018-2028	105(17)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
S34 S2P 3	Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	S34S2P3A. Layanan akses pendidikan berbasis TIK	Meningkatkan pelayanan pendidikan	Meningkatnya pendidikan dengan pemanfaatan TIK	Dinas Pendidikan	Masyarakat, Kemendikbud	APBD	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2020-2028	101(15)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
S34 S3P 1	Program Standarisasi Kualitas Sekolah	S34S3P1A. Akreditasi SD, SMP berstandar nasional/internasional	Meningkatkan kualitas sekolah dan perguruan tinggi	Meningkatnya kualitas sekolah dan perguruan tinggi	Dinas Pendidikan, perguruan tinggi	Masyarakat, DIKTI, Kemendikbud	APBD, investor, masyarakat	Monev setiap bulan	2018-2028	101(15)	Program Manajemen Pelayanan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		S34S3P1B. Penyediaan pusat belajar bagi guru dan tenaga kependidikan									Pendidikan
		S34S3P1C. Studi banding ke sekolah percontohan									
S34 S3P 2	Program Pengembangan Kreativitas Civitas Akademik	S34S3P2A. Program Pengembangan Kreativitas Civitas Akademik	Mewujudkan generasi muda yang inovatif	Jumlah karya kreatifitas	Dinas Pendidikan, perguruan tinggi	Masyarakat , Semua OPD	APBD, investor, masyarakat	Monev setiap 3 bulan	2018-2028	101(15)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
S5 S1P 1	Program Diseminasi Produk Hukum	S5S1P1A. Sosialisasi produk hukum dengan pemerintah	Mewujudkan rasaaman terhadap hukum	Meningkatkan rasa aman terhadap hukum yang ada	Bagian Hukum	Semua OPD	APBD	Monev setiap Tahun	2019-2028	105(16)	Program Pembinaan, Penertiban dan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		Sosialisasi dan praktek simulasi bencana kebakaran dan bencana lainnya.									
S5 S1P 3	Program Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Lingkungan dan Kegawatdaruratan	S5S1P3A. Aplikasi kegawat daruratan	Meningkatkan keamanan berbasis kampung	Jumlah pos ronda	Kelurahan, RT/RW	Semua OPD	APBD	Monev setiap bulan	2019-2028	105(17)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		S5S1P3B. Sosialisasi penerapan aplikasi keamanan lingkungan dan kegawat daruratan bagi masyarakat	% peran serta msyarakat	Kominfo, kepolisian, dinas kesehatan	Kelurahan, RT/RW, Semua OPD	APBD					

5.2.6 Roadmap Smart Environment

Roadmap pembangunan program *Smart Environment* jangka menengah dan jangka panjang akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.7 Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Smart Environment

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
EN1 S1P1	Program Pengembangan Teknologi Untuk Sistem Monitoring Kualitas Air dan Udara	EN1S1P1A.	Meningkatkan sistem monitoring air dan udara	Meingkatnya indeks kualitas udara yang baik	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan	Perguruan Tinggi dan Laboratorium	APBD	Monev setiap bulan	2022-2025	205(16)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		EN1S1P1B	Meningkatkan sistem monitoring air dan udara								

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		EN1S1P1C. Pemasangan alat pantau kualitas air (Sungai Madiun) dan udara (Jl. Urip Sumoharjo/pintu keluar masuk Kota Madiun)	Meningkatkan sistem monitoring air dan udara								
		EN1S1P1D. Sistem monitoring kualitas udara dan air, untuk memberikan info terkait kualitas lingkungan, dan memberikan langkah/upaya yang harus	Meningkatkan sistem monitoring air dan udara								

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		di tingkatkan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan (jika kualitas tidak memenuhi EM) serta meningkatkan kesadaran masyarakat									
EN1 S1P2	Program Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai Lingkungan Hidup	EN1S1P2A.Pengadaan bantuan sarana prasarana kebersihan (alat potong rumput, gerobak sampah)	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberhidan lingkungan	Tingkat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan, DLH, Kelurahan, RT/RW	Media, Kelurahan, Dinas Sosial	APBD, Investor	Monitoring setiap 3 Bulan	2019-2028	409(17)	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		untuk masyarakat									Kelurahan
		EN1S1P2B. Kelurahan membuat jadwal pelaksanaan kerja bakti (bersih desa)	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberhidan lingkungan								
		EN1S1P2C. Sosialisasi pada masyarakat secara rutin	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberhidan lingkungan								
		EN1S1P2D. Sistem hotline/pelaporan khusus untuk DLH, karena sangat banyak pelaporan pada LH	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberhidan lingkungan								

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		EN2S1P1D. Sistem pemetaan RTH melalui citra satelit/digital dan dpt digunakan untuk monitor indeks tutupan	Mewujudkan kawasan kota yang sehat dan nyaman								
		EN2S1P1E. Penerapan teknologi wetland dengan menggunakan tumbuhan/tanaman hias untuk mengelola grey water serta tumbuhan yang digunakan	Mewujudkan kawasan kota yang sehat dan nyaman								

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		dan UPL industri secara online melalui aplikasi tertentu									
		EN6S1P1C. Program proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) onlien milik dinas LH provinsi untuk perusahaan besar sudah berjalan (sistem pelaporan)	Meningkatkan ijin pengurusan UKL dan UPL industri								
EN7 S1P1	Program Sosialisasi Kepada Masyarakat	EN7S1P1A.	Mewujudkan masyarakat yang	Meningkatnya masyarakat		Dinas kesehatan,	APBD		2020-2028	205(18)	Program Pengemba

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	untuk Pengelolaan Sampah dan Limbah	Melibatkan pihak akademisi dalam pengelolaan sampah dan limbah melalui penelitian atau teknologi.	mampu mengelola sampah dan limbah secara mandiri	mampu mengelola sampah dan limbah	Masyarakat, Kelurahan, RT/RW, DLH	Puskesmas, Perguruan Tinggi		Monev setiap 3 bulan			ngan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		EN7S1P1B. Optimalisasi dan inovasi peran dan fungsi bank sampah sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat seperti : sampah menjadi emas, sampah untuk	Mewujudkan masyarakat yang mampu mengelola sampah dan limbah secara mandiri							103(16)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		pelayanan kesehatan, sampah pengganti biaya angkutan umum.									
		EN7S1P1C. Pembentukan prototipe/pilot project komunitas masyarakat sadar lingkungan (my darling) untuk pengelolaan sampah secara 3R skala rumah tangga	Mewujudkan masyarakat yang mampu mengelola sampah dan limbah secara mandiri								
EN7 S2P1	Program Pengadaan/Pembang	EN7S2P1A.	Mewujudkan daerah yang siap mengolah		Kelurahan, RT/RW, DLH	Dinas kesehatan,	APBD		2020-2028	205(18)	Program Pengemba

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
		air limbah terpusat/ setempat (tidak memungkinkan karena kontur tanah landai) untuk komunal masih ada beberapa tempat									
		EN7S2P1D Pembangunan IPAL / IPLT skala kota dengan teknologi ramah lingkungan	Mewujudkan daerah yang siap mengolah sampah dan limbah secara mandiri								
EN7 S2P2	Program MoU dengan vendor pengelolaan limbah	EN7S2P2A. MoU dengan vendor pengelolaan	Meningkatkan kepastian dalam pengelolaan limbah B3	Penurunan jumlah sampah dan limbah kota	DPMPSTSP	DLH, Dinas Kesehatan	APBD	Monev setiap bulan	2020-2028	103(16)	Program Pengembangan Kinerja

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
	B3 yang berlisensi dari KLHK	limbah B3 yang berlisensi dari KLHK									Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
EN7 S3P1	Program Sosialisasi Pentingnya Energy yang Efisien	EN7S3P1A. Penggunaan lampu PJU yang hemat energi EN7S3P1B. Sistem monitor efisiensi energi, karena sulitnya dalam mengetahui efisiensi energi yang didapat dari upaya yang telah dilakukan	Mengurangi penggunaan energy meningkatkan efisiensi penggunaan energi	Menurunnya biaya listrik	Dinas PU	Dinas perhubungan dan DLH	APBD Investor	Monitoring setiap bulan	2019-2028	205(15)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

ID	Program	Sub-Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline	Ref Kode RPJMD	Program RPJMD
EN7 S4P1	Program Kerjasama dengan perguruan tinggi dan vendor teknologi dalam pengembangan energi alternatif ramah lingkungan	EN7S4P1A. Penggunaan solar sel namun terhambat biaya perawatan	Meningkatkan inovasi dalam penggunaan energy alternative	meningkatnya penggunaan energy kota	DLH, Dinas PUTR	Dinas perhubungan, perguruan tinggi	APBD Investor	Monitoring setiap bulan	2019-2028	205(15)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
EN7 S4P2	Program Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan sumber energi alternatif yang tersedia	EN7S4P2A. IPAL komunal diharapkan menjadi biogas melalui LKM	Meningkatkan kesadaran atas pentingnya penghematan sumber daya	Meningkatkan penggunaan energy alternatif	Dinas PU	Dinas perhubungan, perguruan tinggi	APBD Investor	Monitoring setiap bulan	2019-2028	205(15)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BAB VI PENUTUP

Buku *Master Plan Smart City* ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Daerah menuju *Smart City*. *Master Plan Smart City* ini disampaikan Program Inisiatif dan kerangka kerja *Smart City* dengan fokus pada peningkatan branding Daerah dengan pengembangan pariwisata, wajah kota, dan bisnis daerah agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakatnya pun menjadi lebih berkualitas.

Dalam buku ini juga dipaparkan profil serta kondisi Daerah yang mencakup visi dan misi Daerah, visi misi *Smart City*, strategi pembangunan *Smart City*, rencana aksi, dan *Roadmap* atau peta jalan pembangunan *Smart City* yang akan dijadikan sebagai landasan implementasi *Smart City* Daerah yang diuraikan menjadi 6 dimensi *Smart City*, yaitu:

1. *Smart Governance*;
2. *Smart Branding*;
3. *Smart Economy*;
4. *Smart Living*;
5. *Smart Society*; dan
6. *Smart Environment*.

Setiap inisiatif yang terdapat dalam *Roadmap Smart City* Daerah dijabarkan secara rinci sehingga bisa dijadikan sebagai panduan yang holistik bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan implementasi inisiatif *Smart City*. Dokumen *Master Plan Smart City* Daerah ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan masyarakat Daerah, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Daerah termasuk semua instansi Organisasi Perangkat Daerah yang tercakup di dalamnya. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa *Master Plan Smart City* ini harus selalu selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah serta masyarakat Daerah. Pada akhirnya, dokumen *Master Plan Smart City* ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan strategis dalam membangun *Smart City* di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001